



KAJIAN MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN & RENTAN UNTUK KEMANDIRIAN EKONOMI

2024

Kerja sama antara Kemitraan Australia -
Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif
(INKLUSI) dengan Direktorat
Penanggulangan Kemiskinan dan
Pemberdayaan Masyarakat Bappenas

- Penanggung Jawab** : **Tirta Sutedjo**
Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan
Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian
PPN/Bappenas
- Penyelaras Akhir** : **Dinar Dana Kharisma**
Perencana Ahli Madya DirekReforma Agrariat
Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan
Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas
- Ketua Tim Penyusun** : **Sri Roshidayati**
Perencana Ahli Madya DirekReforma Agrariat
Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan
Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas
- Tim Penyusun** : Tubagus Achmad Choesni, Mahastuti, Fisca Miswari
Aulia, Dwi Rahayuningsih, Jarot Nugroho, Gennady
Chitra Pati, Arrie Wibowo Witjaksono, Khalid Saefu
Sahman, Abdul Latief Ruchban, M. Haikal Trinanda,
Maureen Wanda Sabrina, Raditia Wahyu Supriyanto,
Nurfauzi Satrio, Ifqi Khairunnisa, Dimas Muhammad
Fachryza.
- Mitra Pembangunan** : **INKLUSI**
Irene Widjaya, Triashtra Lakshmi, Dwi Indah Wilujeng.
- DIFI - Innovation for Impact**
Dian Onno, Alfonsus Bayu Asmara, Irsan Nasution,
Joshua Siahaan, Edwin Hardi, Reza Rahardian, Fariz
Pratama, Aisyah Sabilla.

Diterbitkan Oleh :
DirekReforma Agrariat Penanggulangan
Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat,
Kementerian PPN/Bappenas

Kata Pengantar

Tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2024 akhirnya mencapai titik terendah dengan 8,57 persen pada bulan September. Penurunan kemiskinan ini juga didukung dengan 3 pilar intervensi yaitu; penurunan beban pengeluaran melalui bantuan sosial, peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan, dan penurunan kantong-kantong kemiskinan melalui infrastruktur dasar.

Model/skema pembangunan masyarakat yang baru, akan menjadi referensi bagi pemerintah nasional dan sub-nasional, pemerintah desa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program pemberdayaan masyarakat yang lebih efisien, efektif, dan inklusif. Skema ini diharapkan memiliki aspek inovatif, kesesuaian sekReforma Agrarial (adaptif, seperti pemberdayaan sosial dan ekonomi), serta responsif terhadap tantangan (disrupsi teknologi dan perubahan iklim).

Laporan ini sangat bermanfaat untuk digunakan dalam melaksanakan program pemberdayaan, dengan memuat konten model pemberdayaan yang dimulai dari perencanaan target sasaran intervensi hingga monitoring dan evaluasi serta keberlanjutan dari program tersebut. Selain itu, hasil dari evaluasi diskusi terfokus dan kunjungan lapangan dari beberapa program untuk melihat praktik baik yang dapat digunakan pada saat melaksanakan program pemberdayaan kedepannya.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih atas dukungan dari berbagai pihak, khususnya Tim DIFI dan dibantu oleh Inklusi, serta Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga yang memberikan informasi dan masukan-masukan selama diskusi terfokus dan kunjungan lapangan.

Akhir kata, semoga laporan ini bermanfaat bagi para pengambil kebijakan terkait, baik di pusat maupun daerah untuk melakukan berbagai upaya percepatan pengurangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan ekonomi. Kami sangat terbuka apabila ada masukan dan saran untuk perbaikan laporan ini.

Jakarta, Februari 2025
Direkur Penanggulangan Kemiskinan dan
Pemberdayaan Masyarakat,

Tirta Sutedjo

Daftar Singkatan

- APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Bappenas : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- BLK : Balai Latihan Kerja
- BPK : Badan Pemeriksa Keuangan
- BPD : Badan Permusyawaratan Desa
- BPS : Badan Pusat Statistik
- BUMDes : Badan Usaha Milik Desa
- CPM : Calon Penerima Manfaat
- CSR : *Corporate Social Responsibility*
- CU : *Credit Union*
- Diskumperindag : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, & Perdagangan
- DIT : *District Implementation Team*
- DLHK : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- DTKS : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
- FGD : *Focus Group Discussion*
- FLPP : Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
- GEDSI : *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*
- GII : *Gender Inequality Index*
- GTRA : Gugus Tugas Reforma Agraria
- IFAD : *International Fund for Agricultural Development*
- IKM : Industri Kecil dan Menengah
- IPM : Indeks Pembangunan Manusia
- K/L : Kementerian/Lembaga
- KK : Kepala Keluarga
- KemenkopUKM : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- Kemenkumham : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Kemenperin : Kementerian Perindustrian
- Kemenkes : Kementerian Kesehatan
- Kementan : Kementerian Pertanian
- Kemenko PM : Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- KLHK : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- KPH : Kesatuan Pengelolaan Hutan
- KPM : Keluarga Penerima Manfaat
- KPS : Kelompok Perhutanan Sosial
- KUB : Koperasi Kredit Usaha Bersama
- KUR : Kredit Usaha Rakyat
- Lavotas : Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
- LKBB : Lembaga Keuangan Bukan Bank
- LKMD : Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
- LKM : Lembaga Keuangan Mikro

- LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
- MBR : Masyarakat Berpenghasilan Rendah
- MIS : *Management Information System*
- MoU : *Memorandum of Understanding*
- MPM : *Multidimensional Poverty Measure*
- Musdes : Musyawarah Desa
- Musrenbang : Musyawarah Rencana Pembangunan
- Napza : Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif
- NGO : *Non-Governmental Organization*
- NIB : Nomor Induk Berusaha
- NIK : Nomor Induk Kependudukan
- OAP : Orang Asli Papua
- OTSUS : Otonomi Khusus
- PBK : Pelatihan Berbasis Kompetensi
- PDTT : Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Pemda : Pemerintah Daerah
- PENA : Pahlawan Ekonomi Nusantara
- Perda : Peraturan Daerah
- Permendesa : Peraturan Menteri Desa
- Permensos : Peraturan Menteri Sosial
- PHK : Pemutusan Hubungan Kerja
- PIAPS : Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial
- PIP : Pusat Investasi Pemerintah
- PLUT : Pusat Layanan Usaha Terpadu
- PKK : Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
- PMO : *Project Management Office*
- RKPS : Rencana Kelola Perhutanan Sosial
- RKT LH : Rumah Tidak Layak Huni
- RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
- RPJPN : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
- Rusunawa : Rumah Susun Sederhana Sewa
- SDGs : *Sustainable Development Goals*
- SHG : *Self Help Group*
- SIAPkerja : Sistem Informasi & Aplikasi Pelaporan Terpadu Ketenagakerjaan
- SIKP : Sistem Informasi Kredit Program
- SIKP UMi : Sistem Informasi Kredit Program Ultra Mikro
- SIKSMA : Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation
- SKMPP : Sistem Kinerja Manajemen dan Pelaporan Pembangunan
- SLB : Sekolah Luar Biasa
- SMILe : Sistem Monitoring dan Evaluasi Laporan
- SPM : Standar Pelayanan Minimal
- TNA : *Training Needs Analysis*
- TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka

- **TPPO** : Tindak Pidana Perdagangan Orang
- **Reforma Agraria** : Tanah Objek Reforma Agraria
- **TOT** : *Training of Trainers*
- **UKM** : Usaha Kecil dan Menengah
- **UMK** : Upah Minimum Kabupaten/Kota
- **UMKM** : Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- **UMI** : Pembiayaan Ultra Mikro
- **UPT** : Unit Pelaksana Teknis
- **UUD 1945** : Undang-Undang Dasar 1945
- **WASH** : *Water, Sanitation, and Hygiene*
- **YESS** : *Youth Entrepreneurship and Employment Support Services*

Daftar Isi

Daftar Singkatan	i
Daftar Isi	iv
Bab 1: Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Kajian Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin & Rentan untuk Kemandirian Ekonomi	2
1.1.1 Konsep Pemberdayaan Masyarakat	3
1.1.2 Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Rentan	3
1.2 Tinjauan Pustaka: Pendekatan dan Model Intervensi Pemberdayaan Masyarakat	5
1.3 Kerangka Kebijakan Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin & Rentan untuk Kemandirian Ekonomi	14
1.3.1 Kebijakan Nasional	14
1.3.2 Program Prioritas	15
1.4 Metode Kajian Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin & Rentan untuk Kemandirian Ekonomi	18
1.4.1 Tujuan Kajian	18
1.4.2 Lingkup & Limitasi Kajian	18
1.4.3 Pertanyaan Kajian	19
1.4.4 Metode Kajian	19
Bab 2: Temuan Kajian dan Hasil Analisis	20
2.1 Temuan Kajian	21
2.1.1 Gambaran Umum: Program Pemerintah	21
2.1.2 Gambaran Umum: Non Pemerintah	50
2.2 Hasil Analisis	55
Bab 3: Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin & Rentan untuk Kemandirian Ekonomi	64
3.1 Prinsip-Prinsip dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin & Rentan untuk Kemandirian Ekonomi	65
3.2 Kerangka Kerja Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin & Rentan untuk Kemandirian Ekonomi	66

Daftar Isi

3.3 Tahapan dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin & Rentan untuk Kemandirian Ekonomi	70
3.3.1 Tahapan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat	70
3.3.2 Tahap Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Rentan untuk Kemandirian Ekonomi	71
3.3.3 Tahap Asesmen Program Pemberdayaan Masyarakat	83
3.3.4 Tahap Persiapan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Rentan untuk Kemandirian Ekonomi	89
3.3.5 Tahap Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Rentan untuk Kemandirian Ekonomi	97
3.3.6 Tahap Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin & Rentan untuk Kemandirian Ekonomi	110
3.3.7 Tahap Graduasi Peserta dan Strategi Keberlanjutan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Rentan	119
3.3.8 Konektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat dengan lima program prioritas pemerintah.....	125
3.4 Panduan Program Pemberdayaan untuk Masyarakat Miskin & Rentan	128

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Kajian Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin & Rentan untuk Kemandirian Ekonomi

Indonesia terus berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, namun tantangan ketimpangan sosial masih menjadi perhatian utama. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia terus menurun. Pada September 2024, angka kemiskinan mencapai rekor terendah sepanjang sejarah, yaitu 8,57% dari total populasi, atau sekitar 24,06 juta orang. Angka ini menurun signifikan dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 9,03%, dan juga lebih rendah dari Maret 2023 yang mencapai 9,36% (BPS, 2024). Namun, pembangunan masih menghadapi tantangan lain, seperti pengangguran, kesetaraan gender, dan ketimpangan akses:



Tingkat pengangguran terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2024 adalah 4,82%, menurun dari 5,45% pada Februari 2023. Namun, perlu diperhatikan bahwa tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi masih relatif tinggi, yaitu 8,6%. Sehingga, ada ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kebutuhan pasar kerja. (BPS, 2024).



Performa Indeks Pembangunan Manusia yang Perlu Ditingkatkan

Ketimpangan juga terlihat dalam akses terhadap pendidikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada 2023 berada di angka 72,8, dengan anak-anak di perdesaan memiliki peluang lebih kecil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA dibandingkan anak-anak di perkotaan (UNDP, 2023). Hanya sekitar 60% anak-anak di perdesaan yang melanjutkan ke SMA, dibandingkan dengan 85% di perkotaan.



Pentingnya Pemerataan Kesehatan

Dalam aspek kesehatan, meskipun cakupan BPJS Kesehatan telah meluas, terdapat sekitar 20% masyarakat yang masih kesulitan mengakses layanan kesehatan berkualitas, terutama di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Angka tengkes (*stunting*) pada anak balita, salah satu indikator penting kesehatan masyarakat, masih berada di level 21,5% pada 2023 (Kemenkes, 2023).



Ketimpangan Gender

Selain itu, ketimpangan gender juga menjadi tantangan besar. Indeks Ketimpangan Gender (GII) Indonesia tercatat di angka 0,451 pada 2023, dengan partisipasi perempuan dalam pasar kerja hanya mencapai 54,6%, jauh di bawah laki-laki yang mencapai 82% (UNDP, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi hambatan struktural untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi.



Ketimpangan Regional

Ketimpangan regional semakin memperburuk situasi. Daerah perkotaan menyumbang 80% dari PDB nasional, sedangkan daerah perdesaan masih tertinggal, baik dari segi infrastruktur maupun peluang ekonomi. Wilayah Indonesia Timur, seperti Maluku dan Papua, mencatat angka kemiskinan di atas 20%, hampir dua kali lipat dari rata-rata nasional (BPS, 2024).

Tantangan-tantangan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih terintegrasi dan berbasis data dalam mengatasi ketimpangan sosial dan mewujudkan pembangunan yang inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia.

1.1.1 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) merupakan proses yang berfokus pada penguatan kapasitas individu dan kelompok dalam masyarakat agar mereka mampu mengontrol dan mengelola sumber daya, serta berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka (Suharto, 2012). Konsep ini menekankan kemandirian, partisipasi, dan kesadaran kritis masyarakat dalam mengatasi permasalahan dan mencapai tujuan bersama (Freire, 1970).

Perbedaan dengan Konsep Pembangunan dan Ketahanan

Meskipun saling berkaitan, pemberdayaan masyarakat memiliki perbedaan dengan konsep pembangunan dan ketahanan:

- **Pembangunan Masyarakat:** Berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan infrastruktur (Todaro & Smith, 2015). Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu **strategi** dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
- **Ketahanan Masyarakat (*Community Resilience*):** Kemampuan individu atau komunitas untuk beradaptasi dan bangkit kembali dari guncangan dan tekanan (Adger, 2000). Pemberdayaan masyarakat berkontribusi pada peningkatan ketahanan karena masyarakat yang berdaya memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi perubahan dan tantangan.

Fokus Riset ini: Pemberdayaan Masyarakat untuk Kemandirian Ekonomi

Riset ini secara khusus akan mengeksplorasi konsep "**Pemberdayaan Masyarakat**" dengan fokus pada kemandirian ekonomi. Melalui pemberdayaan ini, masyarakat miskin dan rentan diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam mengakses peluang ekonomi, mengembangkan usaha, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup.

Dengan demikian, kajian ini akan mengidentifikasi model pemberdayaan masyarakat yang efektif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat miskin dan rentan, dengan memperhatikan faktor-faktor pendukung dan penghambat yang ada.

1.1.2 Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Rentan

Pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan merupakan prioritas utama dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya ini menjadi sangat penting untuk mengurangi ketimpangan, meningkatkan kualitas hidup, dan memastikan semua lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat dari pembangunan secara merata. Berikut adalah konteks kebijakan nasional dan komitmen internasional yang mendukung agenda pemberdayaan masyarakat:

Konteks Kebijakan Nasional

- **Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029**

Penyusunan RPJMN 2025-2029 akan didasarkan pada pendekatan teknokratik yang kuat, dengan memanfaatkan data dan analisis yang akurat untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan efisien. Pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan akan menjadi salah satu fokus utama dalam rancangan teknokratik ini, dengan penekanan pada:

 - **Pengembangan Indikator Kinerja Utama (IKU)** yang terukur dan relevan untuk memantau kemajuan pemberdayaan masyarakat secara berkala.
 - **Penggunaan Sistem Informasi Geografis (SIG)** untuk memetakan kantong-kantong kemiskinan dan kerentanan, sehingga intervensi program dapat lebih tepat sasaran.

Suharto, E. (2012). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Herder and Herder.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development*. Boston: Addison-Wesley.

Adger, W. N. (2000). *Social and Ecological Resilience: Are They Related?* *Progress in Human Geography*, 24(3), 347-364.

- **Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)** untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dan rentan terhadap informasi, layanan publik, dan peluang ekonomi.
- **Koordinasi Lintas Sektor** yang lebih baik antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memastikan program pemberdayaan terintegrasi dan saling mendukung.
- **Evaluasi Program** yang ketat dan transparan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan program, serta memberikan masukan bagi perbaikan kebijakan di masa depan.
- **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024**
RPJMN 2020–2024 menetapkan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Pemberdayaan masyarakat dipandang sebagai strategi kunci untuk menciptakan masyarakat yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Dalam dokumen RPJMN, terdapat fokus pada pemberdayaan kelompok-kelompok rentan, termasuk perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas, agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan. (Bappenas, 2020)
- **Visi Indonesia 2045**
Visi Indonesia 2045 mencita-citakan Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Dalam visi ini, pemberdayaan masyarakat menjadi pondasi penting untuk mencapai tujuan nasional. Masyarakat yang diberdayakan diharapkan mampu mengatasi tantangan sosial-ekonomi, berkontribusi pada pertumbuhan inklusif, dan menikmati hasil pembangunan secara merata (Kementerian PPN/Bappenas, 2019).
- **Kebijakan Desa dan Kawasan Perdesaan**
Pemerintah juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014. Pengelolaan Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam merancang dan melaksanakan program yang relevan dengan kebutuhan lokal.

Komitmen Internasional

1. **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)**
Indonesia berkomitmen untuk mencapai agenda global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang menjadi panduan bagi negara-negara di dunia. Pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan terkait erat dengan beberapa tujuan utama SDGs, antara lain:
 - **Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan**
Berkomitmen untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun, khususnya di kalangan masyarakat miskin ekstrem.
 - **Tujuan 5: Kesetaraan Gender**
Memberdayakan perempuan dan anak perempuan agar dapat mengambil peran aktif dalam pembangunan, sekaligus menghapus segala bentuk diskriminasi gender.
 - **Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi**
Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan menyediakan kesempatan kerja yang layak bagi semua, termasuk kelompok rentan.
 - **Tujuan 10: Berkurangnya Ketimpangan**
Mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi baik di dalam negeri maupun antarnegara, khususnya untuk masyarakat miskin dan rentan (United Nations, 2015).
2. **Deklarasi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan**
Dalam deklarasi ini, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pilar untuk menciptakan dunia yang lebih inklusif, sejahtera, dan berkelanjutan. Komitmen Indonesia dalam deklarasi ini diperkuat melalui program-program nasional yang sejalan dengan prinsip-prinsip global.

Bappenas. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

Kementerian PPN/Bappenas. (2019). *Visi Indonesia 2045*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: United Nations.

1.2 Tinjauan Pustaka: Pendekatan dan Model Intervensi Pemberdayaan Masyarakat

Subbab ini akan menjelaskan kerangka konseptual yang mendasari pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan. Pendekatan yang tepat dan terstandar diperlukan untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan tidak hanya relevan dengan kebutuhan masyarakat, tetapi juga berkelanjutan dan berdampak nyata. Pembahasan dalam subbab ini mencakup tiga elemen penting, yaitu konsep pendekatan pemberdayaan masyarakat yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat, model intervensi yang sistematis dan adaptif terhadap berbagai konteks, serta elemen-elemen kunci yang menjadi fondasi keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Pemahaman menyeluruh akan elemen-elemen ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyusun program yang inklusif, transparan, dan efektif.

Pendekatan

Model Intervensi

Pendekatan dalam Pemberdayaan Masyarakat

Dalam upaya memberdayakan masyarakat, pemilihan pendekatan yang tepat merupakan langkah krusial yang akan menentukan arah dan efektivitas program. Terdapat empat pendekatan pemberdayaan masyarakat, yaitu pendekatan berbasis kebutuhan, pendekatan berbasis hak, pendekatan *sustainable livelihoods*, dan pendekatan *appreciative inquiry*.

Perlu diingat bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat sering kali bersifat fleksibel dan tidak selalu linear. Implementasi di lapangan sangat bergantung pada dinamika dan karakteristik unik setiap komunitas. Melalui pemahaman yang komprehensif terhadap pendekatan pemberdayaan masyarakat, diharapkan program ini dapat dirancang dan dilaksanakan secara lebih tepat sasaran dan memberikan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Pendekatan Berbasis Kebutuhan

Target sasaran: Masyarakat miskin, rentan, dan terpinggirkan.

Kondisi: Masyarakat memiliki kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan (World Bank, 2020)

Pendekatan Berbasis Hak

Target sasaran: Kelompok rentan terhadap diskriminasi dan pelanggaran hak (perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat)

Kondisi: Terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakadilan sosial di masyarakat (Cornwall, A, 2004)

Pendekatan *Sustainable Livelihoods*

Target sasaran: Seluruh anggota masyarakat, dengan penekanan pada kelompok miskin & rentan.

Kondisi: Masyarakat memiliki potensi dan sumber daya yang belum dimanfaatkan secara optimal (DFID, 1999)

Pendekatan *Appreciative Inquiry*

Target sasaran: Seluruh anggota masyarakat yang berpartisipasi aktif.

Kondisi: Masyarakat memiliki pengalaman positif dan praktik baik yang dapat dijadikan modal untuk perubahan (Whitney, D, 2010)

World Bank. (2000). *Attacking poverty: World Development Report 2000/2001*. Oxford University Press.

Cornwall, A., & Nyamu-Musembi, C. (2004). Putting the 'rights-based approach' to development into perspective. *Development in Practice*, 14(3), 357-371.

DFID. (1999). *Sustainable livelihoods guidance sheets*. Department for International Development.

Whitney, D., & Trosten-Bloom, A. (2010). *The power of appreciative inquiry: A practical guide to positive change*. Berrett-Koehler Publishers.

Pendekatan Berbasis Kebutuhan (*Needs-Based Approach*)

Pendekatan berbasis kebutuhan berfokus pada identifikasi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Berdasarkan analisis kebutuhan (*needs assessment*), pendekatan ini mengasumsikan bahwa masyarakat memiliki kekurangan yang perlu diatasi melalui intervensi eksternal dan program yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Kekuatan (*Strength*)

- Memberikan dampak langsung dengan memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat.
- Keberhasilan dapat diukur melalui indikator spesifik, seperti peningkatan akses pangan atau layanan kesehatan.
- Pendekatan ini cenderung mendapatkan dukungan luas dari donor dan pemerintah karena berfokus pada kebutuhan nyata.

Kelemahan (*Weakness*)

- Berpotensi menciptakan ketergantungan masyarakat pada bantuan eksternal.
- Masyarakat cenderung pasif karena hanya berperan sebagai penerima manfaat, bukan sebagai pelaku perubahan.
- Berisiko mengabaikan kebutuhan jangka panjang atau solusi berkelanjutan.

Peluang (*Opportunities*)

- Banyak donor bersedia mendanai program yang berfokus pada kebutuhan dasar.
- Memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan swasta untuk menyelesaikan masalah nyata.
- Program yang berhasil memenuhi kebutuhan dasar dapat meningkatkan dukungan dari masyarakat dan mitra.

Ancaman (*Threats*)

- Pendekatan ini tidak selalu mendorong pembangunan kapasitas masyarakat untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri.
- Ketergantungan pada bantuan dapat menghambat upaya untuk mendorong kemandirian masyarakat.

Pendekatan Berbasis Hak (*Rights-Based Approach*)

Kekuatan (*Strength*)

- Dapat menjadi dasar untuk mendorong kebijakan publik yang lebih adil dan inklusif.
- Membuka peluang kolaborasi dengan organisasi hak asasi manusia, LSM, dan lembaga internasional.
- Perubahan yang dihasilkan cenderung berkelanjutan karena berakar pada keadilan struktural.

Kelemahan (*Weakness*)

- Membutuhkan perubahan sistemik dan komitmen yang kuat, yang sering kali sulit dicapai.
- Perbedaan interpretasi hak dapat memicu konflik antarkomunitas atau dengan pihak berwenang.
- Proses advokasi dan perubahan kebijakan memerlukan waktu serta sumber daya yang signifikan.

Peluang (*Opportunities*)

- Dapat menjadi dasar untuk mendorong kebijakan publik yang lebih adil dan inklusif.
- Membuka peluang kolaborasi dengan organisasi hak asasi manusia, LSM, dan lembaga internasional.
- Perubahan yang dihasilkan cenderung berkelanjutan karena berakar pada keadilan struktural.

Ancaman (*Threats*)

- Pihak yang berkewajiban sering kali enggan memenuhi tanggung jawab mereka, terutama jika memerlukan alokasi sumber daya besar.
- Dalam masyarakat dengan budaya hierarkis atau ketimpangan sosial yang tajam, penerapan pendekatan ini bisa sulit diterima.
- Isu hak asasi manusia sering kali menjadi subjek politisasi yang dapat menghambat pencapaian tujuan program.

Pendekatan *Sustainable Livelihoods*

Pendekatan *Sustainable Livelihoods* bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara holistik, serta menitikberatkan pada penguatan aset dan kapasitas masyarakat untuk mencapai kesejahteraan jangka panjang.

Kekuatan (*Strength*)

- Mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memahami kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.
- Berfokus pada pengembangan aset masyarakat seperti keterampilan, sumber daya alam, dan jaringan sosial untuk memastikan dampak yang tahan lama.

Kelemahan (*Weakness*)

- Membutuhkan analisis yang mendalam terhadap konteks lokal, termasuk memahami aset, kerentanan, dan strategi penghidupan masyarakat.
- Proses pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas memerlukan waktu serta dukungan jangka panjang.

Peluang (*Opportunities*)

- Dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, pendekatan ini relevan untuk membantu masyarakat beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim.
- Mengurangi kerentanan masyarakat terhadap guncangan ekonomi atau lingkungan melalui penguatan aset mereka.

Ancaman (*Threats*)

- Ketidakstabilan Dukungan: Keterbatasan dukungan politik atau finansial dari pihak eksternal dapat menghambat keberlanjutan program.
- Resistensi Perubahan: Dalam beberapa kasus, masyarakat mungkin enggan mengadopsi pendekatan baru yang berbeda dari praktik

Pendekatan *Appreciative Inquiry*

Pendekatan *Appreciative Inquiry* (AI) bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan potensi positif yang sudah ada dalam masyarakat. Alih-alih berfokus pada masalah, pendekatan ini menitikberatkan pada kekuatan, aset, dan keberhasilan yang telah dicapai. Dengan berfokus pada hal-hal positif, masyarakat didorong untuk terlibat aktif dalam menciptakan solusi inovatif yang sesuai dengan konteks lokal, sekaligus mencapai tujuan bersama.

Kekuatan (*Strength*)

- Membantu masyarakat mengenali potensi dan aset yang mereka miliki, sehingga menumbuhkan rasa percaya diri dan kemandirian.
- Dengan menitikberatkan pada keberhasilan dan potensi, pendekatan ini menciptakan energi positif dan motivasi di antara anggota masyarakat.

Kelemahan (*Weakness*)

- Proses *Appreciative Inquiry* memerlukan fasilitator yang terampil untuk membantu masyarakat menggali dan mengartikulasikan potensi mereka.
- Pendekatan ini dapat mengabaikan tantangan atau masalah struktural jika tidak diimbangi dengan pendekatan lain.

Peluang (*Opportunities*)

- Meningkatkan rasa kebersamaan dan kerja sama di antara anggota masyarakat karena fokusnya pada tujuan bersama.
- Dapat diintegrasikan dengan berbagai pendekatan lain untuk menciptakan program pembangunan yang lebih komprehensif.

Ancaman (*Threats*)

- Tanpa fasilitator yang kompeten, proses pemberdayaan masyarakat dapat berjalan tidak efektif atau gagal menggali potensi yang ada.
- Dalam lingkungan dengan tantangan struktural besar (ketimpangan sosial atau regulasi yang tidak mendukung), pendekatan ini mungkin memerlukan dukungan tambahan untuk mencapai dampak yang nyata.

Model Intervensi dalam Pemberdayaan Masyarakat

Model intervensi dalam konteks pemberdayaan masyarakat merujuk pada cara atau metode yang digunakan untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat. Model intervensi ini pada dasarnya merupakan serangkaian aktivitas terstruktur yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, agar mampu mengatasi permasalahan, mengelola sumber daya, dan mencapai tujuan mereka secara mandiri.



Peningkatan Akses

Peningkatan akses modal merupakan model intervensi strategis dalam pemberdayaan masyarakat yang dirancang untuk menghilangkan hambatan struktural dan menciptakan peluang yang lebih luas bagi masyarakat miskin dan rentan untuk mengakses sumber daya dan jejaring krusial.

01. Peningkatan Akses Modal

Model ini bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat dalam memperoleh sumber pendanaan dan aset produktif yang dapat digunakan untuk memulai atau mengembangkan usaha serta mengatasi hambatan modal.

Pemberian Langsung

Pemberian langsung permodalan baik dalam bentuk uang maupun alat produksi untuk membantu perkembangan usaha.

Jejaring Permodalan

Fokus pada akses ke komunitas, mitra, atau jaringan strategis yang membuka peluang untuk mendapatkan pendanaan.

Fasilitasi

Dana dari lembaga keuangan seperti bank, koperasi, atau lembaga mikrofinansial.

Pendampingan Administrasi

Bantuan penyusunan proposal bisnis, pengelolaan dokumen administrasi, serta pembuatan MoU, dalam proses pengajuan modal secara formal.

Contoh-Contoh Model Produktif

 **Modal Usaha**
Memulai atau mengembangkan usaha kecil dan menengah.

 **Investasi**
Menabung atau berinvestasi dalam aset produktif, seperti ternak atau properti.

Contoh-Contoh Aset Produktif

 **Peralatan Produksi**
Memberikan mesin yang dapat meningkatkan efisiensi dan hasil produksi.

 **Ternak**
Memberikan ternak produktif (sapi, kambing, atau ayam) untuk sumber pendapatan.

 **Lahan Pertanian**
Memberikan lahan pertanian produktif untuk meningkatkan ketahanan pangan.

02. Peningkatan Akses Pasar

Model ini bertujuan untuk membantu masyarakat terhubung dengan pasar yang lebih luas dan berkelanjutan yang mencakup pelatihan pemasaran, partisipasi dalam bazar atau pameran, fasilitasi kemitraan dengan pelaku usaha, dan pembimbingan dalam menggunakan *platform* digital seperti *e-commerce* atau media sosial untuk memperluas jangkauan produk mereka.



Pengembangan Kemitraan dengan Pembeli dan Distributor

Menghubungkan kelompok masyarakat atau UMKM dengan pembeli potensial, distributor, atau retail modern untuk memperluas jaringan pemasaran produk.



Penyelenggaraan Bazar atau Pameran Produk Lokal

Mengadakan acara seperti bazar, pameran, atau pameran dagang (*expo*) yang memungkinkan komunitas untuk mempromosikan dan menjual produk mereka secara langsung kepada konsumen.



Pelatihan dan Digitalisasi Pemasaran

Memberikan pelatihan tentang pemasaran digital, seperti penggunaan *platform e-commerce*, media sosial, dan teknik pemasaran lainnya guna menjangkau pasar yang lebih luas.

Pasar lokal (tradisional dan modern)

Pasar regional dan nasional.

Pasar ekspor (jika memungkinkan)

Pengembangan Keterampilan

Model ini berfokus pada peningkatan kemampuan individu, kelompok, dan organisasi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengelola program pembangunan. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah, serta mengelola sumber daya secara efektif. Pengembangan kapasitas mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan pengetahuan dan keterampilan, penguatan kelembagaan, hingga peningkatan kesadaran kritis dan partisipasi masyarakat.

01. Pengembangan Keterampilan Kerja

Model ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang semakin dinamis.



Skilling

Memberikan keterampilan kepada individu yang belum memiliki keterampilan atau memiliki keterampilan terbatas.

Sasaran: Pengangguran, lulusan sekolah yang belum bekerja, atau masyarakat yang ingin meningkatkan peluang kerjanya.
Contoh: Pelatihan menjahit, pelatihan teknisi komputer, pelatihan tata boga, pelatihan bahasa asing, dan lain-lain.



Upskilling

Meningkatkan keterampilan yang sudah dimiliki agar lebih relevan dengan perkembangan teknologi dan industri.

Sasaran: Pekerja yang ingin meningkatkan kinerja, mengembangkan karier, atau beradaptasi dengan perubahan di tempat kerja.
Contoh: Pelatihan perangkat lunak (*software*) terbaru, pelatihan manajemen, pelatihan kepemimpinan, lokakarya (*workshop*) peningkatan keterampilan komunikasi, dan lain-lain.



Reskilling

Memberikan keterampilan baru kepada individu yang kehilangan pekerjaan atau ingin beralih profesi.

Sasaran: Pekerja yang terkena PHK, pekerja di sektor industri yang mengalami kemunduran, atau individu yang ingin beralih ke profesi yang lebih menjanjikan.
Contoh: Pelatihan pemasaran digital bagi pekerja retail, pelatihan pemrograman (*programming*) bagi pekerja manufaktur, dan lain-lain.

02. Keterampilan Wirausaha

Model ini bertujuan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan membekali individu dengan pengetahuan dan keterampilan dalam memulai dan mengembangkan usaha.



Pelatihan Motivasi

Menumbuhkan minat, semangat, dan rasa percaya diri untuk berwirausaha. Pelatihan ini berfokus pada pembentukan pola pikir dan sikap yang positif terhadap kewirausahaan.



Pelatihan Manajemen

Memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar tentang manajemen usaha bagi calon wirausahawan atau wirausahawan pemula.



Inkubasi Bisnis

Memberikan pendampingan intensif dan fasilitas bagi wirausahawan pemula agar dapat mengembangkan usaha dan mencapai kemandirian.

03. Pendidikan Kritis

Model ini menekankan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, analitis, serta kesadaran sosial dan politik. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang dapat mengidentifikasi masalah, mencari solusi, dan memperjuangkan hak-hak mereka.



Pengembangan Kemampuan Berpikir Kritis dan Analitis

Masyarakat dilatih untuk tidak mudah menerima informasi dan situasi apa adanya.



Peningkatan Kesadaran (Partisipasi) Sosial dan Politik

Masyarakat diajak untuk memahami kondisi sosial dan politik di sekitar mereka, serta peran mereka dalam menciptakan perubahan positif.

Pendampingan

Pendampingan adalah model intervensi pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan dukungan langsung dan berkelanjutan kepada masyarakat, baik secara teknis, sosial, maupun manajerial. Model ini dirancang untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga didampingi dalam mengimplementasikan keterampilan dan perubahan yang dibutuhkan untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan.

01. Pendampingan Teknis

Pendampingan teknis bertujuan memberikan bimbingan yang spesifik terkait pengembangan keterampilan atau usaha. Proses ini mencakup pelatihan, penerapan teknologi, atau pembinaan teknis lainnya yang membantu masyarakat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil kerja mereka



Demonstrasi

Metode pembelajaran yang menampilkan cara melakukan sesuatu secara langsung, sehingga penerima manfaat dapat melihat langkah-langkah secara nyata.



Praktik

Penerapan langsung dari ilmu yang dipelajari selama pendampingan. Penerima manfaat dapat melatih kemampuannya dengan bimbingan pendamping, seperti memproduksi barang atau mencoba teknologi baru.



Peningkatan Kompetensi

Proses pendampingan berlangsung saat mentor memberikan panduan dan motivasi. Mentor membantu mengatasi tantangan teknis, memberikan wawasan berdasarkan pengalaman, serta mendorong pengembangan keterampilan dan kepercayaan diri.

02. Pendampingan Sosial

Pendampingan sosial berfokus pada memberikan dukungan emosional dan sosial bagi masyarakat serta membantu mereka membangun motivasi, kepercayaan diri, dan kesiapan untuk mengatasi hambatan psikologis atau sosial. Pendekatan ini mencakup sesi kelompok atau individu yang mendukung proses transformasi mental menuju kemandirian.



Konseling Individu

Memberikan dukungan emosional dan sosial secara personal untuk membantu individu mengatasi tantangan spesifik dalam hidup mereka, seperti trauma, rasa rendah diri, atau konflik interpersonal.



Kelompok Dukungan

Memfasilitasi pertemuan kelompok untuk berbagi pengalaman, membangun solidaritas, dan mendapatkan dukungan dari sesama. Kelompok ini juga bertindak sebagai ruang belajar untuk memecahkan masalah bersama.



Kunjungan Rumah atau Home Visit

Mengunjungi individu atau kelompok di lingkungan mereka untuk memberikan dukungan secara langsung dan lebih kontekstual. Metode ini bertujuan untuk membangun hubungan yang lebih dekat dan memahami situasi secara langsung.

03. Pendampingan Manajerial

Pendampingan manajerial dirancang untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola usaha, administrasi, dan keuangan secara efektif. Fokusnya adalah pada penguatan keterampilan perencanaan, pengelolaan sumber daya, dan pengambilan keputusan yang mengutamakan keberlanjutan aktivitas ekonomi.



Pelatihan Manajemen Dasar

Memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar tentang manajemen usaha bagi calon wirausaha atau wirausaha pemula.



Manajemen Keuangan

Mengajarkan pencatatan keuangan, pembuatan anggaran, analisis keuntungan dan kerugian, serta pengelolaan utang atau modal usaha.



Administrasi Usaha

Memberikan panduan dalam pengelolaan dokumen usaha, seperti pembuatan laporan keuangan sederhana, kontrak kerja, atau arsip legalitas usaha.

Studi Kasus Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Rentan

Program pemberdayaan masyarakat telah diimplementasikan di berbagai belahan dunia dengan berbagai pendekatan dan fokus. Mempelajari program-program sukses di negara lain dapat memberikan wawasan dan inspirasi untuk mengembangkan model pemberdayaan yang lebih efektif di Indonesia. Berikut adalah beberapa contoh program pemberdayaan masyarakat dari luar negeri yang dijadikan *benchmark study* dalam laporan ini:

Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) - Filipina

Target Sasaran

Keluarga berpenghasilan rendah di bawah garis kemiskinan, rumah tangga dengan anak-anak usia 0-18 tahun, perempuan hamil, dan lansia.

Tujuan

Mengurangi kemiskinan melalui bantuan tunai bersyarat dengan fokus pada kesehatan dan pendidikan (DSDW, 2024)

Capaian Program:

- Meningkatkan partisipasi sekolah anak-anak dari keluarga miskin sebesar 10% (Asian Development Bank, 2020).

Praktik Baik:

- Fokus pada kesehatan & pendidikan sebagai langkah dalam memutus rantai kemiskinan.
- Pentingnya *co-responsibility* untuk meningkatkan *ownership* dan kemandirian penerima manfaat.

Komponen Utama

- **Kesehatan dan Nutrisi:** Bantuan tunai diberikan dengan syarat keluarga memenuhi persyaratan kesehatan, seperti pemeriksaan kesehatan rutin untuk anak-anak dan ibu hamil.
- **Pendidikan:** Bantuan diberikan kepada keluarga yang memastikan anak-anak mereka bersekolah.
- **Co-responsibility:** Mendorong kemandirian dan partisipasi aktif penerima manfaat dalam program.

The One Village One Product (OVOP) - Jepang

Target Sasaran

Komunitas pedesaan dan produsen skala kecil.

Tujuan

Mengembangkan ekonomi regional berbasis produk unggulan lokal (Ishikawa, 2008).

Capaian Program:

- Menciptakan lebih dari 5.000 usaha kecil dan menengah di pedesaan Jepang (Ministry of Economy, Trade and Industry, Japan, 2019).

Praktik Baik:

- Pentingnya *local branding* dan pengembangan produk unggulan daerah.
- Pentingnya pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk.
- Pentingnya akses pasar untuk meningkatkan nilai jual dan revenue bagi produsen lokal.

Komponen Utama

- **Pengembangan Produk Lokal:** Identifikasi & pengembangan produk unik yang mencerminkan budaya dan sumber daya lokal.
- **Pengembangan Kapasitas dan Pelatihan:** Peningkatan keterampilan produksi, kontrol kualitas, dan pemasaran bagi produsen lokal.
- **Akses Pasar dan Promosi:** Menghubungkan produk lokal ke pasar yang lebih luas.

She Programme - India

Target Sasaran

Perempuan dari komunitas marjinal di India.

Tujuan

Memberdayakan perempuan melalui pendekatan holistik yang menggabungkan kesehatan, sanitasi, dan kewirausahaan.

Capaian Program:

- Melatih lebih dari 500.000 perempuan dalam keterampilan kewirausahaan dan vokasi (Government of India, 2021).

Praktik Baik:

- Pentingnya pendekatan holistik dalam pemberdayaan perempuan.
- Pentingnya women empowerment sebagai *agent of change* dalam masyarakat.
- Pentingnya *social entrepreneurship* sebagai *sustainable solution* untuk isu-isu sosial.

Komponen Utama

- **Sanitasi dan Kebersihan:** Meningkatkan praktik kebersihan dan akses ke fasilitas sanitasi.
- **Kesehatan:** Meningkatkan kesadaran tentang isu-isu kesehatan perempuan.
- **Pemberdayaan berbasis Kewirausahaan:** Memberikan pelatihan kewirausahaan dan pengembangan usaha terkait sanitasi dan kebersihan.

Sarvodaya Shramadana Movement - Sri Lanka

Target Sasaran

memberdayakan masyarakat lokal

Tujuan

Sarvodaya adalah gerakan pembangunan berbasis komunitas yang menekankan pada kemandirian, partisipasi, dan gotong royong dalam bidang pendidikan, pertanian, dan ekonomi lokal (Ariyaratne, 1994).

Capaian Program:

- Meningkatkan akses air bersih dan sanitasi bagi lebih dari 1,5 juta orang di Sri Lanka (Sarvodaya Organization, 2020).
- Mengembangkan lebih dari 15.000 komunitas mandiri dengan berbagai program ekonomi & sosial.

Praktik Baik:

- Pentingnya pendekatan holistik dalam pemberdayaan perempuan.
- Mendorong kemandirian masyarakat & mengurangi ketergantungan pada bantuan luar.
- Sarvodaya mengembangkan program-program ekonomi yang berbasis pada potensi dan sumber daya lokal, seperti pertanian berkelanjutan, kerajinan tangan, dan koperasi.

Komponen Utama

- **Program Pengembangan Desa Terpadu:** Mendorong pembangunan desa, dengan fokus infrastruktur, ekonomi lokal, dan kesejahteraan sosial.
- **Program Pendidikan Non-Formal:** Memberikan pendidikan non-formal kepada anak-anak putus sekolah dan perempuan.
- **Program Pertanian Berkelanjutan:** Mempromosikan praktik pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta memfasilitasi akses pasar bagi petani kecil.

1.3 Kerangka Kebijakan Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin & Rentan untuk Kemandirian Ekonomi

Pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan di Indonesia didasarkan pada kerangka kebijakan yang komprehensif, serta mencakup undang-undang, peraturan, dan program prioritas pemerintah. Kerangka ini bertujuan melindungi hak-hak kelompok rentan, meningkatkan akses terhadap layanan dasar, dan menciptakan peluang bagi mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

1.3.1 Kebijakan Nasional

- **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**
 UU ini memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa dalam pengelolaan sumber daya dan pembangunan berbasis masyarakat. Salah satu fokusnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan melalui pengelolaan dana desa untuk program pemberdayaan masyarakat (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2014).
- **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas**
 UU ini menjamin hak penyandang disabilitas, termasuk aksesibilitas layanan dasar, pendidikan inklusif, dan pemberdayaan ekonomi, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam masyarakat (Kementerian Sosial RI, 2016).
- **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**
 UU ini melindungi hak-hak seluruh warga negara, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan hamil, fakir miskin, dan lansia (Komnas HAM, 1999).
- **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana**
 UU ini memastikan perlindungan khusus bagi kelompok rentan dalam situasi bencana, termasuk melalui pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas (BNPB, 2007).
- **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik**
 UU ini mengatur hak masyarakat, termasuk kelompok rentan, untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan setara (Ombudsman RI, 2009).
- **Peraturan Menteri Hukum & HAM Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM**
 Peraturan ini menegaskan pentingnya pelayanan publik yang ramah kelompok rentan dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia (Kemenkumham, 2022).
- **Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia**
 Perpres ini memastikan bahwa data yang terintegrasi dan valid menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, termasuk program ekonomi untuk masyarakat miskin dan rentan. (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2019).
- **Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)**
 Peraturan ini mendukung pencapaian SDGs, termasuk penghapusan kemiskinan (Tujuan 1), pengurangan ketimpangan (Tujuan 10), dan penciptaan pekerjaan layak (Tujuan 8). Kebijakan ini mendorong sinergi lintas sektor untuk memberdayakan kelompok miskin dan rentan melalui pendekatan inklusif (Kementerian PPN/Bappenas, 2017).

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. (2014). *Undang-Undang Desa*.

Kementerian Sosial RI. (2023). *Program Keluarga Harapan*.

Komnas HAM. (1999). *Hak Asasi Manusia di Indonesia*.

United Nations Development Programme. (2022). *Evaluating Inclusive Development Programmes*.

- **Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045**
UU ini menjadi acuan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional, termasuk pemberdayaan masyarakat. RPJPN 2025-2045 menekankan pada pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing, dengan memperhatikan keadilan gender dan inklusi sosial.
- **Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial**
RPJPN 2025-2045 mengamanatkan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial sebagai pilar penting dalam pembangunan nasional. Hal ini berarti bahwa semua kebijakan dan program pembangunan, termasuk program pemberdayaan masyarakat, harus memperhatikan kebutuhan dan aspirasi perempuan, laki-laki, dan kelompok rentan lainnya secara setara dan inklusif.

1.3.2 Program Prioritas Pemerintah

Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mendukung pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan, antara lain:

- **Swasembada Pangan**

Program Swasembada Pangan bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas petani kecil, menciptakan lapangan kerja di sektor pertanian, dan memperkuat kemandirian pangan nasional (Kementerian Pertanian, 2020).

Komponen Program:

- **Diversifikasi Pangan:** Pengembangan pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada beras, seperti pengembangan ubi kayu, jagung, dan sorgum.
- **Peningkatan Infrastruktur Pertanian:** Penyediaan irigasi, jalan usaha tani, dan teknologi pascapanen.
- **Subsidi dan Kredit Usaha Rakyat (KUR):** Petani kecil mendapatkan akses pembiayaan untuk modal usaha tani dengan bunga rendah.

- **Makan Bergizi Gratis**

Program ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan malnutrisi, khususnya tengkes (*stunting*), yang masih menjadi isu utama di Indonesia. Fokus utamanya adalah anak-anak usia dini dan ibu hamil di keluarga miskin (Kementerian Kesehatan, 2021).

Komponen Program:

- **Pemberian Pangan Tambahan (PPT):** Distribusi makanan bergizi di posyandu dan sekolah, seperti susu, telur, dan makanan berbasis lokal.
- **Peningkatan Kesadaran Gizi:** Edukasi kepada keluarga miskin mengenai pentingnya asupan gizi seimbang.
- **Integrasi dengan Layanan Kesehatan:** Program ini bersinergi dengan layanan kesehatan ibu dan anak untuk memastikan pemeriksaan rutin.

● Hilirisasi Sektor Industri

Program hilirisasi bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk domestik dengan mengolah bahan mentah menjadi produk jadi atau setengah jadi di dalam negeri (Kementerian Perindustrian, 2022).

Komponen Program:

- **Pengembangan Industri Berbasis Komunitas:** Memberikan pelatihan dan pendanaan bagi UMKM di bidang hilirisasi produk lokal, seperti kopi, kakao, dan kelapa sawit.
- **Ekspansi Pasar dan Teknologi:** Memberikan akses teknologi modern kepada pengusaha kecil untuk meningkatkan daya saing produk.
- **Kemitraan Industri:** Menghubungkan pelaku usaha kecil dengan perusahaan besar untuk mendukung rantai pasok.

4. Program Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Program ini bertujuan untuk menyediakan akses perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat miskin, khususnya di daerah perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan.

Komponen Program:

- **Subsidi Perumahan:** Pemberian subsidi uang muka dan bunga kredit rumah melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
- **Pembangunan Rusunawa:** Penyediaan hunian vertikal untuk keluarga miskin di kota-kota besar.
- **Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH):** Renovasi rumah di perdesaan agar lebih layak huni (Kementerian PUPR, 2021).

5. Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha

Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha adalah dua instrumen utama yang dirancang oleh pemerintah untuk memberikan bantuan sosial yang adaptif dan inklusif, serta dukungan ekonomi secara langsung kepada masyarakat miskin dan rentan. Kedua kartu ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan memberdayakan masyarakat.

Kartu Kesejahteraan

Kartu Kesejahteraan adalah upaya integrasi program perlindungan sosial yang komprehensif, mencakup berbagai program subsidi dan bantuan sosial dari berbagai sektor yang berbasis individu dan keluarga, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat sesuai kondisi dan sasaran program dengan pendekatan ketepatan sasaran melalui satu basis data terpadu, tata kelola dan pengendalian program lintas sektor yang terintegrasi, pemanfaatan teknologi layanan keuangan, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan penerima manfaat.

Komponen Program Kartu Kesejahteraan:

- **Program Keluarga Harapan (PKH):**
 - **Target:** Keluarga miskin dengan anak sekolah, ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas.
 - **Bentuk Bantuan:** Bantuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, & gizi keluarga.
 - **Dampak Sosial:** Meningkatkan angka partisipasi sekolah dan menurunkan prevalensi gizi buruk pada anak-anak.

- **Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT):**
 - **Target:** Keluarga miskin yang memenuhi kriteria.
 - **Bentuk Bantuan:** Bantuan uang yang disalurkan melalui kartu untuk membeli bahan pangan di e-warung atau toko yang bekerja sama.
 - **Dampak Sosial:** Membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
- **Subsidi Energi:**
 - **Target:** Rumah tangga miskin yang menggunakan listrik dan LPG.
 - **Bentuk Bantuan:** Potongan harga untuk tarif listrik dan pembelian LPG.
 - **Dampak Sosial:** Mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin untuk kebutuhan energi. (Kementerian Sosial, 2023)

Kartu Usaha

Kartu Usaha merupakan wujud dari strategi peningkatan pendapatan melalui peningkatan kemampuan bekerja dan berwirausaha. Program ini dirancang untuk memberikan solusi nyata dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menciptakan peluang kerja baru yang berkelanjutan. Secara spesifik, program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah wirausaha, menciptakan tenaga kerja mandiri, memperkuat daya saing usaha, serta mendorong pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan. Pelaksanaan program Kartu Usaha ini terbagi menjadi Kartu Usaha Afirmatif yang ditujukan bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan, serta Kartu Usaha Produktif yang ditujukan bagi masyarakat kelas menengah.

Komponen Program Kartu Usaha:

- **Pelatihan Vokasi:**
 - **Target:** Masyarakat miskin dan rentan yang ingin meningkatkan keterampilan kerja.
 - **Bentuk Bantuan:** Pelatihan keterampilan di berbagai bidang, seperti menjahit, memasak, dan perbaikan elektronik.
 - **Dampak Sosial:** Meningkatkan peluang kerja dan pendapatan masyarakat.
- **Pendampingan Usaha:**
 - **Target:** Wirausaha mikro dan kecil.
 - **Bentuk Bantuan:** Pelatihan manajemen usaha, pemasaran, dan akses pembiayaan.
 - **Dampak Sosial:** Meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha mikro dan kecil.
- **Kredit Usaha Rakyat (KUR):**
 - **Target:** Wirausaha mikro dan kecil yang membutuhkan modal usaha.
 - **Bentuk Bantuan:** Kredit dengan bunga rendah dan persyaratan yang mudah.
 - **Dampak Sosial:** Memperluas akses pembiayaan bagi wirausaha mikro dan kecil.

Sinergi Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha

Kedua kartu ini diharapkan dapat bersinergi untuk memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat miskin dan rentan. Kartu Kesejahteraan membantu memenuhi kebutuhan dasar, sementara Kartu Usaha memberikan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan melalui pelatihan dan dukungan usaha. Dengan demikian, kedua program ini diharapkan dapat mempercepat upaya pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

1.4 Metode Kajian Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin & Rentan untuk Kemandirian Ekonomi

Berangkat dari latar belakang dan landasan kebijakan yang telah diuraikan, kajian ini dirancang untuk menjawab kebutuhan akan analisis mendalam terkait program pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan di Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk menjembatani ketimpangan antara tujuan program, implementasi di lapangan, serta dampak yang dihasilkan. Melalui pendekatan kualitatif yang menyeluruh, kajian ini akan mengeksplorasi dinamika pemberdayaan masyarakat, mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan program, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang praktis dan aplikatif. Bagian berikut akan menjelaskan metode yang digunakan dalam kajian ini. Penting untuk ditegaskan bahwa kajian ini **BUKAN** merupakan evaluasi program. Temuan (*findings*) yang ditemukan dalam proses pengumpulan data ditujukan untuk merancang model pemberdayaan masyarakat, bukan untuk meninjau kinerja program. Kami memahami bahwa setiap program memiliki pertimbangan pemilihan dan strategi implementasi yang telah disesuaikan dengan sumber daya dan konteks lapangan.

1.4.1 Tujuan Kajian

1. **Menganalisis Efektivitas Program:** Mengukur sejauh mana program pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan berhasil meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi.
2. **Mengidentifikasi Faktor Keberhasilan:** Mengkaji elemen-elemen kunci yang mendukung implementasi program, seperti peran kepemimpinan lokal, kolaborasi antara para pemangku kepentingan, dan akses terhadap teknologi.
3. **Menyusun Model Pemberdayaan Masyarakat:** Merancang model pemberdayaan masyarakat yang aplikatif dan berkelanjutan berdasarkan temuan penelitian.

1.4.2 Lingkup & Limitasi Kajian

- **Wilayah geografis:** Kajian ini difokuskan pada wilayah-wilayah di Indonesia dengan tingkat kemiskinan dan kerentanan sosial-ekonomi yang tinggi (kantong kemiskinan). Wilayah-wilayah tersebut dipilih berdasarkan ketersediaan program pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan di daerah kunjungan serta merepresentasikan wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia. Pemilihan wilayah ini bertujuan untuk mendapatkan data yang representatif dan mengungkap dinamika pemberdayaan masyarakat di berbagai daerah serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program.
- **Kelompok Sasaran:** Kajian ini secara khusus melibatkan program pemberdayaan masyarakat miskin, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya yang menjadi target utama. Fokus pada kelompok rentan bertujuan untuk memastikan bahwa program pemberdayaan masyarakat menjangkau mereka yang paling membutuhkan dan mengkaji bagaimana prinsip inklusivitas diterapkan di program pemberdayaan masyarakat.
- **Jenis Program:** Target program pemberdayaan masyarakat dalam kajian ini dipetakan berdasarkan pendekatan ekonomi dan nonekonomi. Pendekatan ekonomi berfokus pada peningkatan pendapatan, sedangkan pendekatan nonekonomi menitikberatkan pada aspek pendidikan, kesehatan, kesadaran sosial, serta pengembangan kapasitas mental dan spiritual. Selain itu, kajian ini juga mengidentifikasi model intervensi yang digunakan, seperti pelatihan, pendampingan, akses pasar, akses modal, dan berbagai pendekatan lain yang mendukung efektivitas program pemberdayaan masyarakat.

- **Dimensi Analisis:** Kajian ini mencakup analisis komprehensif terhadap program pemberdayaan masyarakat melalui empat dimensi utama, yaitu identifikasi program, yang bertujuan memahami tujuan, sasaran, dan desain program; implementasi, yang mengevaluasi proses pelaksanaan, mekanisme kerja, alokasi sumber daya, dan tantangan yang dihadapi; dampak sosial-ekonomi, yang menganalisis perubahan pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat setelah program dijalankan; serta strategi keberlanjutan, yang menilai langkah-langkah untuk memastikan kelangsungan program dalam jangka panjang.

1.4.3 Pertanyaan Kajian

Untuk memandu proses penelitian, kajian ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian berikut:

1. **Bagaimana efektivitas program pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi?** Pertanyaan ini mengarah pada pengukuran dampak program terhadap peningkatan pendapatan, akses terhadap layanan dasar, peningkatan kapasitas, dan perubahan sosial lainnya.
2. **Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat?** Pertanyaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan program, baik yang bersifat internal maupun eksternal.
3. **Bagaimana strategi terbaik untuk meningkatkan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat?** Pertanyaan ini mengungkap strategi yang efektif untuk memastikan bahwa program pemberdayaan masyarakat dapat terus berjalan dan memberikan manfaat dalam jangka panjang, meskipun dukungan eksternal telah berakhir.
4. **Model pemberdayaan masyarakat seperti apa yang paling relevan untuk diterapkan di Indonesia dengan memperhatikan konteks sosial, ekonomi, dan budaya lokal?** Pertanyaan ini mengarah pada perumusan model pemberdayaan masyarakat yang kontekstual, adaptif, dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keragaman dan dinamika masyarakat Indonesia.

1.4.4 Metode Kajian

Penelitian ini menggunakan metode **kualitatif dengan pendekatan partisipatif**, memadukan berbagai teknik untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai dinamika dan keberhasilan pemberdayaan masyarakat.



Tinjauan Literatur

- Mengkaji pengalaman dari program-program yang telah berjalan untuk mengidentifikasi faktor keberhasilan dan tantangan.
- Sumber data mencakup dokumen kebijakan, laporan pelaksanaan, dan publikasi akademik.



Participatory Rural Appraisal

- Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD): Melibatkan kementerian, lembaga, dan pelaksana program untuk menggali informasi mengenai desain program dan faktor-faktor keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.
- Wawancara Mendalam: Menggali wawasan dari pelaksana program, fasilitator atau pendamping program, tokoh masyarakat, dan pemimpin lokal untuk memahami dampak program di lapangan.
- Observasi Lapangan: Melakukan pengamatan langsung untuk mendapatkan gambaran konkret mengenai kondisi sosial dan dampak program.

BAB 2

Temuan Kajian dan Hasil Analisis

2.1 Temuan Kajian

Sebagai langkah awal untuk memahami efektivitas berbagai program pemberdayaan masyarakat, kami telah melakukan serangkaian kajian lapangan dan *Focus Group Discussion* (FGD) di empat provinsi di Indonesia, yaitu Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sumatera Utara, dan Papua Barat Daya. Kajian ini mencakup analisis mendalam terhadap 13 program pemberdayaan pemerintah dan 2 program pemberdayaan nonpemerintah yang telah dilaksanakan. Tujuannya adalah menggali wawasan terkait pendekatan, model intervensi, proses pelaksanaan, dan faktor-faktor pendukung keberhasilan masing-masing program. Temuan dari kajian ini akan disajikan secara terstruktur dalam Bab 2.2 untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai model pemberdayaan, cakupan wilayah, proses pelaksanaan, dan pendekatan yang digunakan.

Kajian Lapangan & FGD

Dilakukan di 4 provinsi: Jawa Barat, NTB, Sumatera Utara, dan Papua Barat Daya.

Analisis 15 Program

13 program pemerintah & 2 program non-pemerintah dievaluasi.

10 Instansi Pemerintah Terlibat

Lorem ipsum dolor sit amet

2.1.1 Gambaran Umum: Program Pemerintah

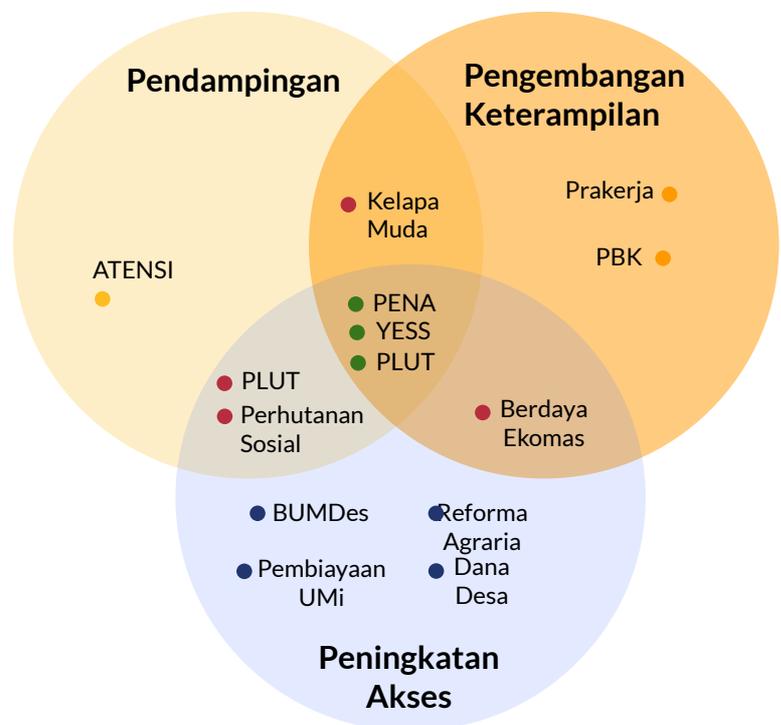
Model Intervensi

Seperti yang telah dibahas di bab sebelumnya, terdapat beberapa jenis model intervensi, mulai dari pemberian aset, peningkatan akses, pengembangan keterampilan, hingga pendampingan. Dalam realisasinya di lapangan, beberapa program pemberdayaan masyarakat tidak hanya memiliki satu model intervensi, tetapi bisa menggabungkan dua hingga tiga model intervensi.

Dari 15 program yang sudah dikaji, program yang menerapkan tiga model intervensi sekaligus adalah PENA. Program PENA menggunakan model intervensi pemberian aset modal, peningkatan kapasitas kewirausahaan, dan juga pendampingan manajerial.

Program lain yang juga menerapkan tiga model intervensi adalah YESS. Program ini memberikan pelatihan pembuatan proposal bisnis dan pengelolaan bisnis agrikultur. Program YESS juga memiliki pendamping yang berfokus pada pendampingan usaha dan juga penasihat keuangan (*financial advisor*) yang berfokus pada pendampingan keuangan. Selain itu, melalui peran *mobilizer* yang bertugas memotong rantai distribusi, program ini membantu para petani menghindari penjualan produk mereka kepada tengkulak, sehingga program YESS juga memiliki model intervensi peningkatan akses pasar.

Program yang memiliki dua model intervensi adalah Berdaya Ekomas, yang memberikan akses modal berupa kredit dengan bunga 0% dan pelatihan kewirausahaan. Selain itu, program PLUT juga memberikan pelatihan kewirausahaan dan pendampingan. Perhutanan Sosial Sementara itu, program lainnya hanya memiliki satu jenis model intervensi.

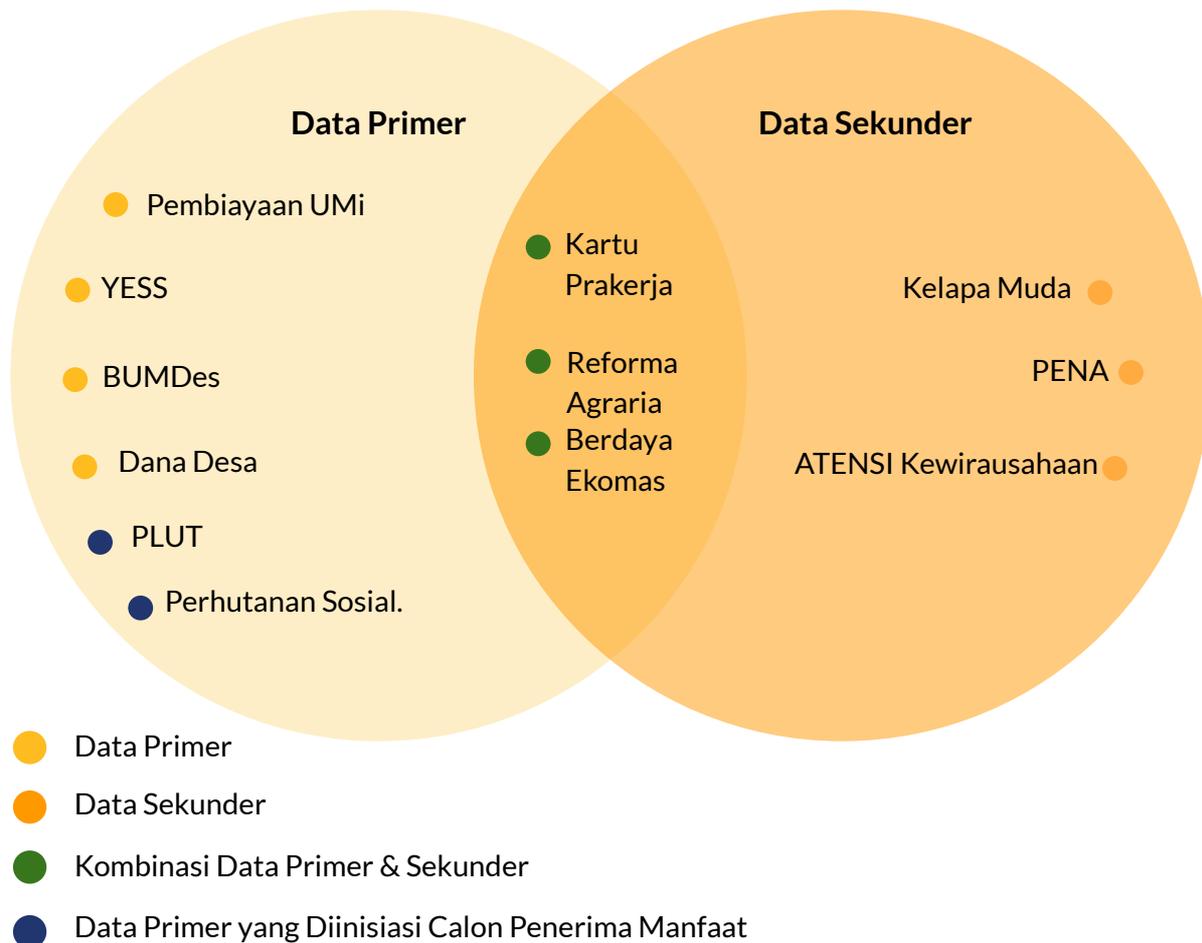


Asesmen

Pada umumnya proses asesmen dalam program pemberdayaan masyarakat dimulai dari data sekunder yang sudah dimiliki kementerian atau kedinasan. Dari 15 program pemberdayaan masyarakat, tujuh diantaranya yaitu PENA, ATENSI Kewirausahaan, Kelapa Muda, Reforma Agraria, Berdaya Ekomas, Kartu Prakerja, dan PLUT, menggunakan data sekunder dalam proses asesmennya. Namun, penggunaan data sekunder ini memiliki kelemahan, yaitu kurangnya akurasi data. Beberapa program, seperti Reforma Agraria, Berdaya Ekomas, dan Kartu Prakerja, melakukan verifikasi ulang dari data sekunder yang mereka terima.

Selain melalui data sekunder dan proses verifikasi, beberapa program pemberdayaan masyarakat melakukan asesmen berdasarkan permintaan dari calon penerima manfaat, misalnya PLUT dan Perhutanan Sosial. PLUT melakukan asesmen terhadap UMKM yang mengajukan permintaan untuk dibina. Sementara itu, Perhutanan Sosial melakukan asesmen kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan legalitas dalam akses pengelolaan hutan.

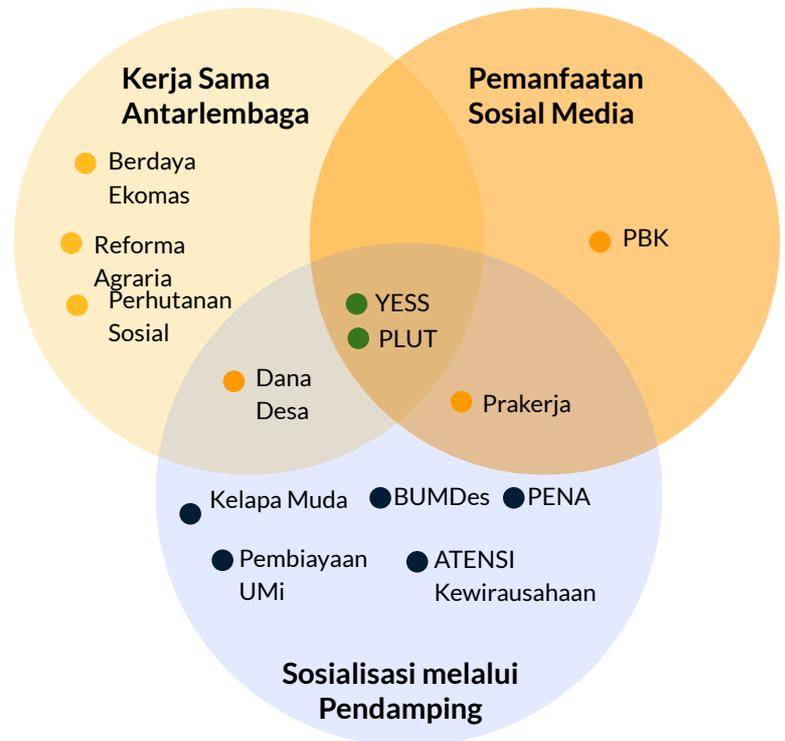
Beberapa program lain, seperti BUMDes, Dana Desa, Pembiayaan UMi, dan YESS, melibatkan pendamping dalam proses asesmennya. Dalam program-program ini, pendamping melakukan penilaian apakah calon penerima manfaat memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Dalam program Dana Desa dan BUMDes, asesmen dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa dengan menyesuaikan potensi masing-masing desa. Sementara itu, Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) menggunakan metode Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD), untuk menganalisis kebutuhan pelatihan kerja yang relevan dengan potensi dan kebutuhan lokal.



Persiapan

Pada tahap persiapan, sosialisasi program merupakan tahapan yang dinilai penting. Sosialisasi program pemberdayaan masyarakat menjadi langkah krusial dalam memastikan keberhasilan implementasi program sekaligus menjangkau target penerima manfaat yang tepat. Pendekatan sosialisasi yang digunakan beragam, disesuaikan dengan karakteristik program dan target penerima manfaat.

Beberapa program memanfaatkan media sosial sebagai kanal sosialisasi utama, seperti PBK, PLUT, dan YESS. Pendekatan ini dinilai efektif menjangkau generasi muda dan mereka yang melek teknologi. PBK dan PLUT aktif menggunakan *platform* media sosial populer seperti Instagram, Facebook, dan X untuk menyebarkan informasi program, sedangkan YESS mengintegrasikan media sosial dengan penyuluhan langsung dan kerja sama dengan lembaga lokal.



Pendamping lapangan memiliki peran penting dalam sosialisasi program, seperti yang dilakukan oleh YESS, Pembiayaan UMi, PENA dan Atensi Kewirausahaan. Para pendamping berinteraksi langsung dengan calon penerima manfaat, menyampaikan informasi detail program, dan membangun kepercayaan masyarakat. YESS, misalnya, menugaskan pendamping untuk mencari pemuda yang tertarik pada sektor pertanian, sedangkan Pembiayaan UMi melibatkan koperasi atau LKM dalam proses sosialisasi. PENA dan Atensi Kewirausahaan menekankan peran pendamping dalam melakukan asesmen dan menjangkau kelompok rentan.

Kerja sama dengan kedinasan setempat menjadi strategi sosialisasi yang umum digunakan oleh program seperti Reforma Agraria, Perhutanan Sosial, PLUT, Berdaya Ekomas dan Kelapa Muda. Koordinasi dengan dinas terkait, seperti dinas sosial, dinas pertanian, dan dinas koperasi, memungkinkan program menjangkau masyarakat melalui jaringan dan infrastruktur pemerintah daerah. Misalnya, Kelapa Muda melibatkan dinas perlindungan perempuan dan anak dalam proses sosialisasi, sementara YESS berkoordinasi dengan dinas pertanian. Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial melibatkan dinas terkait dan melakukan sosialisasi melalui musyawarah desa.

Mitra program juga dapat berperan dalam sosialisasi, seperti pada program Kartu Prakerja. *Platform* digital yang menjadi mitra Kartu Prakerja aktif melakukan sosialisasi dan menjangkau calon peserta melalui berbagai kanal.

Musyawarah desa menjadi forum sosialisasi yang efektif bagi program Dana Desa dan BUMDes. Sosialisasi melalui musyawarah desa memungkinkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan program.

Pelaksanaan

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat menekankan pentingnya kemitraan sebagai faktor kunci untuk menjalankan program secara efektif. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, program dapat memperluas jangkauan, memperkuat kapasitas, dan menciptakan dampak yang lebih berkelanjutan.

Beberapa program pemberdayaan masyarakat telah menunjukkan keberhasilan dalam menjalin kemitraan strategis. YESS bermitra dengan lembaga keuangan di luar kementerian dan kedinasan untuk memfasilitasi pembiayaan program, sedangkan Kartu Prakerja menggandeng berbagai lembaga pelatihan. Pembiayaan UMi menjalin kerja sama dengan koperasi atau LKM dalam penyaluran kredit kepada usaha mikro, sementara Berdaya Ekomas menunjukkan dampak signifikan melalui kemitraan dengan Bank Papua dalam penyaluran kredit bagi masyarakat di Papua Barat Daya. PBK bekerja sama dengan berbagai pihak dalam pengadaan pelatihan kerja, sedangkan Kelapa Muda melibatkan Hapsari dan LSM setempat untuk memaksimalkan dampak program. Sementara itu, BUMDes didorong untuk bermitra dengan perusahaan swasta, meskipun inisiatif ini masih bergantung pada kepala desa dan pengurus BUMDes di masing-masing daerah.

Kemitraan lintas kedinasan ditemukan pada program Reforma Agraria, Perhutanan Sosial, dan Dana Desa. Program-program tersebut melibatkan koordinasi dan kerja sama di antara berbagai dinas terkait untuk mencapai tujuan program.

Namun, beberapa program lain, seperti PENA dan Atensi Kewirausahaan, masih memiliki ruang untuk peningkatan kemitraan. PENA, yang berfokus pada pendampingan kelompok rentan, dapat mengoptimalkan dampak program dengan menjalin kemitraan dengan LSM atau organisasi masyarakat sipil yang memiliki kepakaran dalam bidang pendampingan. Atensi Kewirausahaan dapat memperluas jangkauan program melalui kerja sama dengan lembaga keuangan mikro atau inkubator bisnis.

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan tahapan penting dalam program pemberdayaan masyarakat. Monev yang efektif memungkinkan pengukuran capaian program, identifikasi kendala dan tantangan, serta pengambilan keputusan yang tepat untuk perbaikan program. Pemanfaatan aplikasi digital dalam monev dapat meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas program.

Beberapa program pemberdayaan masyarakat telah memanfaatkan aplikasi dalam monev. PENA, misalnya, menggunakan aplikasi SIKSMA untuk pelaporan aktivitas dan kemajuan penerima manfaat. YESS memanfaatkan aplikasi terintegrasi yang memudahkan pendamping, *mobilizer*, dan penasihat keuangan (*financial advisor*) dalam melaporkan data dan berkoordinasi. Sistem SIKP UMi yang digunakan oleh Pembiayaan UMi memudahkan koperasi atau LKM mitra dalam melakukan verifikasi, pelaporan, dan monev. PBK menggunakan aplikasi SIAPkerja dan SMILe untuk memonitor pelaksanaan pelatihan, melibatkan pemangku kepentingan, dan melaporkan realisasi pelatihan. Sementara itu, Reforma Agraria memanfaatkan SKMPP, Sismonev KSP, dan aplikasi PTN untuk pemantauan dan evaluasi program secara berjenjang.

Meskipun demikian, beberapa program belum menggunakan aplikasi dalam monev. Atensi Kewirausahaan mengandalkan laporan manual dari UPT ke DirekReforma Agrariat Rehabilitasi Sosial di Kemensos. Kelapa Muda melakukan evaluasi dan monitoring bulanan oleh fasilitator dan pelaporan informal melalui pertemuan pengurus. Berdaya Ekomas mengandalkan pelaporan manual oleh Diskumperindag serta evaluasi berbasis dokumentasi dan pemantauan lapangan. Perhutanan Sosial melakukan pelaporan berdasarkan Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) yang disusun setiap 10 tahun oleh Kelompok Perhutanan Sosial (KPS). Dana Desa melibatkan berbagai pihak dalam monev, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten, meskipun belum menggunakan aplikasi terintegrasi. BUMDes mengandalkan pengawasan oleh kepala desa dan BPD.

Exit Strategy dan Keberlanjutan

Exit strategy dan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat menjadi aspek penting dalam menjamin keberlanjutan dampak program dan kemandirian penerima manfaat. Beberapa program telah memiliki strategi yang baik, seperti PENA yang memiliki Permensos No.7/2023 sebagai landasan hukum untuk menjamin keberlanjutan jangka panjang dan penerapan graduasi bagi penerima manfaat yang telah mandiri secara ekonomi. Selain itu, YESS, PESADA, Kelapa Muda, BUMDes, dan PR YAKKUM memiliki strategi keberlanjutan yang beragam, mulai dari pembentukan koperasi, dukungan pemerintah daerah sampai tahun 2026, hingga penguatan jejaring pendukung.

Sementara itu, beberapa program lain hanya memiliki *exit strategy* atau keberlanjutan saja. Perhutanan Sosial, misalnya, memiliki *exit strategy* dengan memberikan izin pengelolaan hutan dalam jangka waktu tertentu yang dapat diwariskan dan diperpanjang.

Sayangnya, masih terdapat program yang belum memiliki *exit strategy* dan keberlanjutan yang jelas, seperti ATENSI, PLUT, Pembiayaan UMi, Berdaya Ekomas, Reforma Agraria, Dana Desa, PBK, dan Kartu Prakerja. Ketiadaan strategi ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam perencanaan *exit strategy* dan keberlanjutan program agar dampak program dapat tetap dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.

PENA

Pahlawan Ekonomi Nusantara

Keterampilan Wirausaha

Pemberian Modal

Program Nasional. Sampel kajian:

Nusa Tenggara Barat

Kementerian/Lembaga Terkait :

Kementerian Sosial

Dinas Sosial Provinsi

Dinas Sosial Kabupaten

Tujuan :

Mengurangi angka kemiskinan ekstrem di Indonesia sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 mengenai Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dengan meningkatkan kemandirian ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sehingga mereka dapat memperoleh penghasilan di atas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Target Sasaran :

Kelompok Miskin

Kelompok Rentan

- KPM yang sebelumnya menerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Sembako, Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), dan bantuan lainnya.
- Kelompok rentan lainnya, termasuk lansia, penyandang disabilitas, korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta komunitas di daerah kepulauan yang sulit dijangkau.

Tahapan Pelaksanaan Program:

Perencanaan	<p>Pelaksanaan program PENA tertuang pada Petunjuk Teknis (Juknis) PENA 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan juknis PENA 2022, penerima manfaat diutamakan keluarga yang tidak memiliki lansia dan penyandang disabilitas karena mereka dianggap masih membutuhkan bansos.
Asesmen	<p>Asesmen dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang memuat data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data sekunder yang telah terkumpul akan diserahkan oleh dinas sosial setempat ke Unit Pelaksanaan Terpadu (UPT) atau Pendamping. • Proses dilanjutkan dengan pengisian formulir asesmen oleh penerima manfaat, yang kemudian diikuti oleh pemetaan potensi dan kebutuhan oleh pendamping atau UPT. • Terdapat tantangan dalam akurasi data dan komunikasi program.
Persiapan	<p>Hampir tidak ada sosialisasi program. Kemensos dan Dinsos kabupaten mengandalkan data, mitra, dan pendamping.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam Juknis, sosialisasi program hanya merupakan tanggung jawab Kemensos, tanpa melibatkan lembaga daerah. • Kurang memanfaatkan lokal <i>champion</i> untuk sosialisasi program.
Pelaksanaan	<p>Program PENA sejauh ini belum menjalin kemitraan dengan pihak lain di luar kedinasan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mayoritas pekerjaan dilakukan oleh pendamping atau UPT, sementara peran Dinas Sosial provinsi dan kabupaten terlihat kurang signifikan. Pendamping atau UPT melapor langsung ke DirekReforma Agrariat Kementerian Sosial terkait melalui aplikasi SIKSMA, sebuah solusi digital untuk manajemen operasional program PENA.

PENA

YESS

ATENSI
Kewirausahaan

PLUT

Kelapa
Muda

Pembiayaan
UMI

Berdaya
Ekomas

Reforma
Agraria

Perhutanan
Sosial

Dana
Desa

PBK

Kartu
Prakerja

BUMDes

<p>Pelaksanaan</p>	<p>Pelatihan yang diberikan adalah pelatihan kewirausahaan agar KPM dapat mandiri tanpa bergantung pada bansos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan yang dilakukan adalah pendampingan pengelolaan usaha. • Selain pelatihan usaha, KPM juga menerima permodalan sebesar Rp5.000.000,00. • Ketimpangan dalam remunerasi pendamping dan kurangnya peran Dinas Sosial.
<p>Monev</p>	<p>Evaluasi program dilakukan oleh Kementerian Sosial secara berkala, tetapi pelaksanaannya belum rutin atau konsisten. Namun karena sumber daya yang terbatas, maka evaluasi rutin belum dapat dilakukan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaporan dilakukan melalui aplikasi SIKSMA yang diisi oleh pendamping atau UPT. • Kinerja PENA juga dievaluasi secara berkala oleh instansi lain seperti BPK dan pihak terkait lainnya. • Tidak ada ketentuan untuk observasi atau mempertahankan kenaikan pendapatan (<i>income</i>) KPM setelah graduasi.
<p>Exit Strategy & Keberlanjutan</p>	<p>Penerima manfaat yang sudah memiliki pendapatan di atas UMK dan mengalami perubahan pola pikir akan digraduasi dari program.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keberlanjutan PENA didukung oleh Permensos (Peraturan Kementerian Sosial) No. 7/2023 yang menjamin kelangsungan program untuk jangka panjang, sekaligus memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mereplikasi model pemberdayaan PENA di daerah masing-masing menggunakan bendera atau nama program sendiri. • Belum adanya sumber pembiayaan alternatif selain APBN.

- PENA
- YESS
- ATENSI
Kewirausahaan
- PLUT
- Kelapa
Muda
- Pembiayaan
UMI
- Berdaya
Ekomas
- Refor
ma
Agrari
- Perhutanan
Sosial
- Dana
Desa
- PBK
- Kartu
Prakerja
- BUMDes

YESS

Youth Entrepreneurship and Employment Support Services

Keterampilan Wirausaha Pemberian Modal

Akses Pasar Akses Ketenagakerjaan

Program Nasional. Sampel kajian: **Jawa Barat**

Kementerian/Lembaga Terkait :

- Kementerian Pertanian
- Dinas Pertanian Perkebunan Pangan dan Hortikultura
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan :

Mendukung generasi muda di bidang pertanian dengan memberikan pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan untuk mendorong kewirausahaan dan meningkatkan lapangan pekerjaan di sektor pertanian.

Target Sasaran :

Pemuda

- Pemuda berusia 17-39 tahun di perdesaan yang berminat atau sudah terlibat di sektor pertanian, termasuk wirausahawan muda, petani muda, dan tenaga kerja pertanian.
- Generasi muda yang membutuhkan pelatihan, akses permodalan, serta pendampingan untuk meningkatkan kapasitas dan peluang usaha agribisnis.

Tahapan Pelaksanaan Program:

Perencanaan	<p>Terdapat beberapa dokumen panduan program YESS, antara lain Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor Pertanian YESS, Panduan Teknis Fasilitator Pemuda, dan Panduan Pengajuan Hibah Kompetitif.</p> <ul style="list-style-type: none"> Meskipun belum diketahui apakah program ini memiliki kebijakan inklusif, penerima manfaat program mencakup kelompok penyandang disabilitas dan terdapat juga program hibah kompetitif khusus perempuan dan juga terbuka untuk masyarakat adat.
Asesmen	<ul style="list-style-type: none"> Asesmen dilakukan langsung oleh pendamping. Pendamping mencari pemuda yang sudah terjun dalam sektor pertanian atau yang ingin mengembangkan usaha agrikultur.
Persiapan	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi program dilakukan melalui penyuluhan langsung, media sosial, dan kerja sama dengan lembaga lokal.
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> Dalam pelaksanaan program, pendamping akan merekrut Calon Penerima Manfaat (CPM) untuk diberikan pelatihan. Selanjutnya, <i>mobilizer</i> akan membantu menghubungkan usaha pertanian ke pasar, sedangkan penasihat keuangan (<i>financial advisor</i>) akan membantu Penerima Manfaat (PM) terkait manajemen keuangan. Semua aktivitas dilaporkan ke <i>District Implementation Team</i> (DIT) Provinsi, kemudian ke DIT Nasional, hingga akhirnya ke Kementerian Pertanian. Pendanaan diperoleh melalui kerja sama Kementerian Pertanian dengan International Fund For Agriculture Development (IFAD). Pelatihan yang diberikan mencakup pelatihan terkait pertanian, pengembangan bisnis agrikultur, dan pembuatan proposal modal. Pendampingan yang diberikan berupa motivasi untuk mengembangkan usaha dan mengikuti pelatihan.

- PENA
- YESS
- ATENSI Kewirausahaan
- PLUT
- Kelapa Muda
- Pembiayaan UMI
- Berdaya Ekomas
- Refor ma Agrari
- Perhutanan Sosial
- Dana Desa
- PBK
- Kartu Prakerja
- BUMDes

<p>Pelaksanaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Akses yang diberikan adalah akses pasar melalui <i>mobilizer</i>, tanpa perlu melalui tengkulak. ● Terdapat pemberian modal melalui hibah kompetitif. ● Tantangan dalam pelaksanaan meliputi mutasi unit kerja dan ketergantungan pada donor.
<p>Monev</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Monitoring dilakukan melalui sistem MIS, forum koordinasi, dan kunjungan lapangan. ● Proses pelaporan dilakukan melalui aplikasi digital. ● Pendamping dan <i>mobilizer</i> akan memasukkan data pada aplikasi digital yang akan dilaporkan kepada DIT Provinsi, DIT Nasional, dan Kementerian Pertanian.
<p>Exit Strategy & Keberlanjutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Exit Strategy</i> program YESS adalah membangun jejaring bisnis bagi petani muda yang terlibat dalam Program YESS untuk membantu akses ke sumber daya yang dibutuhkan sekaligus menciptakan peluang untuk inovasi, peningkatan efisiensi, dan pengembangan pasar yang lebih luas guna mendukung kemandirian penerima manfaat.

- PENA
- YESS
- ATENSI Kewirausahaan
- PLUT
- Kelapa Muda
- Pembiayaan UMi
- Berdaya Ekomas
- Refor ma Agrari
- Perhutanan Sosial
- Dana Desa
- PBK
- Kartu Prakerja
- BUMDes

ATENSI Kewirausahaan

Asistensi Rehabilitasi Sosial Kewirausahaan

Keterampilan Wirausaha

Pemberian Modal

Program Nasional. Sampel kajian:

Papua Barat Daya

Kementerian Lembaga Terkait :

Kementerian Sosial

Dinas Sosial

Tujuan :

Meningkatkan produktivitas dan kemandirian penerima bantuan secara ekonomi melalui bantuan berupa alat bantu fisik dan kewirausahaan.

Target Sasaran :

Kelompok Miskin

Kelompok Rentan

- Kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, anak terlantar, dan keluarga miskin.

Tahapan Pelaksanaan Program:

Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Program ATENSI memiliki Pedoman Operasional secara umum, tetapi belum ada pedoman panduan khusus ATENSI Kewirausahaan. • Dalam konteks inklusi, ATENSI adalah program yang sangat inklusif. Perubahan ruang lingkup beberapa tahun lalu memperluas cakupan ATENSI. Saat ini ATENSI melibatkan seluruh kelompok, yaitu anak, lansia, penyandang disabilitas, kelompok rentan, napsah, dan orang dengan HIV/AIDS.
Asesmen	<ul style="list-style-type: none"> • Data DTKS dari Kemensos belum tentu akurat. • Asesmen dilakukan dengan data yang diberikan oleh Dinas Sosial. UPT (Sentra Pangurangi) dan pendamping kemudian melakukan asesmen berdasarkan data tersebut. Asesmen kebutuhan dilakukan menggunakan beberapa metode, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemetaan potensi daerah (area sekitar tempat tinggal penerima manfaat). b. Wawancara penerima manfaat. c. Pemetaan potensi keahlian atau bakat dan minat penerima manfaat.
Persiapan	<ul style="list-style-type: none"> • Proses sosialisasi dilakukan oleh Dinsos bekerja sama dengan sentra setempat.
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam program ATENSI kewirausahaan, pelatihan yang diberikan adalah pelatihan kewirausahaan. Sementara itu, program ATENSI lainnya menyediakan pelatihan vokasional. • Pendampingan sosial diberikan kepada anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. ATENSI juga menyediakan alat bantu bagi penyandang disabilitas. • Dalam penyaluran bantuan, UPT berkoordinasi dengan Dinsos untuk penyerahan dokumen keputusan dan penetapan daftar penerima manfaat serta rincian manfaat untuk masing-masing penerima. Penyaluran bantuan akan dilakukan oleh Dinsos, tetapi di daerah yang memiliki sentra, pemberian bantuan akan langsung disalurkan oleh sentra. • UPT melakukan kunjungan lapangan sebagai tindak lanjut (<i>follow up</i>) terhadap aduan ataupun kasus yang dilaporkan pendamping ke UPT.

<p>Pelaksanaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UPT menunjuk koordinator di setiap kota atau kabupaten di Papua Barat Daya. Koordinator bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dengan Dinsos & mengoordinasi pendamping. • Dalam penyaluran bantuan, mayoritas penerima manfaat tidak melakukan pembelian barang sendiri. Untuk memastikan penggunaan dana tepat sasaran, UPT membantu pengadaan melalui mitra pengadaan barang.
<p>Monev</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Semua pelaporan dari UPT ke DirekReforma Agrariat dilakukan menggunakan aplikasi SIKSMA. • Pendamping Rehsos (Rehabilitasi Sosial) dan UPT melakukan pelaporan langsung ke DirekReforma Agrariat Rehabilitasi Sosial di Kementerian Sosial. • UPT menyusun laporan bulanan dan tahunan dengan format laporan yang sudah ditentukan. Laporan bulanan berisi laporan graduasi dan monev, sedangkan laporan tahunan berisi laporan kinerja sesuai indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SK sentra UPT.
<p>Exit Strategy & Keberlanjutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Saat ini belum tersedia strategi konkret untuk menjamin keberlangsungan program dan dampak yang diterima penerima manfaat. • Saat ini upaya yang dilakukan oleh Pemda untuk keberlangsungan program adalah mengajukan anggaran untuk menjamin keberlanjutan program setiap tahun.

- PENA
- YESS
- ATENSI Kewirausahaan
- PLUT
- Kelapa Muda
- Pembiayaan UMi
- Berdaya Ekomas
- Refor ma Agrari
- Perhutanan Sosial
- Dana Desa
- PBK
- Kartu Prakerja
- BUMDes

PLUT

Pusat Layanan Usaha Terpadu

Keterampilan Wirausaha

Program Nasional. Sampel kajian:

Jawa Barat dan Sumatera utara

Kementerian Lembaga Terkait :

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi/Kabupaten/Kota

Tujuan :

Program PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) bertujuan mendukung pengembangan UMKM dan koperasi melalui layanan terintegrasi, seperti konsultasi, pelatihan, dan pendampingan. Program ini juga memfasilitasi peningkatan daya saing dan kesejahteraan ekonomi lokal.

Target Sasaran :

UMKM

- Target sasaran PLUT adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), koperasi, serta calon wirausahawan yang membutuhkan pendampingan, pelatihan, dan akses sumber daya untuk mengembangkan usaha mereka.

Tahapan Pelaksanaan Program:

Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat dokumen Juknis Pelaksanaan Program Pusat Layanan Terpadu KUMKM. • Meskipun Juknis PLUT KUMKM tidak mencantumkan kebijakan inklusif, program ini melibatkan peserta dari kelompok rentan.
Asesmen	<ul style="list-style-type: none"> • Asesmen dilakukan melalui permintaan langsung (<i>direct request</i>) dari pelaku UMKM yang datang ke PLUT. Selain itu, PLUT juga aktif menyebarkan formulir survei elektronik di pelatihan dan pameran yang diadakan oleh Dinas Koperasi & UMKM. • Dinas Koperasi dan UMKM yang membawahi PLUT juga menerima rekomendasi berupa data masyarakat miskin dari Dinas Sosial untuk dijadikan penerima manfaat program PLUT.
Persiapan	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi program dilakukan secara daring dan luring melalui sosial media dan acara yang diselenggarakan oleh Dinsos.
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan yang dilakukan merupakan pelatihan kewirausahaan, seperti digitalisasi usaha, manajemen keuangan, pengiklanan, dan masih banyak pelatihan lainnya. • Pendampingan yang dilakukan adalah pendampingan pengembangan kewirausahaan, seperti pembuatan berkas-berkas legal, pembuatan konten media sosial, dan desain kemasan produk. • Akses pasar dilakukan melalui galeri yang tersedia di PLUT. • Hampir semua pelaksanaan program dilakukan langsung oleh UPT PLUT, dengan dukungan Kemenkop dari segi pengadaan MoU payung dengan mitra di skala nasional untuk mempermudah kerja sama di level provinsi. Selain itu, Kemenkop juga mendukung dari segi pendanaan. Dukungan Dana Alokasi Khusus (fisik fasilitas) diberikan kepada pemprov, sedangkan Dana Dekonsentrasi diberikan langsung dari level Kemenkop UKM ke pemerintah kota/kabupaten. • PLUT Sumatera Utara bekerja sama dengan beberapa mitra seperti Tokopedia dan Telkomsel dalam program <i>fast track</i> untuk pemasaran digital. • Terdapat program <i>fast track</i> yang membantu digitalisasi UMKM melalui pendampingan, pelatihan, dan <i>business matchmaking</i>. • Kehadiran UMKM di pelatihan masih bergantung dengan keinginan pemilik usaha (<i>owner</i>).

PENA

YESS

ATENSI
Kewirausahaan

PLUT

Kelapa Muda

Pembiayaan UMi

Berdaya Ekomas

Reformasi Agrari

Perhutanan Sosial

Dana Desa

PBK

Kartu Prakerja

BUMDes

<p>Monev</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Metrik utama yang diukur untuk program inkubasi dan program umum adalah penjualan dan perizinan. ● Konsultan pendamping menyusun laporan bulanan mengenai aktivitas pendampingan kepada pimpinan PLUT-KUMKM menggunakan format yang telah ditentukan. ● Pimpinan PLUT-KUMKM di tingkat provinsi dan kabupaten/kota mengumpulkan laporan dari para konsultan pendamping dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui perangkat daerah terkait, serta memberikan tembusan kepada Kementerian Koperasi dan UKM. ● Deputi Kementerian Koperasi dan UKM bersama dengan pemerintah daerah mengevaluasi laporan tersebut untuk penilaian kinerja PLUT-KUMKM setiap tahunnya. ● Evaluasi UMKM dilakukan dengan berbagai metode, tetapi umumnya menggunakan <i>pre/post</i> atau <i>pre-mid-post evaluation</i>. ● Evaluasi kinerja PLUT dilakukan secara tahunan bersama Kemenkop, tetapi di tingkat daerah belum ada evaluasi formal yang dilakukan.
<p>Exit Strategy & Keberlanjutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Sejauh ini, belum ada strategi keberlanjutan program maupun <i>exit strategy</i> untuk program PLUT.

- PENA
- YESS
- ATENSI Kewirausahaan
- PLUT**
- Kelapa Muda
- Pembiayaan UMi
- Berdaya Ekomas
- Refor ma Agrari
- Perhutanan Sosial
- Dana Desa
- PBK
- Kartu Prakerja
- BUMDes

Kelapa Muda

Kelompok Perempuan Muda dan Berdaya

Pendampingan Sosial

Akses Modal

Program Daerah. Sampel kajian:

Sumatera Utara

Kementerian Lembaga Terkait :

Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Sumatera Utara

Dinas Sosial

PENA

YESS

ATENSI
Kewirausahaan

PLUT

Kelapa
Muda

Pembiayaan
UMI

Berdaya
Ekomas

Refor
ma
Agrari

Perhutanan
Sosial

Dana
Desa

PBK

Kartu
Prakerja

BUMDes

Tujuan :

Menumbuhkan dan memperkuat kepemimpinan perempuan akar rumput (*grassroots*) agar memiliki kesadaran kritis, kepedulian, solidaritas, dan kecakapan hidup, sehingga lebih berdaya dalam menyelesaikan persoalan dirinya, keluarganya, dan mampu ikut serta melakukan perubahan sosial di lingkungannya.

Target Sasaran :

Kelompok Miskin

Perempuan

- Perempuan akar rumput, terutama yang berada di wilayah Sumatera Utara.

Tahapan Pelaksanaan Program:

Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> Kelapa Muda telah menerbitkan Modul Kelapa Muda yang berisi penjelasan program Kelapa Muda. Terdapat Modul I: Panduan Fasilitator Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya (KELAPA MUDA) Sumatera Utara, yang menjadi panduan bagi fasilitator program. Inklusivitas program ini lebih diutamakan kepada wanita.
Asesmen	<ul style="list-style-type: none"> Dinas sosial memberikan data sekunder kepada Tim Program Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik, Ekonomi, dan Hukum. Data sekunder tersebut berasal dari Data Simponi dan Sensus Penduduk. Data sekunder digunakan untuk memetakan calon penerima manfaat yang berasal dari kalangan perempuan marginal, penyandang disabilitas, serta penyintas kekerasan pada perempuan dan anak-anak.
Persiapan	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi program dilakukan bersama kedinasan dan lembaga masyarakat, seperti PKK.
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan berupa pendidikan kritis yang membahas isu-isu penting, seperti kekerasan terhadap anak-anak, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, kesehatan, hingga perubahan iklim. Selain itu, pelatihan pengembangan usaha dan ekonomi juga dilakukan melalui pembuatan Rumah Nusa (Rumah Nutrisi Keluarga). Pendampingan sosial diberikan terutama bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kelapa Muda memiliki tim fasilitator dan pendamping yang sekaligus berperan sebagai anggota sehingga mempermudah koordinasi selama pelaksanaan. Koordinasi mingguan juga dilakukan memanfaatkan lokasi kelas Kelapa Muda untuk mendengarkan masukan dan keinginan dari para anggota terkait program Kelapa Muda. Kemitraan dilakukan dengan organisasi nonpemerintah, salah satunya HAPSARI, yang juga berperan sebagai fasilitator program ini.

<p>Monev</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tantangan yang dihadapi adalah resistensi dari kaum laki-laki terhadap program Kelapa Muda. • Pelaporan disampaikan secara informal melalui pertemuan pengurus. Namun, pertemuan ini tidak memiliki penjadwalan khusus dan diselenggarakan berdasarkan kebutuhan saja. • Evaluasi dan monitoring dilakukan sebulan sekali oleh fasilitator, dalam hal ini HAPSARI.
<p>Exit Strategy & Keberlanjutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada <i>exit strategy</i> yang berlaku dalam program ini. • Program Kelapa Muda telah menjadi bagian dari KSD (Kegiatan Strategi Daerah), yang memastikan program ini akan terus mendapat dukungan utama dari Pemerintah Provinsi hingga 2026.

- PENA
- YESS
- ATENSI Kewirausahaan
- PLUT
- Kelapa Muda
- Pembiayaan UMi
- Berdaya Ekomas
- Refor ma Agrari
- Perhutanan Sosial
- Dana Desa
- PBK
- Kartu Prakerja
- BUMDes

Pembiayaan UMi

Pembiayaan Ultra Mikro

Akses Modal

Program Nasional. Sampel kajian:

Jawa Barat

Kementerian Lembaga Terkait :

Kementerian Keuangan

Pusat Investasi Pemerintah

PENA

YESS

ATENSI
Kewirausahaan

PLUT

Kelapa
Muda

Pembiayaan
UMi

Berdaya
Ekomas

Refor
ma
Agrari

Perhutanan
Sosial

Dana
Desa

PBK

Kartu
Prakerja

BUMDes

Tujuan :

Memberikan akses pembiayaan yang mudah, terjangkau, dan bersifat nonbank kepada pelaku usaha ultra mikro yang belum memiliki akses ke pembiayaan dari perbankan. Program ini dirancang untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, meningkatkan kapasitas usaha, dan mendorong pengurangan kemiskinan melalui inklusi keuangan.

Target Sasaran :

UMKM

- Pelaku usaha ultra mikro yang tidak dapat mengakses layanan perbankan (*unbankable*), termasuk pekerja informal dan penerima manfaat program pemerintah, untuk mendukung pengembangan usaha produktif mereka.

Tahapan Pelaksanaan Program:

Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat dokumen Panduan Program Pembiayaan Ultra Mikro (Pembiayaan UMi). • Meskipun tidak terdapat kebijakan inklusif dalam Panduan Program Pembiayaan Ultra Mikro, beberapa penerima manfaat berasal dari kelompok rentan.
Asesmen	<ul style="list-style-type: none"> • Mitra penyalur (koperasi) melakukan verifikasi kepada usaha ultra mikro dengan melihat kondisi faktual di lapangan, seperti keberadaan usaha, lama waktu usaha berjalan, dan jumlah penghasilan. Koperasi memiliki SOP untuk melakukan verifikasi usaha. Selain pengecekan faktual, terdapat sistem verifikasi calon debitur UMi, yaitu SIKP UMi, untuk memastikan calon debitur belum menerima program pemerintah lain. Jika sudah, maka calon debitur tidak dapat menerima Pembiayaan UMi. • Menggunakan pendekatan komunitas dan mengintegrasikan data ke PIP.
Persiapan	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi mengenai program UMi masih kurang. • Belum terlihat peran PIP dalam sosialisasi program. • Sosialisasi program lebih cenderung dilakukan oleh koperasi atau lembaga keuangan mikro (LKM) yang berada di bawah pengawasan OJK.
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terdapat pelatihan usaha dalam program ini, hanya ada informasi mengenai program UMi. • Sejauh ini, program UMi hanya bermitra dengan koperasi atau LKM sebagai "Mitra Penyalur" dalam proses penyaluran pinjaman. • Pendampingan yang diberikan berupa pendampingan kewirausahaan, termasuk memantau perkembangan usaha, mengidentifikasi dukungan yang bisa dilakukan oleh koperasi, mengatasi kendala, dan mencarikan jejaring ke usaha serupa. • Akses yang diberikan adalah akses permodalan melalui fasilitas pinjaman. • Mitra penyalur melakukan pengecekan anggota "Know Your Customer" untuk mengetahui apakah CPM memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman. • Setelah diverifikasi oleh PIP, terdapat batas waktu penyaluran pinjaman yang diatur sesuai regulasi sistem SIKP UMi. • Adanya pendekatan kelompok dan sanksi sosial.

<p>Monev</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Evaluasi program dilakukan setiap enam bulan sekali untuk melihat dampak program. Indikator yang diukur meliputi nilai aset, omset, pendapatan, dan jumlah tenaga kerja. Selain itu, risiko seperti adanya pinjaman di tempat lain juga turut dianalisis. Evaluasi dilakukan melalui survei dan wawancara dengan debitur. ● Pelaporan dilakukan menggunakan SIKP UMi. Mitra penyalur menyusun laporan pendampingan, laporan monev, pembaruan fidusia bulanan, laporan keuangan triwulanan, dan rekonsiliasi bulanan. ● PIP juga menyusun laporan capaian kinerja, laporan ke Dewan Pengawas, serta Laporan Risiko dan Kolektibilitas.
<p>Exit Strategy & Keberlanjutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Belum ada strategi keberlanjutan dan <i>exit strategy</i> yang jelas dari program UMi. ● Belum ada mekanisme yang jelas untuk naik kelas ke KUR.

- PENA
- YEISS
- ATENSI Kewirausahaan
- PLUT
- Kelapa Muda
- Pembiayaan UMi
- Berdaya Ekomas
- Refor ma Agrari
- Perhutanan Sosial
- Dana Desa
- PBK
- Kartu Prakerja
- BUMDes

Berdaya Ekomas

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Akses Modal

Keterampilan Wirausaha

Program Lokal :

Papua Barat Daya

Tujuan :

Berdaya Ekomas bertujuan untuk membantu meningkatkan kapasitas bisnis dan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) serta usaha kecil dan menengah (UKM). Upaya ini mencakup penguatan legalitas dan manajemen usaha, serta peningkatan keterampilan dan akses pendanaan.

Target Sasaran :

UMKM

UKM (Usaha Kecil Menengah) dan IKM (Industri Kecil Menengah). IKM adalah usaha yang memproduksi berbagai jenis produk yang diperlukan oleh manusia, hewan, hingga tumbuhan. Sementara itu, UKM adalah usaha yang berfokus pada penjualan kembali barang yang diproduksi IKM, seperti toko kelontong hingga warung-warung di sekitar rumah.

Tahapan Pelaksanaan Program:

Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Panduan program Berdaya Ekomas tertuang dalam Rancangan Peraturan Gubernur Papua Barat Daya tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya. • Meskipun tidak terdapat kebijakan inklusif yang disebutkan secara eksplisit dalam dokumen rancangan, pemberian kredit tanpa bunga melalui program ini memprioritaskan alokasi sebesar 80% untuk Orang Asli Papua (OAP) dan 20% untuk non-OAP.
Asesmen	<ul style="list-style-type: none"> • Asesmen menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskumperindag). • Asesmen juga melibatkan kepala distrik dan lurah untuk menggali praktik baik, dari IKM maupun UKM lokal di wilayah masing-masing, sehingga aset atau sumber daya dapat dipetakan di awal. • Asesmen dilakukan berdasarkan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi UKM dan IKM, termasuk digitalisasi dan kondisi finansial.
Persiapan	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi mengalami hambatan dalam menjangkau daerah-daerah terpencil di Papua Barat Daya.
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan yang diberikan adalah pelatihan kewirausahaan. • Pendampingan yang diberikan berupa pendampingan usaha, seperti penyiapan dokumen legalitas usaha. • Akses yang diberikan mencakup akses permodalan. UKM dan IKM penerima manfaat dapat mengajukan pinjaman dengan suku bunga yang ditanggung oleh pemerintah. • Berdaya Ekomas juga memberikan alat produksi bagi IKM yang sudah matang. • Melalui Diskumperindag, pelaksanaan program dimulai dengan pelatihan atau pembekalan kepada IKM dan UKM dalam aspek bisnis. Peserta yang mengikuti program akan mendapatkan sertifikasi dan rekomendasi dari program Berdaya Ekomas, yang kemudian diajukan ke bank untuk verifikasi. Bank akan memberikan pinjaman dengan bunga kredit yang disubsidi oleh pemerintah provinsi.

Kementerian Lembaga Terkait :

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Papua Barat Daya

PENA

YESS

ATENSI
Kewirausahaan

PLUT

Kelapa
Muda

Pembiayaan
UMI

Berdaya
Ekomas

Refor
ma
Agrari

Perhutanan
Sosial

Dana
Desa

PBK

Kartu
Prakerja

BUMDes

<p>Monev</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Berdaya Ekomas bermitra dengan BLK Ambon dalam memberikan pelatihan bagi target sasaran. ● Pelaporan program dilakukan oleh Diskumperindag terkait kepada berbagai pihak, termasuk internal dinas, inspekReforma Agrariat, serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. ● Evaluasi mencakup dokumentasi pelaksanaan program, pemantauan UKM dan IKM, validasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta analisis pendapatan yang dihasilkan oleh UKM dan IKM. ● Evaluasi juga meliputi penghitungan Return on Investment (RoI) dari pinjaman yang diberikan dan penilaian terhadap desain produk yang dikembangkan oleh UKM dan IKM dalam rangka meningkatkan daya saing pasar.
<p>Exit Strategy & Keberlanjutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Program Berdaya Ekomas relatif baru sehingga belum memiliki strategi keberlanjutan dan <i>exit strategy</i>.

- PENA
- YESS
- ATENSI Kewirausahaan
- PLUT
- Kelapa Muda
- Pembiayaan UMi
- Berdaya Ekomas
- Refor ma Agrari
- Perhutanan Sosial
- Dana Desa
- PBK
- Kartu Prakerja
- BUMDes

Reforma Agraria

Tanah Objek Reforma Agraria

Akses Lahan

Program Nasional. Sampel kajian: Sumatera Utara

Kementerian Lembaga Terkait :

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Dinas Pertanahan

Tujuan :

Program Reforma Agraria bertujuan untuk mengatasi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses legalitas tanah, dan mendukung keberlanjutan pengelolaan sumber daya agraria.

Target Sasaran :

Kelompok Adat

Petani Kecil

- Target sasaran Reforma Agraria adalah petani kecil, masyarakat adat, dan individu yang mengelola tanah tanpa kepastian hukum, untuk memberikan akses legalitas serta mendukung kesejahteraan dan produktivitas mereka.

Tahapan Pelaksanaan Program:

Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat dokumen Petunjuk Teknis Penataan Akses Reforma Agraria dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Penataan Agraria di Daerah. Kebijakan inklusif pada program Reforma Agraria dikhususkan untuk kelompok adat.
Asesmen	<ul style="list-style-type: none"> Reforma Agraria melakukan analisis kebutuhan (<i>needs assessment</i>) melalui aplikasi, google form, Musrenbang, dan survei pemetaan sosial. Kementerian ATR/BPN bertanggung jawab atas pemetaan, identifikasi, dan verifikasi status hukum tanah yang akan menjadi objek reforma agraria. Tim inventarisasi kemudian melakukan verifikasi status dan pemetaan tanah untuk memastikan kelayakannya sebagai objek Reforma Agraria.
Persiapan	<ul style="list-style-type: none"> GTRA akan menyosialisasikan program Reforma Agraria, pentingnya redistribusi tanah, dan potensi pemanfaatan lahan melalui Musrenbang.
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan yang diberikan disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing. Program Reforma Agraria dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pemetaan aset, pemetaan akses, dan penyelesaian konflik. Setelah pemetaan aset dan verifikasi dilakukan oleh tim inventarisasi, Kementerian ATR/BPN akan menerbitkan sertifikat tanah. Tim GTRA bersama masyarakat kemudian memetakan akses dan potensi yang dapat dikembangkan untuk pemanfaatan akses tanah yang telah diberikan. Setelah akses dipetakan, Kementerian ATR/BPN akan memfasilitasi program pemberdayaan masyarakat dengan merangkul dinas dan lembaga terkait lainnya untuk teknis penyuluhan atau pelaksanaan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tempat tersebut. Tim GTRA juga bertanggung jawab dalam penyelesaian konflik. Sejauh ini, Reforma Agraria hanya bekerja sama dengan kedinasan dan belum melibatkan mitra di luar kedinasan.

- PENA
- YESS
- ATENSI Kewirausahaan
- PLUT
- Kelapa Muda
- Pembiayaan UMI
- Berdaya Ekomas
- Reforma Agraria
- Perhutanan Sosial
- Dana Desa
- PBK
- Kartu Prakerja
- BUMDes

<p>Monev</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi rutin dilakukan setiap minggu (ATR/BPN) dan setiap 3 bulan untuk memeriksa progres anggaran serta pencapaian indikator menggunakan aplikasi seperti SIPD dan Simonev. • Sebelum rapat dengan pemangku kepentingan, diadakan rapat internal untuk membahas hasil pertemuan dan evaluasi kebutuhan lebih lanjut. • Semua kegiatan program Reforma Agraria dipantau melalui aplikasi SKMPP ATR/BPN, Sismonev KSP, dan PTN yang menyediakan informasi lebih rinci untuk akses oleh pihak pusat.
<p>Exit Strategy & Keberlanjutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada strategi keberlanjutan dan <i>exit strategy</i> dalam program ini.

- PENA
- YEISS
- ATENSI Kewirausahaan
- PLUT
- Kelapa Muda
- Pembiayaan UMi
- Berdaya Ekomas
- Refor ma Agrari
- Perhutanan Sosial
- Dana Desa
- PBK
- Kartu Prakerja
- BUMDes

Perhutanan Sosial

Akses Lahan

Program Nasional. Sampel kajian: **Nusa Tenggara Barat**

Kementerian Lembaga Terkait :

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tujuan :

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian akses pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

Target Sasaran :

Kelompok Petani

Kelompok Adat

- Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, terutama yang bergantung pada sumber daya alam hutan untuk kehidupan mereka.

Tahapan Pelaksanaan Program:

Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Panduan Perhutanan Sosial menjadi acuan dalam menjalankan program. Kebijakan inklusif Perhutanan Sosial lebih berfokus pada masyarakat adat.
Asesmen	<ul style="list-style-type: none"> Asesmen dilakukan berdasarkan permohonan dari kelompok tani hutan atau kelompok masyarakat yang ingin mendapatkan legalitas atas akses pengelolaan hutan. Permohonan dapat diajukan kepada Dinas LHK, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara untuk ditindaklanjuti.
Persiapan	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi program dilakukan melalui penyuluhan kepada masyarakat sekitar hutan, dengan melibatkan masyarakat dan perangkat desa.
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> Program Perhutanan Sosial mencakup berbagai kegiatan, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga pengembangan usaha. Pendampingan yang dilakukan berfokus pada penguatan kelembagaan, mengingat program Perhutanan Sosial ini bersifat kelompok. Biasanya, koperasi dibentuk sebagai wadah bagi masyarakat atau untuk mengelola hutan. Akses yang diberikan adalah akses pengelolaan hutan dan bantuan legalitas. Setelah pengajuan usulan legalitas izin akses hutan disetujui dan divalidasi oleh KLHK, maka DLHK akan menetapkan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS). Program Perhutanan Sosial bermitra dengan LSM atau universitas, serta pihak swasta dalam bentuk "Kemitraan Kehutanan".
Monev	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki sistem monitoring berbasis web yang terintegrasi dengan goKUP. Proses pelaporan monitoring Perhutanan Sosial (PS) dilakukan berdasarkan Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) yang disusun oleh Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dalam jangka waktu 10 tahun sebelumnya.
Exit Strategy & Keberlanjutan	<ul style="list-style-type: none"> Masyarakat mendapat izin pengelolaan dengan jangka waktu yang bervariasi, sesuai dengan skema yang dipilih (bisa mencapai hingga 35 tahun serta dapat diwariskan dan diperpanjang). Belum ada <i>exit strategy</i> dari program Perhutanan Sosial.

PENA

YESS

ATENSI
Kewirausahaan

PLUT

Kelapa
Muda

Pembiayaan
UMI

Berdaya
Ekomas

Refor
ma
Agrari

Perhutanan
Sosial

Dana
Desa

PBK

Kartu
Prakerja

BUMDes

Dana Desa

Pemberian Tunai

Program Nasional. Sampel kajian: **Nusa Tenggara Barat**

Kementerian Lembaga Terkait :

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tujuan :

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Target Sasaran :

Kelompok Petani

Kelompok Adat

- Seluruh masyarakat desa, dengan fokus pada masyarakat miskin dan rentan, agar dapat merasakan manfaat dari program pembangunan dan pemberdayaan desa.

Tahapan Pelaksanaan Program:

Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 145/PMK.07/2023 mengenai Pengelolaan Dana Desa dan PMK Nomor 146/PMK.07/2023 mengenai Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024. Kebijakan inklusif di Dana Desa lebih ditujukan kepada desa-desa tertinggal dan sangat tertinggal.
Asesmen	<ul style="list-style-type: none"> Proses penilaian calon penerima manfaat dan usulan program diperoleh dari masing-masing kepala wilayah (kepala dusun). Usulan tersebut disusun melalui mekanisme musyawarah dusun, kemudian dirangkum dan diajukan kepada kepala desa. Selanjutnya, kepala desa memutuskan program yang akan dijalankan melalui musyawarah desa mulai dari perencanaan program hingga terbitnya RPJMDes. Proses pengumpulan data juga melibatkan masyarakat sebagai sampel yang dibantu oleh tim survei dan tim verifikasi. Pelibatan kelompok rentan sangat bergantung pada kebijakan masing-masing kepala desa.
Persiapan	<ul style="list-style-type: none"> Melibatkan musyawarah desa serta berbagai tim (survei dan verifikasi) dalam <i>needs assessment</i>. Tantangan yang dihadapi berupa konflik kepentingan dan resistensi dalam identifikasi masalah. Sosialisasi program dilaksanakan kepada seluruh masyarakat desa dan pemangku kepentingan melalui musyawarah desa. Adanya program tahunan serta aktivitas yang terstruktur dan melibatkan berbagai pihak masyarakat.
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan program berfokus pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang mencakup 5 area, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta sosial. Setelah program ditetapkan, dibentuk tim pelaksana, tim pengawas, dan tim pendamping program. Pelaksanaan program juga melibatkan seluruh unsur produktif di desa, antara lain Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Perangkat Desa, Karang Taruna (melibatkan generasi muda).

- PENA
- YESS
- ATENSI Kewirausahaan
- PLUT
- Kelapa Muda
- Pembiayaan UMi
- Berdaya Ekomas
- Reformasi Agrari
- Perhutanan Sosial
- Dana Desa
- PBK
- Kartu Prakerja
- BUMDes

Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> ● Pelatihan dan pendampingan sangat bergantung pada kebijakan masing-masing desa. ● Dana yang diberikan kepada desa digunakan untuk pengembangan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa.
Monev	<ul style="list-style-type: none"> ● Pengawasan rutin dilakukan untuk memastikan kualitas pelaksanaan program. ● Dukungan teknis diperlukan dalam penyusunan laporan agar lebih efektif dan tepat waktu. ● Proses monitoring dan evaluasi (monev) Dana Desa melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, BPD, hingga tim pengawas di tingkat desa. InspekReforma Agrariat Kabupaten juga terlibat dengan melakukan audit dan pemeriksaan untuk memastikan penggunaan Dana Desa sesuai aturan dan tepat sasaran. Sementara itu, camat dan pendamping desa berperan dalam pembinaan dan pengawasan di tingkat kecamatan, dan Dinas PMD mengawasi tingkat kabupaten secara umum.
Exit Strategy & Keberlanjutan	<ul style="list-style-type: none"> ● Belum ada strategi keberlanjutan dan <i>exit strategy</i> dari Dana Desa.

- PENA
- YESS
- ATENSI Kewirausahaan
- PLUT
- Kelapa Muda
- Pembiayaan UMi
- Berdaya Ekomas
- Refor ma Agrari
- Perhutanan Sosial
- Dana Desa
- PBK
- Kartu Prakerja
- BUMDes

PBK

Pelatihan Berbasis Kompetensi

Keterampilan Vokasional

Program Nasional. Sampel kajian:

Nusa Tenggara Barat
& Papua Barat Daya

Kementerian Lembaga Terkait :

Kementerian Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja

Tujuan :

Meningkatkan keterampilan, kompetensi, dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan mendukung peningkatan daya saing tenaga kerja.

Target Sasaran :

Pencari Kerja

Kelompok Rentan

- Masyarakat usia produktif, pekerja, dan pencari kerja yang ingin meningkatkan keterampilan kerja, terutama mereka yang belum memiliki akses ke pelatihan formal.

Tahapan Pelaksanaan Program:

Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat dokumen Petunjuk Teknis (Juknis) Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) yang menjelaskan tata cara pelaksanaan pelatihan kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja sesuai standar pasar kerja. Di dalam Juknis ini terdapat aturan khusus penyandang disabilitas.
Asesmen	<ul style="list-style-type: none"> Sebelum melakukan pelatihan, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), seperti Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) atau Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), melakukan analisis kebutuhan pelatihan, Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD), serta kunjungan lapangan untuk memastikan topik pelatihan sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi. Selain itu, lembaga atau pihak luar yang membutuhkan pengadaan pelatihan dapat melakukan pengajuan proposal.
Persiapan	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi program dilakukan melalui situs web, Instagram, dan juga pemerintah daerah.
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pelatihan, kelas pelatihan yang sesuai dengan hasil asesmen akan dilaksanakan oleh LPK. Pendaftaran dilakukan secara daring atau luring, dengan calon peserta mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan dokumen yang diminta, misalnya identitas dan kualifikasi. Setelah itu, dilakukan seleksi administrasi dan wawancara untuk memastikan peserta memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Durasi pelatihan beragam tergantung pada jenis pelatihan. Peserta yang lulus akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti kelulusan dan kompetensi yang telah dicapai. LPK dapat menjalin kemitraan dengan pihak luar untuk penyelenggaraan pelatihan. Sebagai contoh, BPVP Lombok Timur bekerja sama dengan pemerintah Swedia dalam melaksanakan program pelatihan teknisi pembangkit listrik tenaga surya. Pelatihan yang diberikan berupa pelatihan vokasional yang sesuai dengan kebutuhan industri. Pendampingan diberikan untuk mempersiapkan peserta memasuki dunia kerja. Terdapat standardisasi dan SOP lengkap serta kuota dan pelatihan untuk penyandang disabilitas.

<p>Money</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas program dengan membandingkan <i>input</i>, <i>output</i>, dan <i>outcome</i>. UPT bidang Lavotas melaporkan realisasi pelatihan yang menggunakan APBN melalui aplikasi SMILE. ● Setiap LPK wajib membuat laporan untuk setiap pelatihan yang telah dilaksanakan menggunakan templat yang sudah ditentukan. ● DirekReforma Agrariat Jenderal Bina Lavotas memonitor pelaksanaan program pelatihan, melibatkan pemangku kepentingan terkait, dan memanfaatkan aplikasi SIAPkerja untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. ● <i>Review</i> kinerja setiap semester dilakukan berdasarkan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Indikator ini juga dapat disesuaikan dengan perkembangan program. Selain itu, terdapat survei pascalulus pelatihan.
<p>Exit Strategy & Keberlanjutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Belum ada <i>exit strategy</i> dari program BLK. ● Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) menyediakan aplikasi SIAPkerja yang berisi informasi lowongan kerja, konseling, dan acara untuk peserta pascaprogram. ● Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) membentuk Ikatan Alumni sebagai wadah komunikasi dan kegiatan informal, yang dilengkapi dengan grup WhatsApp untuk mempererat hubungan antarlumni.

- PENA
- YEISS
- ATENSI Kewirausahaan
- PLUT
- Kelapa Muda
- Pembiayaan UMi
- Berdaya Ekomas
- Refor ma Agrari
- Perhutanan Sosial
- Dana Desa
- PBK**
- Kartu Prakerja
- BUMDes

Kartu Prakerja

Keterampilan Vokasional

Program Nasional. Sampel kajian:

Jawa Barat

Kementerian Lembaga Terkait :

Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian

PENA

YESS

ATENSI
Kewirausahaan

PLUT

Kelapa
Muda

Pembiayaan
UMI

Berdaya
Ekomas

Refor
ma
Agrari

Perhutanan
Sosial

Dana
Desa

PBK

Kartu
Prakerja

BUMDes

Tujuan :

Mengembangkan kompetensi pencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena PHK, dan/atau pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

Target Sasaran :

Pencari Kerja

Kelompok Rentan

- Masyarakat usia produktif, pekerja, dan pencari kerja yang ingin meningkatkan keterampilan kerja, terutama mereka yang belum memiliki akses ke pelatihan formal.

Tahapan Pelaksanaan Program:

Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> Pedoman pelaksanaan program Kartu Prakerja diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022. Belum terdapat kebijakan inklusif yang eksplisit dalam program Kartu Prakerja.
Asesmen	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen pelaksana (PMO) bertanggung jawab untuk melakukan asesmen terhadap calon penerima Kartu Prakerja, lembaga pelatihan, <i>platform</i> digital, dan mitra pembayaran. Data sekunder (BPS) mencakup kebutuhan akan peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja, serta kebutuhan akan akses yang lebih luas terhadap pelatihan. Penilaian kesesuaian peserta dan kriteria dilihat dari Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi program Kartu Prakerja dilakukan oleh mitra <i>platform</i> digital yang bekerja sama dengan manajemen pelaksana program Kartu Prakerja.
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> Program Kartu Prakerja bekerja sama dengan mitra untuk memberikan pelatihan. Sistem verifikasi memastikan peserta yang memenuhi kriteria berhak mendapatkan akses ke program. Tata kelola dan SOP manajemen mitra pelatihan diintegrasikan ke dalam sistem digital (Sistem Manajemen Pembelajaran/<i>Learning Management System</i>). Pelatihan dilakukan secara daring dengan beragam pilihan kursus dari berbagai mitra pelatihan. Peserta yang sudah menyelesaikan pelatihan berhak mendapatkan insentif.
Monev	<ul style="list-style-type: none"> Proses pelaporan, monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin melalui internal dan <i>dashboard</i> sistem untuk memantau efektivitas program. Belum ada monitoring peserta setelah menyelesaikan pelatihan.
Exit Strategy & Keberlanjutan	<ul style="list-style-type: none"> Belum ada rencana strategi keberlanjutan dan <i>exit strategy</i> untuk program Kartu Prakerja. Peserta yang telah menyelesaikan pelatihan akan mendapatkan sertifikat dan dinyatakan lulus pelatihan.

BUMDes

Badan Usaha Milik Desa

Pemberian Modal

Program Nasional. Sampel kajian:

Sumatera Utara dan
Papua Barat Daya

Kementerian Lembaga Terkait :

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, & Transmigrasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tujuan :

BUMDes bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan usaha masyarakat desa dengan penyediaan modal melalui Dana Desa.

Target Sasaran : **Masyarakat Desa**

- Masyarakat desa yang ingin mengembangkan usaha melalui BUMDes.

Tahapan Pelaksanaan Program:

Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat dokumen panduan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). • Kebijakan inklusif dalam program BUMDes sangat bergantung pada masing-masing kepala desa.
Asesmen	<ul style="list-style-type: none"> • Fase awal perumusan dan identifikasi peluang sering kali hanya melibatkan perangkat desa, tanpa keterlibatan masyarakat. • Pembentukan BUMDes selalu dilakukan melalui musyawarah desa dengan melibatkan pemangku kepentingan lokal. • Kegiatan asesmen dimulai dengan usaha simpan pinjam untuk meningkatkan produktivitas dan membantu masyarakat miskin. Namun, kegiatan ini kemudian beralih ke pemberian modal berupa alat kerja produktif, seperti bibit dan peralatan nelayan, akibat banyaknya pinjaman macet. • Pengurus dan anggota dipilih dari masyarakat yang membutuhkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup.
Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi program BUMDes dilakukan melalui musyawarah desa.
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan masyarakat pada kepala desa masih tinggi. • Pengurus BUMDes masih memerlukan pelatihan manajemen agar mampu menghasilkan produk dengan inovasi baru. • Kemitraan BUMDes sangat bergantung pada masing-masing kepala desa. Beberapa desa telah bermitra dengan pihak swasta melalui program CSR, seperti BUMDes Desa Arar yang bekerja sama dengan Petrogas. • Menyelenggarakan pelatihan terkait kewirausahaan dan produksi. • Menyalurkan pemberian modal melalui Dana Desa. • Melakukan musyawarah kelompok untuk menyusun rencana kerja. • Melibatkan pemangku kepentingan terkait untuk mendukung terlaksananya program. • Memberikan pelatihan pembuatan produk olahan bagi pengurus dan anggota BUMDes. • Menyusun kontrak pembelian produk BumDes dengan pihak ketiga. • Melakukan monitoring rutin terkait produksi untuk memastikan target terpenuhi.

<p>Monev</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Intensitas monitoring dan evaluasi disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan dari pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) yang penting. ● Kepala Desa berperan sebagai pengawas dan penasihat BUMDes, dengan tanggung jawab memastikan BUMDes dikelola dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa. ● Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa, termasuk dalam hal pembinaan dan pengelolaan BUMDes.
<p>Exit Strategy & Keberlanjutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Beberapa BUMDes telah bekerja sama dengan pihak swasta untuk mendukung keberlangsungan program. ● BUMDes dapat berkembang dengan baik jika didukung oleh kemampuan dan kemauan masyarakatnya. ● BUMDes berpotensi menjadi badan usaha yang menyerap tenaga kerja lokal secara efektif. Namun, ketergantungan masyarakat yang masih tinggi kepada kepala desa bisa menjadi kendala. Jika kepala desa tidak menjabat kembali, ada risiko program yang telah dirintis dapat berhenti dan terbengkalai.

- PENA
- YEISS
- ATENSI Kewirausahaan
- PLUT
- Kelapa Muda
- Pembiayaan UMi
- Berdaya Ekomas
- Refor ma Agrari
- Perhutanan Sosial
- Dana Desa
- PBK
- Kartu Prakerja
- BUMDes**

2.1.2 Gambaran Umum: Program Non-pemerintah

Program nonpemerintah yang dikaji dalam kajian ini adalah PESADA dan PR YAKKUMYAKKUM. Masing-masing program ini memiliki dua model intervensi. Model intervensi PESADA adalah peningkatan kapasitas berupa pendidikan kritis mengenai hak-hak wanita dan pemberian modal melalui Koperasi Credit Union. Sementara itu, PR YAKKUM memberikan peningkatan kapasitas kepada kaum penyandang disabilitas dan juga pendampingan sosial.

PR YAKKUM dan PESADA, sebagai program non-pemerintah, memiliki pendekatan yang berbeda dengan program pemerintah dalam memberdayakan masyarakat. Salah satu perbedaan utama adalah kemampuan mereka untuk menciptakan *sense of belonging* kepada penerima manfaat. AKKUMPR YAKKUM, yang berfokus pada penyandang disabilitas, menciptakan rasa kebersamaan dan saling mendukung antar peserta melalui pendampingan dan lokakarya (*workshop*) yang inklusif. Sementara itu, PESADA membangun *sense of belonging* melalui pembentukan koperasi yang menyediakan akses permodalan, pelatihan, dan dukungan usaha bagi perempuan akar rumput.

Sense of belonging memiliki peran krusial dalam meningkatkan motivasi penerima manfaat untuk mau berubah dan mencapai kemandirian. Ketika penerima manfaat merasa menjadi bagian dari suatu komunitas, mereka cenderung lebih termotivasi untuk meningkatkan kapasitas diri, mengembangkan usaha, dan berkontribusi pada kesuksesan program. Rasa kebersamaan dan dukungan dari sesama penerima manfaat juga memberikan kekuatan ekstra bagi mereka untuk menghadapi tantangan dan mencapai tujuan bersama.

PESADA

Perkumpulan Sada Ahmo

Pendampingan Sosial

Akses Modal

Program Nasional. Sampel kajian:

Sumatera Utara

Tujuan :

PESADA bertujuan untuk mewujudkan kekuatan ekonomi dan politik perempuan akar rumput yang setara, adil gender, inklusif, berkelanjutan, dan berpengaruh dari tingkat lokal hingga global.

Target Sasaran :

Kelompok Miskin

Perempuan

- Perempuan akar rumput, terutama yang berada di wilayah perdesaan, melalui penguatan ekonomi berbasis koperasi.
- Perempuan yang ingin meningkatkan kesadaran kritis, kepemimpinan, serta partisipasi dalam ekonomi, politik, dan advokasi gender.

Tahapan Pelaksanaan Program:

Perencanaan	Program ini memiliki AD/ART serta Ketentuan Anggota sebagai pedoman komunitas dan peminjaman.
Asesmen	<p>Pelaksana lapangan di setiap daerah melakukan pendekatan melalui pelayanan publik, seperti puskesmas, untuk melihat situasi dan kondisi perempuan kelompok miskin.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksana lapangan mengumpulkan data terkait kekerasan dalam rumah tangga dan kondisi perempuan di keluarga.
Persiapan	Sosialisasi program dilakukan secara langsung selama proses asesmen melalui pelayanan umum.
Pelaksanaan	<p>Program dijalankan melalui pembentukan Koperasi Kredit Usaha Bersama (KUB), yang kemudian berubah nama menjadi Koperasi PESADA Perempuan Tangguh (KESADANTA). Koperasi ini menyediakan akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, dan dukungan usaha bagi perempuan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selain itu, anggota koperasi juga diwajibkan mengikuti pendidikan kritis dan pelatihan yang berfokus pada isu-isu gender, hak-hak perempuan, dan kepemimpinan. • Adanya dukungan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin di berbagai tingkatan, baik di dalam koperasi, komunitas, maupun politik formal. • PESADA bermitra dengan beberapa lembaga dan organisasi nonpemerintah. Salah satunya adalah INKLUSI. • Pelatihan yang diberikan adalah pelatihan usaha dan pendidikan kritis. • Pendampingan yang diberikan adalah pendampingan sosial untuk menghadapi isu-isu kekerasan dalam rumah tangga. • Melalui Koperasi PESADA Perempuan Tangguh (KESADANTA), program ini juga memberikan akses pinjaman modal dan usaha.

<p>Monev</p>	<p>Monev dilakukan melalui rapat reguler, ulasan (<i>review</i>) kegiatan anggota, dan evaluasi perencanaan.</p>
<p>Exit Strategy & Keberlanjutan</p>	<p>PESADA mendirikan KESADANTA untuk memastikan keberlanjutan program.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selama koperasi masih berjalan, pendidikan kritis yang diberikan dan akses modal akan terus berlanjut. • Anggota yang terbukti melanggar aturan yang sudah ditetapkan akan dikeluarkan dari program.

PR YAKKUM

Pusat Rehabilitasi Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum

Pelatihan Keterampilan

Pendampingan Sosial

Program Nasional. Sampel kajian:

Papua Barat Daya

Tujuan :

Meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas, memperbaiki aksesibilitas terhadap pelayanan publik, dan mendorong inklusivitas sosial.

Target Sasaran :

Kelompok Rentan

- Penyandang disabilitas terutama tuna rungu dan wicara.

Tahapan Pelaksanaan Program:

Perencanaan	<p>Terdapat panduan program PR YAKKUM.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan inklusif dari program ini lebih diarahkan ke penyandang disabilitas
Asesmen	<p>Saat <i>needs assessment</i>, terdapat pendekatan langsung kepada penerima manfaat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PR YAKKUM, melalui mitra lokalnya Yayasan BICARA, melakukan <i>needs assessment</i> menggunakan data sekunder dan pendataan langsung ke rumah-rumah. Yayasan BICARA juga bekerja sama dengan tim SHG dan RT untuk melakukan pendataan disabilitas. Pendataan ini bertujuan untuk memperoleh data terpilih yang lebih valid sebagai bahan advokasi ke dinas terkait.
Persiapan	<p>Sosialisasi program dilakukan saat asesmen kepada calon penerima manfaat secara langsung</p>
Pelaksanaan	<p>Menyediakan pendamping yang dapat berkomunikasi dalam bahasa isyarat untuk memfasilitasi partisipasi aktif penyandang disabilitas, terutama mereka yang memiliki hambatan pendengaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pendampingan dan lokakarya (<i>workshop</i>) yang berfokus pada dukungan emosional dan peningkatan pengetahuan praktis bagi peserta. • Melakukan pendekatan langsung kepada kelompok yang kesulitan mengakses layanan untuk memastikan mereka mendapatkan intervensi yang diperlukan. • Menjalin kemitraan dengan perangkat desa. seperti lurah. Selain itu, PR YAKKUM juga bermitra dengan lembaga nonpemerintah, seperti INKLUSI. • Menyelenggarakan pelatihan bahasa isyarat tidak hanya bagi penyandang tuna rungu dan wicara, tetapi juga untuk anggota keluarga mereka. • Melakukan pendampingan sosial untuk meningkatkan kepercayaan diri kelompok penyandang disabilitas.

<p>Monev</p>	<p>Melakukan evaluasi berkala untuk menilai partisipasi dan kemajuan peserta, dengan tujuan memastikan mereka merasa didukung dan termotivasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Memetakan produk dan keterampilan yang diminati pasar untuk meningkatkan produksi dan partisipasi. ● Melakukan evaluasi berkala terhadap partisipasi dan kemajuan peserta.
<p>Exit Strategy & Keberlanjutan</p>	<p>Keberlanjutan dilakukan dengan penguatan bahasa isyarat dan peningkatan aksesibilitas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Belum ada rencana <i>exit strategy</i>. ● Memperkuat jejaring pendukung bagi penyandang disabilitas, baik di tingkat komunitas maupun keluarga. ● Mendorong pemerintah daerah untuk lebih peduli dan mendukung pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, sesuai dengan prinsip GEDSI.

2.2 Hasil Analisis

Berikut adalah rangkuman analisis berbagai program pemberdayaan yang mencakup tahapan utama dalam perencanaan, asesmen, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi (monev). Analisis ini menyoroti aspek-aspek penting seperti penggunaan data sekunder dan primer dalam asesmen, kesiapan program sebelum implementasi, serta berbagai intervensi dalam peningkatan akses, pengembangan keterampilan, dan pendampingan. Selain itu, sistem monev juga dikaji, baik dalam bentuk digital maupun manual, serta strategi keberlanjutan atau *exit strategy* yang diterapkan.

Perlu dicatat bahwa program-program yang dianalisis dalam tabel ini adalah program-program yang telah dikunjungi secara langsung dalam kegiatan lapangan. **Analisis ini tidak mencakup kajian terhadap program di level nasional, melainkan fokus pada implementasi nyata di berbagai daerah.**

Program	Perencanaan	Asesmen		Persiapan	Pelaksanaan			Monev		Exit Strategy
		Data Sekunder	Data Primer		Peningkatan Akses	Pengembangan Keterampilan	Pendampingan	Digital	Manual	
PENA	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✓
YESS	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ATENSI Kewirausahaan	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✓
PLUT	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✗
Kelapa Muda	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓
Pembiayaan UMi	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗
Berdaya Ekomas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗
Reforma Agraria	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗
Perhutanan Sosial	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗
Dana Desa	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗
PBK	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗
Kartu Prakerja	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗
BUMDes	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓
PESADA	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
PR YAKKUM	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✗

- **Program dengan tahapan kurang komprehensif (1-5)**

Kategori ini masih menghadapi tantangan dalam perencanaan, pelaksanaan, atau evaluasi. Aspek penting seperti data primer, kesiapan implementasi atau strategi keberlanjutan belum optimal. Perbaikan diperlukan agar dampaknya lebih besar dan berkelanjutan.

- **Program dengan tahapan cukup komprehensif (6-7)**

Kategori ini memiliki struktur yang solid dan mencakup sebagian besar tahapan pemberdayaan. Meski ada kelemahan, seperti kurangnya integrasi dalam monitoring atau pendampingan. Dengan sedikit perbaikan, program ini bisa lebih optimal.

- **Program dengan tahapan sangat komprehensif (8-10)**

Kategori ini mencakup program-program yang telah menerapkan pendekatan pemberdayaan secara komprehensif di lapangan. Dari tahap perencanaan yang berbasis data hingga strategi exit yang jelas.

Program	Hasil Analisis
<p>PENA</p> <p>Tahapan cukup komprehensif</p>	<p>Capaian Program</p> <ul style="list-style-type: none"> Di Nusa Tenggara Barat, PENA menargetkan 1.500 KPM pada tahun 2023 (Kementerian Sosial, 2023) <p>Praktik Baik</p> <ul style="list-style-type: none"> Program memiliki perencanaan yang matang dan berkelanjutan. Program juga melibatkan masyarakat luas memastikan bahwa program relevan dengan kebutuhan lokal dan mendorong partisipasi aktif. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKSMA) memungkinkan pemantauan program secara efisien dan akurat serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program. Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 7 Tahun 2023 memberikan landasan hukum yang kuat untuk keberlanjutan program. <p>Tantangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ketidakakuratan data dapat mengganggu efektivitas program, karena keputusan yang diambil mungkin tidak berdasarkan informasi yang benar. Ketimpangan remunerasi pendamping dan kurangnya peran aktif Dinas Sosial dapat menyebabkan kurangnya koordinasi dan dukungan dari pemerintah daerah Tidak ada ketentuan untuk observasi / mempertahankan kenaikan income KPM. Ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat membuat program rentan terhadap perubahan kebijakan atau keterbatasan anggaran.
<p>YESS</p> <p>Tahapan sangat komprehensif</p>	<p>Capaian Program</p> <ul style="list-style-type: none"> Pada tahun 2023, YESS telah memberikan pelatihan kepada 1.697 petani milenial di Jawa Barat (Kementerian Pertanian, 2023) YESS juga telah membantu sejumlah petani muda untuk mendapatkan akses pembiayaan dan pasar. <p>Praktik Baik</p> <ul style="list-style-type: none"> Analisis dan perekrutan CPM dilakukan langsung oleh pendamping memungkinkan pendamping untuk lebih memahami kondisi dan kebutuhan calon penerima manfaat. Interaksi langsung dapat meningkatkan ketepatan sasaran program dan membangun hubungan kepercayaan. Monitoring melalui sistem MIS, forum koordinasi, dan kunjungan lapang memberikan gambaran yang komprehensif tentang kemajuan program. Sistem MIS (Management Information System) menyediakan data terstruktur, forum koordinasi memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi, dan kunjungan lapangan memungkinkan observasi langsung. Fokus pada penguatan kelembagaan di daerah memastikan bahwa program memiliki kapasitas untuk berlanjut setelah dukungan eksternal berakhir. Program baru yang relevan juga menunjukkan kemampuan adaptasi dan inovasi. <p>Tantangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mutasi unit kerja dapat mengganggu kontinuitas program dan mengurangi efektivitas implementasi. Ketergantungan pada donor menimbulkan risiko ketidakstabilan pendanaan dan keberlanjutan program jangka panjang. Ketergantungan pada data primer saja membatasi pemahaman konteks program. Data sekunder dapat memberikan informasi tambahan tentang tren, demografi, dan faktor lain yang relevan. Sebagai <i>pilot project</i>, ada kemungkinan bahwa program belum memiliki sistem dan prosedur yang sepenuhnya mapan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan tantangan dalam pelaksanaan.

Program	Hasil Analisis
<p>ATENSI Kewirausahaan</p> <p>Tahapan kurang komprehensif</p>	<p>Capaian Program</p> <ul style="list-style-type: none"> Di Papua Barat Daya, ATENSI Kewirausahaan menargetkan 1.000 penerima manfaat pada tahun 2023 (Kementerian Sosial, 2023) <p>Praktik Baik</p> <ul style="list-style-type: none"> UPT melakukan need assessment dengan data dinas sosial dan pemetaan potensi: Hal ini menunjukkan upaya untuk memahami kebutuhan dan potensi peserta secara menyeluruh. Penggunaan data dinas sosial dan pemetaan potensi membantu dalam merancang program yang relevan. Kunjungan lapangan ketika ada laporan masalah dari penerima manfaat dan penunjukan koordinator meningkatkan efektivitas pemantauan dan koordinasi program. Hal ini memungkinkan respons yang cepat terhadap masalah yang muncul. UPT mengumpulkan data monev dan laporan dari pendamping dan pendamping melaporkan aktivitas dan kasus kepada UPT memastikan adanya informasi yang terdokumentasi dengan baik. <p>Tantangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ketergantungan pada data DTKS Kemensos yang kurang akurat dapat mengurangi efektivitas program dalam menargetkan penerima manfaat yang tepat. Kurangnya verifikasi data sekunder dapat mengurangi validitas informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan program. Kurangnya strategi keberlanjutan dan <i>exit strategy</i> dapat menyebabkan hilangnya dampak positif program setelah selesai. Ketergantungan program pada pembiayaan utama tanpa inisiatif pencarian pembiayaan alternatif dapat menyebabkan kerentanan terhadap perubahan anggaran dan mengancam stabilitas program.
<p>PLUT</p> <p>Tahapan cukup komprehensif</p>	<p>Capaian Program:</p> <ul style="list-style-type: none"> Di Jawa Barat, terdapat 27 PLUT yang tersebar di berbagai kabupaten/kota (kementerian Koperasi dan UKM, 2023). <p>Praktik Baik</p> <ul style="list-style-type: none"> Upaya komprehensif dalam mengidentifikasi kebutuhan UMKM melalui <i>need assessment</i> dengan berbagai metode, seperti permintaan langsung, survei, masukan DPR, dan Dinsos, memastikan informasi yang beragam dan representatif. Keberadaan program <i>fast track</i> yang membantu digitalisasi UMKM, disertai pendampingan, pelatihan, dan <i>business matchmaking</i>, menunjukkan komitmen untuk mendukung UMKM dalam berbagai aspek pengembangan usaha, termasuk adaptasi dengan teknologi digital. Meskipun evaluasi UMKM dilakukan dengan beragam metode, pembakuan metode yang jelas dan terstruktur, seperti metode pra/pasca atau pra-tengah-pasca evaluasi, akan lebih efektif dalam mengukur perkembangan UMKM. <p>Tantangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kurangnya keterbukaan UMKM dapat menyebabkan analisis kebutuhan yang kurang akurat dan program yang kurang relevan. Kehadiran UMKM yang tidak konsisten dalam pelatihan, karena bergantung pada keinginan pemilik, menyebabkan hasil pelatihan menjadi kurang optimal. Ketiadaan strategi keberlanjutan dan <i>exit strategy</i> pada program PLUT dapat menyebabkan terhentinya program atau hilangnya dampak positif yang telah dicapai.

Program	Hasil Analisis
<p>Kelapa Muda</p> <p>Tahapan cukup komprehensif</p>	<p>Capaian Program</p> <ul style="list-style-type: none"> • Di Sumatera Utara, Kelapa Muda telah membentuk 150 kelompok perempuan (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, 2023). • Kelapa Muda telah memberikan pelatihan dan pendampingan kepada ribuan perempuan di bidang leadership, critical thinking, dan life skills. <p>Praktik Baik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program yang melibatkan elemen desa seperti PKK, lembaga masyarakat, dan warga dalam identifikasi masalah menunjukkan prioritas pada partisipasi masyarakat, identifikasi kebutuhan riil, dan pembangunan rasa kepemilikan. • Struktur program Rumah NUSA yang jelas dengan penyusunan modul, penganggaran, pelatihan, dan pendampingan menunjukkan pendekatan yang sistematis dan terencana. • Masuknya Program Kelapa Muda dalam Kegiatan Strategi Daerah (KSD) menandakan pengakuan dan agenda perencanaan daerah, sehingga menjamin keberlanjutan program. <p>Tantangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pemahaman perangkat desa dalam kegiatan pemberdayaan perempuan menghambat pelaksanaan dan dampak program, sehingga perlu peningkatan kapasitas dan sosialisasi intensif. • Resistensi sosial dari kaum laki-laki terhadap program Kelapa Muda dapat menghambat partisipasi dan efektivitasnya, sehingga memerlukan strategi seperti dialog dan sosialisasi luas untuk mengatasi resistensi tersebut. • Kurangnya strategi keberlanjutan dan <i>exit strategy</i> dapat menyebabkan hilangnya dampak positif program setelah selesai. • Ketergantungan program pada pembiayaan utama tanpa inisiatif pencarian pembiayaan alternatif dapat menyebabkan kerentanan terhadap perubahan anggaran dan mengancam stabilitas program.
<p>Pembiayaan UMi</p> <p>Tahapan cukup komprehensif</p>	<p>Capaian Program</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada tahun 2023, Pembiayaan UMi telah menyalurkan pembiayaan kepada 7 juta usaha ultra mikro di seluruh Indonesia (PIP, 2023). <p>Praktik Baik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan pendekatan komunitas dan integrasi data ke Pusat Informasi Pinjaman (PIP) secara efektif menjangkau sasaran dan meningkatkan transparansi serta efisiensi pengelolaan data. • Pendekatan kelompok dan sanksi sosial mendorong tanggung jawab bersama dan meminimalkan risiko kredit macet. • Pemantauan pengembalian dan kelayakan kredit serta dampak pada usaha merupakan langkah positif untuk meminimalkan kredit macet dalam kegiatan peminjaman modal. <p>Tantangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya sosialisasi program UMi dan ketiadaan pelatihan usaha menghambat pemahaman masyarakat dan pengembangan keterampilan usaha penerima manfaat. • Kehadiran UMKM yang tidak konsisten dalam pelatihan, karena bergantung pada keinginan pemilik, menyebabkan hasil pelatihan menjadi kurang optimal. • Ketidadaan mekanisme yang jelas untuk naik kelas ke KUR menghambat motivasi penerima manfaat mengembangkan usaha.

Program	Hasil Analisis
<p>Berdaya Ekomas</p> <p>Tahapan cukup komprehensif</p>	<p>Capaian Program</p> <ul style="list-style-type: none"> Di Papua Barat Daya, Berdaya Ekomas telah memberikan bantuan modal usaha kepada 1.000 IKM dan UKM pada tahun 2023 (Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Papua Barat Daya, 2023). <p>Praktik Baik</p> <ul style="list-style-type: none"> Keterlibatan kepala distrik dan lurah dalam menggali praktik baik IKM dan UKM membantu mengidentifikasi praktik terbaik dan kebutuhan riil, sehingga program lebih tepat sasaran. Kolaborasi yang kuat dengan instansi pendanaan seperti Bank Papua memperkuat kapasitas program dalam menyediakan akses pembiayaan bagi IKM/UKM. Ketiadaan perencanaan <i>exit strategy</i> dapat menyebabkan ketidakberlanjutan program setelah periode tertentu. <p>Tantangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Penjangkauan IKM/UKM di daerah terpencil menjadi tantangan, sehingga menyebabkan ketidakmerataan akses program. Perubahan model bisnis UKM dan IKM yang sering terjadi menyulitkan pemantauan dan evaluasi dampak program, sehingga memerlukan fleksibilitas pendekatan program. Kurangnya strategi keberlanjutan dan <i>exit strategy</i> dapat menyebabkan hilangnya dampak positif program setelah selesai. Ketergantungan program pada pembiayaan utama tanpa inisiatif pencarian pembiayaan alternatif dapat menyebabkan kerentanan terhadap perubahan anggaran dan mengancam stabilitas program.
<p>Reforma</p> <p>Tahapan cukup komprehensif</p>	<p>Capaian Program:</p> <ul style="list-style-type: none"> Di Sumatera Utara, Reforma Agraria telah meredistribusikan 10.000 hektar lahan kepada petani kecil dan masyarakat adat pada tahun 2023 (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2023). <p>Praktik Baik</p> <ul style="list-style-type: none"> Penggunaan berbagai metode <i>need assessment</i> seperti aplikasi, <i>google form</i>, Musrembang, dan survei pemetaan sosial oleh Reforma Agraria menunjukkan upaya komprehensif dalam mengumpulkan data dan memahami kebutuhan masyarakat, sehingga memastikan program lebih tepat sasaran. transparansi serta efisiensi pengelolaan data. Struktur program Reforma Agraria yang jelas dengan tiga tahap, yaitu pemetaan aset, pemetaan akses, dan penyelesaian konflik, memungkinkan pelaksanaan program secara sistematis dan terarah, fokus pada aspek-aspek penting dalam reforma agraria. Kombinasi pelaporan digital melalui aplikasi dan kunjungan lapangan memastikan pemantauan kemajuan program Reforma Agraria yang efektif dan akurat. <p>Tantangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kurangnya kolaborasi antar lembaga menghambat koordinasi dan pelaksanaan program, sehingga diperlukan upaya untuk memperkuat sinergi antar lembaga terkait. Ketiadaan strategi keberlanjutan yang konkrit menyebabkan dampak positif program tidak bertahan lama dan memerlukan perencanaan matang untuk memastikan manfaat jangka panjang bagi penerima. Keterlibatan mitra dari luar kedinasan, seperti organisasi masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat, dapat meningkatkan kapasitas dan efektivitas pelatihan serta pendampingan program Reforma Agraria, yang saat ini hanya bekerja sama dengan kedinasan.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Papua Barat Daya, Laporan Kinerja Program Berdaya Ekomas (Sorong: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Papua Barat Daya, 2023).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Laporan Kinerja Program Reforma Agraria (Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2023).

Program	Hasil Analisis
<p>Perhutanan Sosial</p> <p>Tahapan cukup komprehensif</p>	<p>Capaian Program:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Di Nusa Tenggara Barat, Perhutanan Sosial telah memberikan akses legal kepada 50 KPS untuk mengelola 20.000 hektar hutan pada tahun 2023 (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023). <p>Praktik Baik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan partisipatif dalam identifikasi hutan adat dan pelibatan masyarakat adat memastikan kesesuaian program dengan kebutuhan serta aspirasi mereka, sekaligus membangun rasa kepemilikan. • Pendekatan kegiatan yang luas mulai dari identifikasi kebutuhan hingga pengembangan usaha perhutanan sosial dalam program perhutanan sosial, menunjukkan pendekatan yang menyeluruh dalam pemberdayaan masyarakat. • Adanya sistem monitoring berbasis web yang terintegrasi dengan goKUPS meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemantauan kemajuan program. <p>Tantangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jangka waktu monitoring Perhutanan Sosial (PS) yang terlalu lama, yaitu berdasarkan Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) per 10 tahun, dapat menyebabkan kurangnya respons terhadap perubahan kondisi di lapangan dan memerlukan monitoring yang lebih sering dan adaptif. • Meskipun legalitas pengelolaan akses hutan langsung dari masyarakat penting, penggunaan data sekunder sebagai data pendukung tetap dianjurkan. • Ketidadaan <i>exit strategy</i> dari program ini dapat menyebabkan ketidakberlanjutan program dan hilangnya dampak positif yang telah dicapai.
<p>Dana Desa</p> <p>Tahapan kurang komprehensif</p>	<p>Capaian Program</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dana Desa telah disalurkan ke seluruh desa di Indonesia sejak tahun 2015. • Dana Desa telah digunakan untuk membangun infrastruktur, mengembangkan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2023). <p>Praktik Baik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Musyawarah desa serta tim survei dan verifikasi yang terlibat dalam <i>need assessment</i> memastikan kesesuaian program dengan kebutuhan riil masyarakat desa dan membangun rasa kepemilikan. • Keterlibatan seluruh unsur produktif desa, seperti LKMD, Perangkat Desa, dan Karang Taruna memperkuat partisipasi masyarakat dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. • Adanya kebijakan yang mengatur keberlanjutan dana desa menjadi poin penting untuk menjamin keberlanjutan program. <p>Tantangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya fokus pada pelatihan dan pengembangan keterampilan dalam program Dana Desa dapat membatasi dampak jangka panjang dan memerlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam mengelola Dana Desa dan mengembangkan potensi ekonomi lokal. • Konflik kepentingan dan resistensi dalam identifikasi masalah dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang tepat, sehingga diperlukan mekanisme yang transparan dan akuntabel. • Kurangnya dukungan teknis dalam penyusunan laporan menyebabkan laporan sering terlambat dan kurang maksimal.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Laporan Kinerja Perhutanan Sosial (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023).
 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Laporan Kinerja Dana Desa (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2023).

Program	Hasil Analisis
<p>PBK</p> <p>Tahapan cukup komprehensif</p>	<p>Capaian Program</p> <ul style="list-style-type: none"> ● PBK telah melatih ribuan tenaga kerja di berbagai bidang (Kementerian Ketenagakerjaan, 2023). <p>Praktik Baik</p> <ul style="list-style-type: none"> ● TNA dan FGD membantu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan secara akurat dan partisipatif, memastikan program relevan dengan kebutuhan pasar kerja. ● Standardisasi dan SOP menjamin kualitas dan konsistensi program. Adanya kuota dan pelatihan khusus untuk difabel menunjukkan komitmen terhadap inklusivitas dan kesetaraan kesempatan. ● Review kinerja berkala dengan indikator yang adaptif memungkinkan program untuk terus belajar dan berkembang. Survei pasca pelatihan memberikan umpan balik berharga tentang dampak dan efektivitas program. ● Dukungan pasca program meningkatkan peluang kesuksesan peserta dalam mencari pekerjaan atau berwirausaha. <p>Tantangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Program perlu mengembangkan strategi untuk mengelola jumlah peminat yang besar dan menyesuaikan kurikulum dan metode pelatihan agar sesuai dengan perkembangan industri.
<p>Kartu Prakerja</p> <p>Tahapan cukup komprehensif</p>	<p>Capaian Program:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kartu Prakerja telah diikuti oleh jutaan peserta sejak diluncurkan pada tahun 2020. ● Kartu Prakerja telah membantu meningkatkan kompetensi dan skill angkatan kerja. <p>Praktik Baik</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pemanfaatan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan penilaian kesesuaian peserta membantu memastikan program menjangkau sasaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. ● Fleksibilitas dan variasi pelatihan online memberikan kesempatan bagi peserta untuk memilih pelatihan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Sistem verifikasi peserta membantu menjaga kualitas dan integritas program. ● Sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur memungkinkan pemantauan yang efektif terhadap kemajuan program dan pengambilan keputusan berdasarkan data. <p>Tantangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ketiadaan rencana exit strategy dan keberlanjutan dapat menyebabkan ketidakpastian dan hilangnya manfaat program dalam jangka panjang.

Program	Hasil Analisis
<p>BumDes</p> <p>Tahapan cukup komprehensif</p>	<p>Capaian Program:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah BUMDes yang aktif dan berkelanjutan terus meningkat. • BUMDes telah berkontribusi pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2023). <p>Praktik Baik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melibatkan Musyawarah Desa sehingga melibatkan stakeholder terkait di desa, memastikan bahwa keputusan terkait BUMDes diambil secara partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. • Berpotensi menjadi badan usaha yang menyerap tenaga kerja lokal dan menghasilkan revenue mandiri <p>Tantangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Di fase awal perumusan dan identifikasi peluang seringkali hanya melibatkan perangkat desa. Kurangnya keterlibatan masyarakat luas di awal perencanaan dapat menyebabkan program tidak sesuai dengan kebutuhan riil. • Ketergantungan masyarakat pada kepala desa masih tinggi. Ketergantungan ini dapat menghambat kemandirian BUMDes dan mengurangi partisipasi aktif masyarakat. • Pengurus BUMDes masih kurang pelatihan manajemen agar menghasilkan produk dengan inovasi baru. • Monitoring dan evaluasi disesuaikan intensitasnya berdasarkan kebutuhan dan permintaan dari stakeholder penting. Sistem monitoring dan evaluasi yang tidak teratur dapat menyebabkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas.
<p>Pesada</p> <p>Tahapan sangat komprehensif</p>	<p>Capaian Program</p> <ul style="list-style-type: none"> • PESADA telah membentuk koperasi perempuan dan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada ribuan perempuan di bidang kewirausahaan dan leadership. <p>Praktik Baik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pendekatan melalui pelayanan publik dan sosialisasi langsung. Pendekatan ini memungkinkan program menjangkau sasaran secara efektif dan membangun hubungan baik dengan masyarakat. • Penguatan ekonomi melalui koperasi, peningkatan kesadaran kritis, dan pengembangan kepemimpinan. • Penggunaan Credit Union (CU) dan pendidikan kritis menunjukkan upaya untuk membangun keberlanjutan program dan dampak positif jangka panjang. <p>Tantangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya informasi mengenai monitoring dan evaluasi menghambat pengukuran dampak dan perbaikan program.

Program	Hasil Analisis
<p>PR Yakkum</p> <p>Tahapan cukup komprehensif</p>	<p>Capaian Program</p> <ul style="list-style-type: none"> ● PR YAKKUM telah memberikan pelatihan dan pendampingan kepada ribuan penyandang disabilitas <p>Praktik Baik</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pendekatan langsung memastikan program memahami kebutuhan individu dan membangun hubungan yang kuat dengan penerima manfaat. ● Penyediaan dukungan khusus menunjukkan komitmen program untuk memenuhi kebutuhan unik penerima manfaat. ● Evaluasi yang teratur memungkinkan program untuk memantau kemajuan, mengidentifikasi masalah, dan membuat perbaikan yang diperlukan. ● Fokus pada penguatan bahasa isyarat dan peningkatan aksesibilitas menunjukkan perhatian program terhadap keberlanjutan dampak positif. <p>Tantangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Penggunaan data sekunder yang tidak akurat dapat mengurangi efektivitas program dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan. ● Ketidadaan rencana exit strategy dapat menyebabkan ketidakberlanjutan program setelah periode tertentu.

BAB 3

Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin & Rentan untuk Kemandirian Ekonomi

3.1 Prinsip-Prinsip dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin & Rentan untuk Kemandirian Ekonomi

Program pemberdayaan masyarakat harus memastikan bahwa setiap anggota masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, gender, atau agama, mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, memperoleh akses, kontrol dan manfaat secara adil, setara dan inklusif. Pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan inklusif membutuhkan pedoman yang kuat, yaitu prinsip-prinsip dasar yang memastikan arah kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan. Tanpa prinsip yang jelas, pembangunan dapat berjalan tanpa arah, berisiko meningkatkan ketidaksetaraan, merusak lingkungan, atau gagal menciptakan kesejahteraan yang merata. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan moral dan etika dalam membuat keputusan pembangunan yang memprioritaskan kepentingan rakyat dalam jangka panjang. Adapun prinsip-prinsip dasar yang perlu ditekankan sebagai berikut:



Partisipatif

Pemberdayaan masyarakat harus melibatkan semua anggota masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program, memungkinkan masyarakat memiliki rasa kepemilikan terhadap program dan solusi yang dihasilkan.



Memperhatikan Keberlanjutan

Setiap upaya pemberdayaan masyarakat harus memperhatikan aspek keberlanjutan, baik dalam hal ekonomi, sosial, maupun lingkungan untuk memberikan dampak jangka panjang, tanpa merusak sumber daya alam atau mengorbankan kesejahteraan generasi mendatang.



Menjaga Tata Kelola yang Baik dan Transparan

Setiap program pemberdayaan masyarakat harus dilakukan dengan tata kelola yang baik. Pemerintah dan pelaksana program harus bersikap terbuka dalam pengelolaan dana, sumber daya, dan pencapaian program.



Berorientasi pada Kemandirian Ekonomi

Setiap upaya pemberdayaan masyarakat harus dirancang dengan mengedepankan hasil akhir yang mendorong masyarakat dapat menjadi mandiri secara ekonomi dan terus melakukan pengembangan diri tanpa adanya ketergantungan pada pihak luar.



Inklusif, Adil, dan Setara

Program pemberdayaan masyarakat harus memastikan bahwa setiap anggota masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, gender, atau agama, mendapatkan kesempatan yang sama untuk terlibat dan memperoleh manfaat.



Kemitraan

Pemberdayaan masyarakat membutuhkan kerja sama yang sinergis antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan masyarakat sendiri. Kemitraan yang efektif akan menghasilkan program yang lebih komprehensif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan menerapkan keenam prinsip tersebut, diharapkan program pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan menghasilkan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat. **Kunci keberhasilan program ini adalah kolaborasi dan komitmen dari semua pihak untuk bekerja sama mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya.**

3.2 Kerangka Kerja Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin & Rentan untuk Kemandirian Ekonomi

Pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan adalah proses yang kompleks dan dinamis. Untuk mencapai hasil yang optimal, program pemberdayaan masyarakat harus dirancang dan dilaksanakan secara strategis. Kerangka kerja model pemberdayaan masyarakat menyediakan struktur untuk memastikan program tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Pendekatan

Pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat merupakan cara pandang atau filosofi yang mendasari program pemberdayaan masyarakat.

Pendekatan berbasis hak

Pendekatan berbasis kebutuhan

Model Intervensi

Intervensi dalam pemberdayaan masyarakat merupakan tindakan atau kegiatan konkret yang dilakukan untuk memberdayakan masyarakat.

Pengembangan keterampilan

Peningkatan akses

Pendampingan

Menilai berbagai pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk memastikan program berjalan efektif, relevan, dan berkelanjutan. Setiap komunitas memiliki kebutuhan, tantangan, dan potensi unik, sehingga pendekatan yang dipilih harus kontekstual. Pendekatan berbasis kebutuhan efektif dalam menangani masalah mendesak seperti pemenuhan kebutuhan dasar, sedangkan pendekatan berbasis hak cocok untuk mengatasi akar penyebab ketidakadilan. Pendekatan yang tepat tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi juga mengoptimalkan sumber daya, membangun kepercayaan, dan menciptakan dampak jangka panjang. Selain itu, pendekatan yang relevan juga mendorong masyarakat untuk terlibat aktif, mempercepat proses pemberdayaan masyarakat, dan memastikan perubahan yang bermakna.

Pendekatan dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin & Rentan

Pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi kelompok miskin dan rentan, membutuhkan pendekatan strategis untuk memastikan program yang dirancang mampu menjawab kebutuhan dan tantangan yang dihadapi masyarakat secara efektif. Dua pendekatan utama yang sering digunakan dalam pemberdayaan masyarakat adalah **pendekatan berbasis kebutuhan** dan **pendekatan berbasis hak**.

Namun, penting untuk dicatat bahwa pemberdayaan masyarakat bukanlah proses yang kaku atau linear. Implementasi di lapangan sering kali memerlukan fleksibilitas tinggi untuk menyesuaikan dengan dinamika sosial, budaya, dan ekonomi yang unik di setiap komunitas. Pemahaman mendalam terhadap kedua pendekatan ini menjadi dasar penting untuk merancang program yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi masyarakat.

Pendekatan Berbasis Kebutuhan

Pendekatan berbasis kebutuhan menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar yang menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kebutuhan dasar ini mencakup hal-hal esensial yang diperlukan untuk melangsungkan hidup yang layak, seperti:

- **Pangan:** Akses terhadap makanan yang bergizi dan mencukupi.
- **Sandang:** Akses terhadap pakaian yang layak.
- **Papan:** Akses terhadap tempat tinggal yang aman dan layak huni.
- **Kesehatan:** Akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.
- **Pendidikan:** Akses terhadap pendidikan yang berkualitas.

Target sasaran

Kelompok masyarakat miskin, rentan, dan terpinggirkan yang menghadapi kesulitan dan/atau ketimpangan dalam akses kebutuhan dasar.

Kondisi masyarakat

- Kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan pokok, seperti makanan (pangan), pakaian (sandang), tempat tinggal (papan), pendidikan, dan layanan kesehatan.
- Ketergantungan tinggi pada bantuan eksternal untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Tujuan pendekatan

Memastikan masyarakat dapat mengakses layanan dasar yang layak untuk menciptakan kondisi yang mendukung bagi pemberdayaan masyarakat yang lebih luas di masa depan.

Pendekatan Berbasis Hak

Pendekatan berbasis hak menekankan bahwa setiap orang, termasuk masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi. Hak-hak dasar ini antara lain:

- Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- Hak atas pendidikan.
- Hak atas kesehatan.
- Hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
- Hak untuk hidup bebas dari diskriminasi.

Target sasaran

Kelompok rentan yang menghadapi pelanggaran hak dan diskriminasi, seperti:

- Perempuan
- Anak
- Masyarakat adat
- Penyandang disabilitas

Kondisi masyarakat

- Terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM), seperti eksploitasi tenaga kerja, kekerasan berbasis gender, atau pengusuran paksa.
- Ketidakadilan sosial dan kurangnya pengakuan atas hak-hak individu atau kelompok tertentu.

Tujuan pendekatan

Memberdayakan masyarakat untuk memahami, menuntut, dan memperjuangkan hak-haknya sehingga mereka mampu mengatasi ketidakadilan secara mandiri.

Model Intervensi untuk Masyarakat Miskin dan Rentan dalam Membangun Kemandirian Ekonomi

Intervensi dalam pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan merupakan serangkaian upaya strategis untuk menciptakan perubahan yang signifikan dan berkelanjutan dalam kehidupan mereka. Model intervensi ini dirancang untuk mengatasi hambatan struktural, sosial, dan ekonomi yang menghalangi masyarakat untuk mencapai kemandirian ekonomi yang didasarkan pada analisis kebutuhan yang komprehensif berbasis data yang responsif gender dan inklusif. Tiga komponen utama dalam intervensi pemberdayaan masyarakat adalah pengembangan keterampilan, peningkatan akses, dan pendampingan. Ketiga elemen ini saling melengkapi untuk menciptakan ekosistem pemberdayaan masyarakat yang holistik.



01. Pengembangan Keterampilan

Model ini bertujuan meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja agar selaras dengan kebutuhan pasar yang dinamis. Selain itu, model ini juga menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan membekali individu dengan pengetahuan serta keterampilan untuk memulai dan mengembangkan usaha. Tujuannya adalah meningkatkan daya saing tenaga kerja sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja baru melalui kewirausahaan.

+ Skilling

Memberikan keterampilan kepada individu yang belum memiliki keterampilan atau memiliki keterampilan terbatas.

Sasaran: Pengangguran, lulusan sekolah yang belum bekerja, atau masyarakat yang ingin meningkatkan peluang kerjanya.

Contoh: Pelatihan desain busana, pelatihan produksi tekstil, pelatihan kerajinan tangan yang lebih luas (keramik, merajut, dll), pelatihan teknisi komputer, pelatihan tata boga, pelatihan bahasa asing, dan lain-lain.

↑ Upskilling

Meningkatkan keterampilan yang sudah dimiliki agar lebih relevan dengan perkembangan teknologi dan industri.

Sasaran: Pekerja yang ingin meningkatkan kinerja, mengembangkan karir, atau beradaptasi dengan perubahan di tempat kerja.

Contoh: Pelatihan perangkat lunak (*software*) terbaru, pelatihan manajemen, pelatihan kepemimpinan, lokakarya (*workshop*) peningkatan keterampilan komunikasi, dan lain-lain.

↻ Reskilling

Memberikan keterampilan baru kepada individu yang kehilangan pekerjaan atau ingin beralih profesi karena perubahan struktur ekonomi atau kemajuan teknologi.

Sasaran: Pekerja yang terkena PHK, pekerja di sektor industri yang mengalami kemunduran, atau individu yang ingin beralih ke profesi yang lebih menjanjikan.

Contoh: Pelatihan pemasaran digital (*digital marketing*) bagi pekerja retail, pelatihan pemrograman (*programming*) bagi pekerja manufaktur, dan lain-lain.



Pelatihan Motivasi

Menumbuhkan minat, semangat, dan rasa percaya diri untuk berwirausaha. Pelatihan ini berfokus pada pembentukan pola pikir (*mindset*) dan sikap (*attitude*) yang positif terhadap kewirausahaan.



Pelatihan Manajemen

Memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar tentang manajemen usaha bagi calon wirausahawan atau wirausahawan pemula.



Inkubasi Bisnis

Memberikan pendampingan intensif dan fasilitas bagi wirausahawan pemula agar dapat mengembangkan usaha dan mencapai kemandirian.

02. Pendampingan

Pendampingan adalah proses bimbingan dan dukungan berkelanjutan yang diberikan untuk mengembangkan potensi diri, meningkatkan keterampilan, dan mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat.



Pendampingan Teknis

Berfokus pada pemberian bimbingan teknis sesuai dengan kebutuhan masyarakat, misalnya:

- Pendampingan dalam budi daya pertanian, perikanan, atau peternakan.
- Pendampingan dalam pengolahan hasil pertanian atau perikanan.
- Pendampingan dalam mengembangkan UMKM.
- Pendampingan pemanfaatan teknologi tepat guna.



Pendampingan Sosial

Berfokus pada pemberian dukungan sosial dan psikologis kepada masyarakat, misalnya:

- Pendampingan kelompok.
- Penguatan motivasi dan kepercayaan diri.
- Pengembangan keterampilan sosial dan komunikasi.
- Peningkatan kesadaran akan hak-hak dan kewajibannya.



Pendampingan Manajerial

Berfokus pada peningkatan kapasitas manajemen dan organisasi masyarakat, misalnya:

- Pelatihan manajemen keuangan dan administrasi.
- Pelatihan kepemimpinan dan pengambilan keputusan.
- Pengembangan organisasi dan kelembagaan masyarakat.

03. Peningkatan Akses

Upaya untuk membuka jalan dan mempermudah masyarakat, terutama kelompok yang kurang beruntung, untuk mendapatkan sumber daya dan peluang yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Hal ini melibatkan penghapusan hambatan yang bersifat ekonomi dan sosial.



Akses Pasar

Meningkatkan kemampuan individu atau kelompok untuk mencapai dan berinteraksi dengan pasar untuk menjual produk atau jasa mereka.

- Pembuatan *platform* daring yang memungkinkan UMKM menjual produk mereka ke pasar luas.
- Mengadakan ajang yang memfasilitasi pertemuan antara produsen dan konsumen seperti pameran dan festival.
- Memfasilitasi kerjasama antara UMKM dengan perusahaan besar dalam hal produksi, distribusi, atau pemasaran.



Akses Modal

Meningkatkan kemampuan individu atau kelompok untuk memperoleh sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk memulai atau mengembangkan usaha, atau meningkatkan kualitas hidup.

- Pinjaman dengan bunga rendah kepada UMKM.
- Pinjaman dalam jumlah kecil dengan persyaratan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
- Donasi atau hibah yang diberikan oleh individu atau organisasi untuk mendukung kegiatan atau program tertentu.

3.3 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat Miskin & Rentan untuk Kemandirian Ekonomi

Pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan memerlukan pendekatan yang sistematis untuk menghasilkan dampak yang berkelanjutan. Panduan tahapan dalam proses ini sangat penting agar setiap intervensi berjalan efektif, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan komunitas. Dengan adanya standar yang jelas, program pemberdayaan dapat lebih mudah diimplementasikan, dimonitor, dan dievaluasi, sehingga mendorong kemandirian ekonomi secara bertahap.

3.3.1 Tahapan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

	Perencanaan	Assessment	Persiapan	Pelaksanaan	Evaluasi	Graduasi & Keberlanjutan
Tujuan	Menyiapkan kerangka kerja program pemberdayaan	Mengidentifikasi kebutuhan spesifik masyarakat miskin dan rentan.	Memastikan semua elemen siap untuk pelaksanaan program secara efektif.	Implementasi program sesuai kebutuhan sasaran untuk mendorong perubahan pola pikir & perilaku.	Mengevaluasi pelaksanaan dan dampak program untuk perbaikan dan keberlanjutan.	Memastikan program pemberdayaan memberikan dampak jangka panjang
Aktivitas	<ul style="list-style-type: none"> • Penentuan model intervensi dan target sasaran • Penyusunan kerangka kerja • Penyusunan kerangka kelembagaan • Penentuan kerangka pendanaan • Penyusunan pedoman kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan data sekunder terpilah berdasarkan gender dan inklusi sosial • Identifikasi Pemangku Kepentingan • Pengumpulan data primer dengan metode partisipatif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana monitoring dan evaluasi • Analisa kebutuhan pendamping • Sosialisasi program yang mudah diakses semua kelompok. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kegiatan inti dengan memastikan partisipasi aktif perempuan dan kelompok rentan. • Komunikasi dan resolusi konflik • Penerapan kebijakan inklusif, termasuk aksesibilitas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen data • Analisa data, termasuk dampak program terhadap kesetaraan gender dan inklusi sosial. • Pelaporan 	<ul style="list-style-type: none"> • Graduasi penerima manfaat • Dukungan keberlanjutan dan <i>exit strategy</i>

Proses pemberdayaan ini mencakup berbagai tahapan yang saling terhubung, mulai dari perencanaan hingga keberlanjutan program. Setiap tahap memiliki peran penting dalam memastikan bahwa program tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat miskin dan rentan, tetapi juga mampu mendorong perubahan pola pikir serta meningkatkan kemandirian ekonomi. Dengan pendekatan yang terstruktur dan saling mendukung antar tahap, program pemberdayaan dapat lebih efektif dalam menciptakan dampak jangka panjang yang positif bagi masyarakat.

3.3.2 Tahap Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Rentan untuk Kemandirian Ekonomi

Pada tahap ini, kerangka kerja program disusun secara sistematis dan komprehensif. Perencanaan yang matang akan memandu implementasi program agar berjalan efektif, efisien, dan mencapai tujuan program.



01. Penentuan Kebijakan

Penentuan kebijakan merupakan langkah awal yang krusial dalam perencanaan program pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan. Kebijakan yang dirumuskan dengan baik akan menjadi landasan yang kuat bagi keberhasilan program dan memastikan bahwa program tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan nasional serta kebutuhan masyarakat.

1. **Identifikasi Masalah dan Potensi:** Sebelum menetapkan kebijakan program, perlu dilakukan identifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Identifikasi masalah dapat dilakukan dengan menggunakan data dan informasi yang akurat, seperti data kemiskinan, data pengangguran, dan data lainnya yang relevan. Identifikasi potensi dapat dilakukan dengan melihat sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya yang ada di masyarakat.
2. **Analisis Kebijakan:** Setelah masalah dan potensi teridentifikasi, perlu dilakukan analisis kebijakan untuk menentukan kebijakan program yang tepat.
3. **Perumusan Kebijakan:** Setelah analisis kebijakan selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah merumuskan kebijakan program. Kebijakan program harus dirumuskan secara jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Kebijakan program juga harus dapat diukur dan dievaluasi.
4. **Penetapan Kebijakan:** Setelah kebijakan program dirumuskan, langkah terakhir adalah menetapkan kebijakan program. Kebijakan program harus ditetapkan oleh pihak yang berwenang, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga lainnya yang relevan.

02. Penetapan Target Sasaran dan Model Intervensi

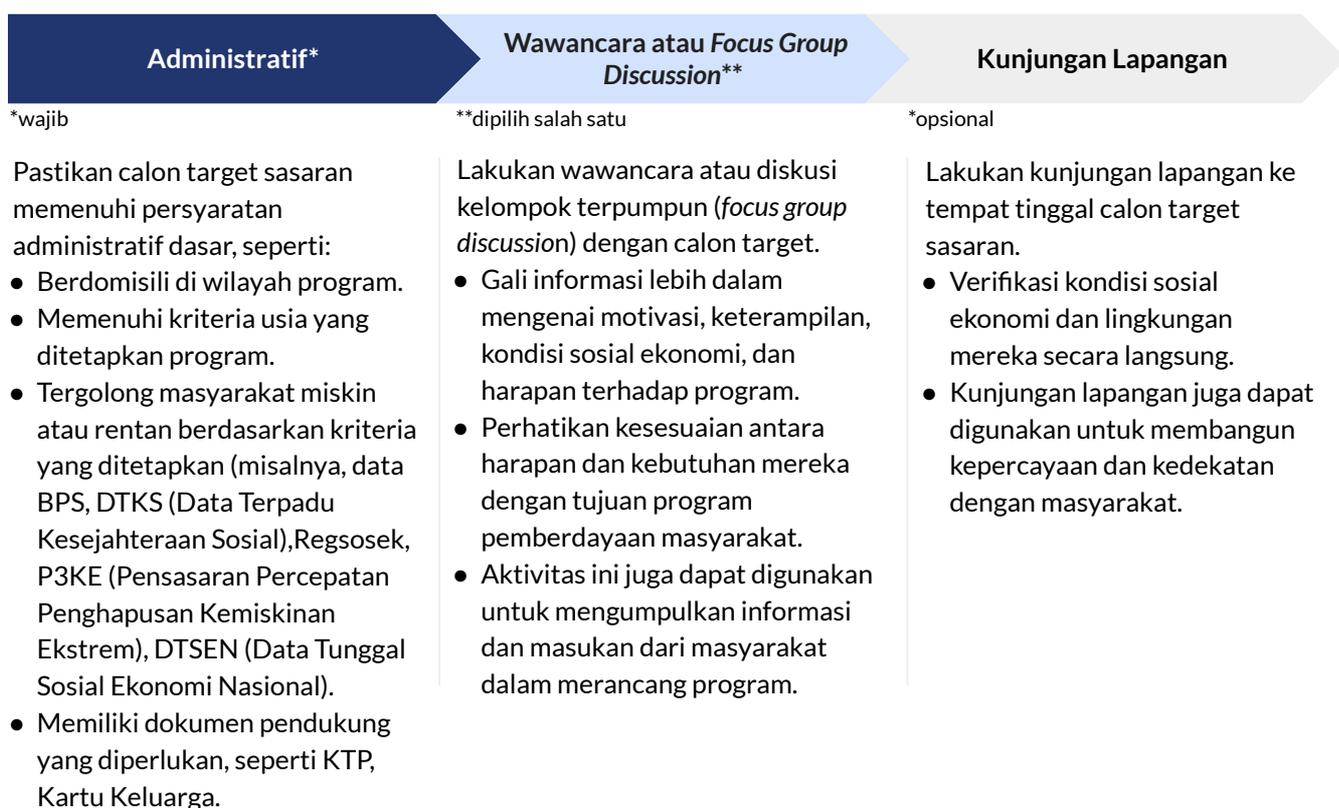
Dalam merancang program pemberdayaan masyarakat yang efektif, terutama untuk mencapai kemandirian ekonomi, identifikasi sasaran dan prioritas program yang tepat sangatlah penting. Seluruh proses identifikasi sasaran dan prioritas program ini harus **berbasis data terpilah yang responsif gender dan inklusif**.

Sasaran Program

Langkah awal yang penting adalah memahami siapa yang akan menjadi penerima manfaat program. Profil sasaran yang komprehensif akan membantu dalam merancang program yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mereka. Berdasarkan data analisis kebutuhan sebelumnya, beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi profil sasaran antara lain:

Tingkat kemiskinan dan kerentanan	<ul style="list-style-type: none"> ● Contoh indikator: pendapatan per kapita, akses terhadap layanan dasar, dan indeks multidimensi kemiskinan. ● Prioritaskan masyarakat dengan tingkat kemiskinan dan kerentanan yang lebih tinggi.
Potensi untuk berkembang	<ul style="list-style-type: none"> ● Faktor yang perlu diperhatikan adalah motivasi, keterampilan, dan akses terhadap sumber daya. ● Prioritaskan masyarakat yang memiliki motivasi tinggi, keterampilan potensial, dan akses terhadap sumber daya yang dapat dikembangkan.
Keterwakilan kelompok rentan	<ul style="list-style-type: none"> ● Pastikan keterwakilan kelompok rentan dalam program pemberdayaan masyarakat. ● Tetapkan kuota atau persentase tertentu untuk memastikan inklusi dan kesetaraan.
Komitmen partisipasi	<ul style="list-style-type: none"> ● Prioritaskan masyarakat yang memiliki komitmen dan kesediaan untuk berpartisipasi aktif dalam program.

Setelah mengidentifikasi calon target sasaran, proses seleksi dapat dilakukan melalui metode berikut:



Model Intervensi Program

Setelah mengidentifikasi penentuan visi dan misi, langkah selanjutnya adalah menentukan model intervensi program yang sesuai. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat untuk kemandirian ekonomi, prioritas program harus diarahkan pada intervensi yang mampu meningkatkan kapasitas individu dan komunitas untuk menghasilkan pendapatan dan mengelola sumber daya secara mandiri. Berikut adalah beberapa pertimbangan dalam menentukan model intervensi program dengan fokus pada kemandirian ekonomi:

Peningkatan Keterampilan

01. Keterampilan Kerja

Peningkatan keterampilan kerja bertujuan untuk membekali individu dengan kompetensi yang dibutuhkan di pasar kerja, baik untuk mendapatkan pekerjaan baru maupun meningkatkan jenjang karier. Program ini dapat berupa pelatihan vokasional di berbagai bidang, seperti memasak, menjahit, pertukangan, teknologi informasi, dan keterampilan lainnya.

Skilling

Upskilling

Reskilling

02. Keterampilan Wirausaha

Peningkatan keterampilan wirausaha bertujuan untuk membekali individu dengan pengetahuan dan keterampilan untuk merintis dan mengembangkan usaha. Program ini dapat berupa pelatihan membuat proposal usaha, pemasaran, manajemen keuangan, dan lainnya.

Pelatihan Motivasi

Pelatihan Manajemen

Inkubasi Bisnis

Pendampingan

01. Pendampingan Teknis

Pendampingan teknis adalah upaya memberikan bimbingan teknis yang bertujuan untuk membantu masyarakat mengembangkan usaha atau keterampilan kerja yang spesifik.

Perencanaan usaha

Pelatihan produksi

Penerapan Teknologi

02. Pendampingan Sosial

Pendampingan sosial adalah proses mendukung masyarakat secara emosional dan sosial untuk membangun motivasi dan kepercayaan diri menuju kemandirian.

Pendampingan kelompok

Peningkatan kepercayaan diri

03. Pendampingan Manajerial

Pendampingan manajerial adalah bentuk bimbingan yang fokus pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola usaha atau keuangan mereka secara efektif.

Pelatihan administrasi

Pengelolaan tim

Peningkatan Akses

01. Akses Modal

Akses modal adalah upaya untuk memfasilitasi masyarakat dalam memperoleh pendanaan yang mendukung pengembangan usaha atau kegiatan ekonomi mereka.

Kredit mikro bunga rendah

Fasilitasi ke dana hibah atau CSR

Crowdfunding

02. Akses Pasar

Akses pasar adalah inisiatif untuk membuka peluang bagi masyarakat agar produk atau jasa mereka dapat dipasarkan secara lebih luas dan kompetitif.

Pameran produk lokal

Kerja sama dengan distributor

E-commerce dan media sosial

Panduan memilih model intervensi yang tepat

Pemilihan model intervensi yang tepat harus didasarkan pada hasil analisis kebutuhan (*needs assessment*) dan pertimbangan yang matang. Dengan memilih model intervensi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat, program pemberdayaan masyarakat dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya dan memberikan manfaat yang optimal bagi peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat miskin dan rentan. Berikut adalah contoh bagaimana model intervensi dipertimbangkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan:

Contoh dari Analisis Kebutuhan	Model Intervensi	Contoh Kegiatan	Pertimbangan
<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat tidak memiliki keterampilan yang relevan dengan pasar kerja. - Masyarakat tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk berwirausaha. - Masyarakat kesulitan mengakses informasi dan pelatihan. 	Peningkatan Keterampilan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan vokasional (mendesain busana, komputer, bahasa asing). - Pelatihan kewirausahaan. - Pelatihan keterampilan hidup (literasi, numerasi). 	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuaikan jenis pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja dan minat masyarakat. - Berikan sertifikasi dan akreditasi untuk meningkatkan daya saing. - Pastikan pelatihan mudah diakses dan terjangkau.
<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat tidak memiliki pengetahuan tentang pengelolaan keuangan. - Masyarakat tidak memiliki modal untuk memulai usaha. - Masyarakat tidak memiliki agunan untuk mendapatkan pinjaman. 	Peningkatan Akses (Akses Modal)	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi akses kredit usaha rakyat (KUR). - Pelatihan pengelolaan keuangan. - Pendampingan dalam penyusunan proposal usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pastikan masyarakat memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan dan mengembangkan usaha. - Berikan pendampingan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas.
<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat kesulitan memasarkan produk atau jasa mereka. - Masyarakat tidak memiliki akses ke informasi pasar. - Masyarakat tidak memiliki jaringan pemasaran yang luas. 	Peningkatan Akses (Akses Pasar)	<ul style="list-style-type: none"> - Pameran produk lokal. - Kerjasama dengan distributor dan lokapasar (<i>marketplace</i>). - Pelatihan pemasaran daring. - Pengembangan <i>platform e-commerce</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pastikan produk atau jasa yang dihasilkan memiliki kualitas dan daya saing. - Berikan pendampingan dalam <i>branding</i> dan pemasaran.
<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pendidikan masyarakat rendah. - Masyarakat kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar. 	Peningkatan Akses (Akses Pendidikan)	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan keterampilan hidup (literasi, numerasi). - Pengembangan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM). 	<ul style="list-style-type: none"> - Pastikan program pendidikan mudah diakses dan terjangkau. - Sesuaikan program pendidikan dengan kebutuhan dan minat masyarakat. - Libatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan.
<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat membutuhkan bimbingan dan dukungan dalam mengembangkan usaha atau keterampilan. - Masyarakat kesulitan memecahkan masalah dan mengambil keputusan. - Masyarakat membutuhkan motivasi dan penguatan mental. 	Pendampingan	<ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan teknis (penyusunan rencana usaha, pelatihan produksi). - Pendampingan sosial (konseling, pendampingan kelompok). - Pendampingan manajerial (pelatihan administrasi, manajemen keuangan). 	<ul style="list-style-type: none"> - Pastikan pendamping memiliki kompetensi dan pengalaman yang relevan. - Bangun hubungan yang baik antara pendamping dan masyarakat. - Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pendamping.

03. Penyusunan Kerangka Kerja

Kerangka kerja yang komprehensif akan memandu seluruh proses dan memastikan program berjalan efektif dan mencapai tujuan yang ditetapkan.

Visi dan misi program yang inspiratif dan terukur.

Visi dan misi adalah jiwa dan arah program pemberdayaan masyarakat. Visi menjadi cita-cita jangka panjang, sedangkan misi adalah langkah nyata mencapainya.

Visi

Gambaran ideal kondisi masyarakat di masa depan setelah program berhasil.

Kerangka Kerja:

- Menunjukkan kondisi masyarakat yang mandiri dan berdaya secara ekonomi setelah program selesai.
- Menumbuhkan semangat dan harapan bagi masyarakat.
- Mudah dipahami dan dikomunikasikan pada semua pihak.

Standar penentuan visi:

- Melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan..
- Mencerminkan nilai-nilai pemberdayaan masyarakat, seperti kemandirian, kesetaraan, dan keberlanjutan.
- Disesuaikan dengan kondisi dan potensi wilayah sasaran.

Contoh visi program Prakerja

Terciptanya angkatan kerja Indonesia yang kompeten, produktif, dan berdaya saing.

Misi

Langkah-langkah konkret dan terukur yang akan dilakukan untuk mencapai visi.

Kerangka Kerja:

- Menjelaskan tindakan yang akan diambil secara detail.
- Menekankan upaya peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat.
- Disesuaikan dengan kondisi dan waktu yang tersedia.

Standar penentuan misi:

- Berkaitan erat dengan visi program.
- Dirumuskan dengan bahasa yang mudah dipahami.

Contoh misi program Prakerja

- Meningkatkan kompetensi dan keterampilan angkatan kerja.
- Memfasilitasi pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
- Mendorong kewirausahaan dan pengembangan usaha mikro dan kecil.

Penentuan Indikator Keberhasilan Program

Indikator keberhasilan adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan program pemberdayaan masyarakat. Indikator yang terukur dan relevan memiliki peran penting dalam perencanaan program karena memberikan informasi yang objektif tentang kemajuan program dan efektivitas strategi yang diimplementasikan. Indikator yang baik akan membantu dalam mengambil keputusan, melakukan perbaikan, dan memastikan akuntabilitas program.

Penyusunan indikator keberhasilan program harus dilakukan melalui proses konsultatif partisipatif yang melibatkan semua multistakeholder terkait. Keterlibatan berbagai pihak, seperti masyarakat sasaran, tokoh masyarakat, perwakilan pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan ahli terkait.

Kriteria Indikator Keberhasilan

Terukur	Relevan	Spesifik	Dapat Diukur	Berbatas Waktu
Dapat dinyatakan dengan data kuantitatif (angka, persentase) atau kualitatif (perubahan sikap atau perilaku).	Sesuai dengan tujuan program dan kebutuhan masyarakat.	Ukuran yang jelas, tidak multitafsir, dan menggambarkan hasil yang diinginkan secara langsung.	Memiliki data pendukung yang tersedia dan metode pengumpulan data yang jelas.	Menetapkan jangka waktu tertentu untuk pencapaiannya.

Dimensi Indikator Keberhasilan

Selain kriteria di atas, indikator keberhasilan program pemberdayaan masyarakat juga perlu dilihat dari dimensi/aspek Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat:

<p>Akses Mengukur kemudahan atau kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber daya, layanan, atau peluang yang disediakan oleh program.</p> <p>Contoh: Persentase masyarakat yang memiliki akses terhadap modal usaha.</p>	<p>Partisipasi Mengukur tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan program, pengambilan keputusan, atau proses implementasi.</p> <p>Contoh: Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelatihan keterampilan.</p>	<p>Kontrol Mengukur tingkat pengaruh atau kontrol masyarakat terhadap sumber daya, proses pengambilan keputusan, atau hasil program.</p> <p>Contoh: Persentase perempuan yang memiliki kontrol terhadap pendapatan keluarga.</p>	<p>Manfaat: Mengukur manfaat atau dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat akibat program, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan.</p> <p>Contoh: Peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat setelah mengikuti program.</p>
--	---	---	---

Berikut adalah beberapa contoh indikator keberhasilan yang terukur dan relevan dalam program pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan untuk kemandirian ekonomi, dengan memperhatikan dimensi APKM:

Ekonomi:

- **Akses:** Persentase peningkatan akses masyarakat terhadap modal usaha (mikro, kecil, dan menengah).
- **Partisipasi:** Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelatihan kewirausahaan dan manajemen keuangan.
- **Kontrol:** Persentase perempuan yang memiliki kontrol terhadap pendapatan usaha keluarga.
- **Manfaat:** Persentase peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.
- Jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) baru yang terbentuk.
- Jumlah lapangan kerja baru yang tercipta.
- Peningkatan nilai aset produktif masyarakat.

Sosial:

- **Akses:** Kemudahan masyarakat mengakses layanan pendidikan dan kesehatan.
- **Partisipasi:** Tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- **Kontrol:** Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait program pemberdayaan.
- **Manfaat:** Peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
- Perubahan pola pikir masyarakat menjadi lebih mandiri dan berani mengambil risiko.
- Peningkatan kepercayaan diri dan motivasi masyarakat.
- Penguatan kelembagaan masyarakat, seperti kelompok usaha bersama atau koperasi.

Lingkungan:

- **Akses:** Kemudahan masyarakat mengakses informasi tentang praktik pertanian berkelanjutan.
- **Partisipasi:** Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian lingkungan.
- **Kontrol:** Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam di tingkat lokal.
- **Manfaat:** Peningkatan keberlanjutan lingkungan dalam kegiatan ekonomi masyarakat.
- Penggunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan.
- Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Catatan: Indikator-indikator di atas hanya contoh, dan perlu disesuaikan dengan tujuan, sasaran, dan konteks program pemberdayaan masyarakat yang spesifik. **Pastikan semua indikator memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*) dan terukur dalam dimensi APKM.**

Pembuatan Rencana Intervensi

Rencana aksi adalah **penjabaran langkah-langkah konkret dan terstruktur yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan program pemberdayaan masyarakat**. Rencana aksi yang efektif mencakup kegiatan, lini masa (*timeline*), dan tonggak pencapaian (*milestones*) yang terdefinisi dengan jelas, realistis, dan terukur. Agar program berjalan lancar dan terarah, kita perlu merinci kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Setiap kegiatan harus didefinisikan secara spesifik dan operasional, dengan mempertimbangkan *output* yang ingin dicapai dan sumber daya yang dibutuhkan.

Selain detail kegiatan, *timeline* dan *milestone* adalah dua elemen penting dalam rencana aksi yang saling berkaitan dan berfungsi sebagai panduan dalam melaksanakan dan memantau kemajuan program pemberdayaan masyarakat. **Timeline** adalah jadwal pelaksanaan kegiatan program secara keseluruhan, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi. *Timeline* yang baik haruslah jelas, realistis, dan fleksibel, sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Milestone adalah tonggak pencapaian atau target yang ingin dicapai pada waktu-waktu tertentu selama program berjalan. *Milestone* berfungsi sebagai titik penanda kemajuan program dan membantu dalam memantau apakah program berjalan sesuai rencana. Berikut adalah kerangka kerja untuk pembuatan rencana aksi:

Rincian Kegiatan	Penanggung jawab	Sumber Daya	Output Kegiatan	Timeline	Milestone
<p>Setiap kegiatan harus diuraikan secara spesifik dan operasional, menggunakan kata kerja yang jelas dan mudah dipahami.</p> <p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pelatihan kewirausahaan - Menyediakan akses permodalan - Memfasilitasi pemasaran produk 	<p>Tetapkan penanggung jawab untuk setiap kegiatan, baik individu maupun tim. Pastikan penanggung jawab memiliki kompetensi dan wewenang yang cukup untuk melaksanakan kegiatan.</p>	<p>Identifikasi sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan, seperti dana, tenaga kerja, material, dan peralatan. Pastikan ketersediaan sumber daya yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan kegiatan.</p>	<p>Definisikan <i>output</i> yang diharapkan dari setiap kegiatan. <i>Output</i> harus terukur dan berkontribusi pada pencapaian indikator keberhasilan program.</p>	<p>Susun jadwal kegiatan dengan <i>timeline</i> yang jelas dan realistis, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan faktor-faktor eksternal yang mungkin memengaruhi <i>timeline</i>.</p>	<p>Tetapkan <i>milestone</i> yang terukur dan relevan dengan tujuan program. Misalnya, "Pada akhir tahun pertama, 70% peserta program telah mendapatkan pelatihan kewirausahaan."</p>

Frekuensi Peninjauan Ulang Rencana Intervensi

- **Rincian Kegiatan:** Frekuensi peninjauan ulang bisa disesuaikan, beberapa model intervensi yang dilakukan setiap tahun seperti pelatihan dan pendampingan. Namun, beberapa model intervensi hanya dilakukan sekali selama program seperti fasilitasi akses pasar dan modal.
- **Penanggung Jawab dan Sumber Daya:** Frekuensi peninjauan ulang dapat bervariasi tergantung pada jenis program, kompleksitas intervensi, dan dinamika di lapangan, namun praktik baik-nya dilakukan per kuartal
- **Timeline:** Timeline kegiatan disusun di awal program dan bisa jadi direvisi secara berkala (misalnya, setiap tahun atau setiap semester) tergantung pada kebutuhan dan dinamika program.
- **Milestone:** Milestone ditetapkan di awal program dan dipantau secara berkala (misalnya, setiap kuartal atau setiap tahun) untuk melihat kemajuan pencapaian tujuan program.

04. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan sangat penting untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi yang erat antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi non-pemerintah, diperlukan untuk mencapai tujuan program secara optimal. Berikut adalah gambaran umum tentang peran & tanggung jawab lembaga terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat:

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Menyusun substansi program, termasuk perencanaan, penetapan target, dan indikator keberhasilan, serta melakukan monitoring dan evaluasi program secara nasional.

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM)

Bertanggung jawab sebagai koordinator program, memastikan sinkronisasi dan integrasi program antar-kementerian dan lembaga terkait.

Kementerian Pelaksana

Melaksanakan program sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Kementerian Sosial:

Fokus pada perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial.

- **Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI):** Layanan bagi penyandang disabilitas, lansia, dan anak terlantar.
- **Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA):** Bantuan modal usaha bagi eks-penerima bansos.

Kementerian Pertanian:

Fokus pada model peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani.

- **YESS:** Mendukung generasi muda di bidang pertanian dengan memberikan pelatihan, pendampingan, & akses permodalan.

Kementerian Desa PDT:

Fokus pada pembangunan dan pemberdayaan desa.

- **Dana Desa:** Memberikan dana kepada desa untuk membiayai program pembangunan & pemberdayaan masyarakat desa.
- **BUMDes:** Memfasilitasi pembentukan dan pengembangan BUMDes sebagai lembaga usaha ekonomi di desa yang dikelola oleh masyarakat.

Kementerian UMKM:

Fokus pada pengembangan, peningkatan kapasitas & daya saing UMKM.

- **Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT):** Menyediakan layanan terpadu bagi UMKM, seperti konsultasi bisnis, pelatihan, pendampingan, dan akses ke pembiayaan.

Kementerian Kehutanan:

Fokus pada pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan.

- **Perhutanan Sosial:** Memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola hutan secara berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan menjaga kelestarian hutan.

Kementerian Keuangan:

Fokus pada akses keuangan inklusif.

- **Pembiayaan Ultra Mikro (UMi):** Memberikan akses pembiayaan kepada pelaku usaha ultra mikro yang belum memiliki akses ke perbankan.

Kementerian Pelaksana

Melaksanakan program sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

- | | |
|---|--|
| <p>Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional: Fokus pada Penataan aset dan akses lahan.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Tanah Objek Reforma Agraria (Reforma Agraria): Melakukan redistribusi tanah kepada petani kecil dan masyarakat adat untuk mengatasi ketimpangan penguasaan lahan. |
|---|--|

- | | |
|--|---|
| <p>Kementerian Ketenagakerjaan: Fokus pada Peningkatan kualitas tenaga kerja.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK): Memberikan pelatihan vokasi yang terstandarisasi dan berbasis kompetensi untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja. • Kartu Prakerja: Memberikan bantuan pelatihan dan insentif kepada pencari kerja, pekerja terkena PHK, dan pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. |
|--|---|

Kementerian Dalam Negeri

Bertanggung jawab untuk memastikan koordinasi dan sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat antara pemerintah pusat dan daerah. Memastikan program-program tersebut sejalan dengan kebijakan nasional dan prioritas pembangunan daerah.

Pemerintah Daerah

Melaksanakan program di tingkat daerah, melakukan monitoring dan evaluasi, serta memastikan keberlanjutan program.

Mitra Pelaksana Program

Berperan sebagai mitra dalam pelaksanaan program, melakukan pendampingan, dan advokasi.

Peranan Kementerian/Lembaga dalam Tahapan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

Setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi dan keberlanjutan program, memiliki peran kunci dalam mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai peran masing-masing lembaga dalam setiap tahapan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat:

Perencanaan	Kementerian PPN/Bappenas Menyusun substansi program, termasuk perencanaan, penetapan target, dan indikator keberhasilan.	Kemenko PM Mengkoordinasikan penyusunan program dan memastikan sinkronisasi antar-kementerian dan lembaga terkait.	K/L Pelaksana Menyusun rencana pelaksanaan program sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
	K/L Pelaksana Melakukan asesmen awal untuk mengidentifikasi calon penerima manfaat dan kebutuhan mereka.	Mitra Pelaksana Melakukan asesmen langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang lebih akurat	Pemerintah Daerah Membantu dalam proses asesmen di tingkat daerah.
	K/L Pelaksana Menyiapkan materi dan logistik untuk pelaksanaan program.	Mitra Pelaksana Menyiapkan lokasi dan infrastruktur pendukung untuk pelaksanaan program.	Pemerintah Daerah Melakukan sosialisasi program kepada masyarakat dan memberikan pelatihan kepada calon penerima manfaat.
Perencanaan	K/L Pelaksana Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program secara berkala.	Mitra Pelaksana Pelaksanaan program, melakukan pendampingan, dan advokasi.	
	Kementerian PPN/Bappenas Melakukan monitoring dan evaluasi program secara nasional.	K/L Pelaksana Melakukan monitoring dan evaluasi program.	Mitra Pelaksana Mengumpulkan data dan informasi untuk keperluan monitoring dan evaluasi.
Evaluasi	K/L Pelaksana Menetapkan kriteria graduasi dan memastikan keberlanjutan program.	Mitra Pelaksana Membantu masyarakat dalam proses graduasi & memastikan mereka siap untuk mandiri.	

05. Kerangka Pendanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

Pendanaan program pemberdayaan masyarakat merupakan aspek krusial yang perlu dikelola secara efektif dan transparan. Kerangka pendanaan yang komprehensif akan memastikan keberlanjutan program dan memaksimalkan dampak positif bagi masyarakat. Berikut adalah panduan untuk mengembangkan kerangka pendanaan yang efektif:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	Merupakan sumber utama pendanaan program pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh kementerian dan lembaga terkait.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Digunakan untuk mendukung program pemberdayaan di tingkat daerah, terutama untuk program yang dikelola oleh pemerintah daerah.
Dana Desa	Digunakan untuk membiayai program pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi, dan peningkatan kapasitas masyarakat.
Corporate Social Responsibility (CSR)	Merupakan kontribusi perusahaan swasta untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat, baik dalam bentuk dana, barang, atau jasa.
Hibah (Grants)	Berasal dari lembaga donor, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang memberikan bantuan dana untuk program pemberdayaan masyarakat.

Strategi Pendanaan

- **Diversifikasi Sumber Pendanaan**

Tidak bergantung pada satu sumber pendanaan saja, melainkan mengkombinasikan berbagai sumber pendanaan untuk mengurangi risiko dan memastikan keberlanjutan program.

- **Kemitraan dengan Berbagai Pihak**

Membangun kemitraan dengan pemerintah, swasta, lembaga donor, dan masyarakat untuk mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan efektivitas program.

- **Transparansi dan Akuntabilitas**

Mengelola dana program secara transparan dan akuntabel untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan dana digunakan sesuai dengan tujuan program.

- **Pemantauan dan Evaluasi**

Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas program dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

- **Keberlanjutan Pendanaan**

Mengembangkan strategi untuk memastikan keberlanjutan pendanaan program, seperti mengembangkan unit usaha yang menghasilkan pendapatan, membangun dana abadi, dan menjalin kemitraan jangka panjang dengan lembaga donor.

06. Penyusunan Pedoman Program

Pedoman program adalah dokumen panduan bagi para pelaksana program dan penerima manfaat. Dokumen ini berisi informasi lengkap mengenai program pemberdayaan masyarakat, mulai dari latar belakang, tujuan, strategi, hingga tahapan pelaksanaan sampai monitoring dan evaluasi. Pedoman program yang baik memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama, sehingga program dapat diimplementasikan secara efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Aspek-Aspek Penting dalam Pedoman Program

Latar Belakang	Jelaskan latar belakang dan justifikasi program pemberdayaan masyarakat, termasuk permasalahan yang ingin diatasi dan potensi yang ingin dikembangkan.
Kebijakan dan Regulasi	Cantumkan kebijakan dan regulasi yang relevan dengan program pemberdayaan masyarakat.
Tujuan dan Sasaran	Uraikan tujuan dan sasaran program secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu.
Strategi dan Pendekatan	Jelaskan strategi dan pendekatan yang akan digunakan dalam program pemberdayaan masyarakat, termasuk model intervensi dan komponen pendukung.
Target Sasaran	Definisikan kriteria dan karakteristik target sasaran program pemberdayaan masyarakat.
Tahapan Pelaksanaan	Uraikan tahapan pelaksanaan program secara detail, mulai dari perencanaan, persiapan, implementasi, monitoring, evaluasi, hingga keberlanjutan dan <i>exit strategy</i> .
Prosedur Operasional	Uraikan langkah-langkah operasional yang terstruktur dan sistematis untuk melaksanakan suatu kegiatan.
Monitoring dan Evaluasi	Jelaskan mekanisme monitoring dan evaluasi program, termasuk indikator keberhasilan dan metode pengumpulan data.
Kerangka Kerja Kelembagaan	Jelaskan struktur kelembagaan yang terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat dan peran masing-masing lembaga.
Sumber Daya	Uraikan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, termasuk sumber daya manusia, keuangan, dan logistik.

Standar Penyusunan Pedoman Program

- Gunakan bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh semua pihak.
- Susun pedoman program secara sistematis dan terstruktur agar mudah dibaca dan dipahami.
- Pastikan pedoman program mencakup semua informasi penting yang dibutuhkan oleh pelaksana program dan penerima manfaat.
- Pastikan pedoman program relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, serta mengacu pada kebijakan dan regulasi terkini.
- Pedoman program harus mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan.

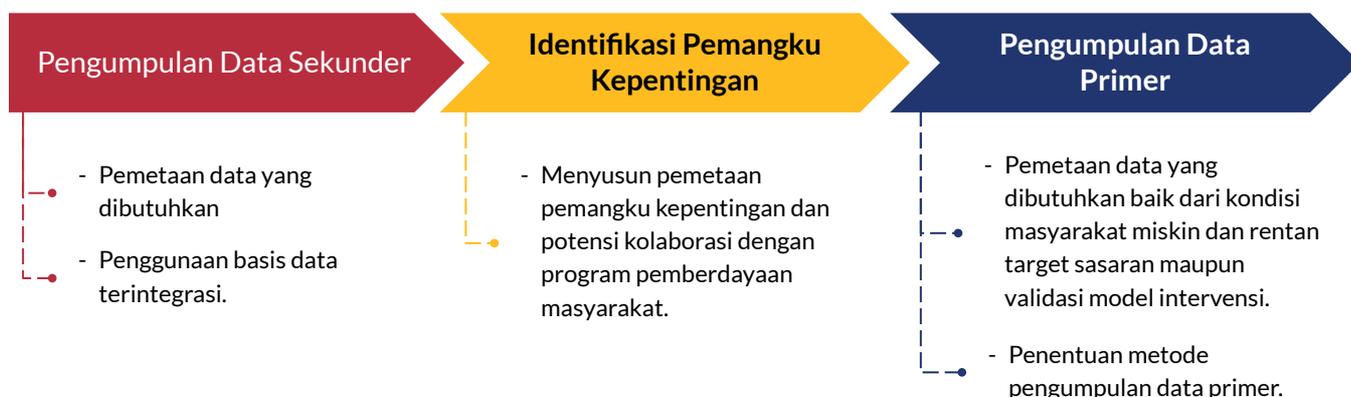
Penyusunan pedoman program yang baik merupakan langkah penting dalam merancang dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat yang efektif. Pedoman program yang komprehensif, jelas, dan mudah dipahami akan membantu para pelaksana program dan penerima manfaat dalam mencapai tujuan program dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

3.3.3 Tahap Asesmen Program Pemberdayaan Masyarakat

Analisis kebutuhan (*needs assessment*) bertujuan untuk menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat miskin dan rentan dengan jelas, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan utama yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Proses ini membantu memahami tantangan yang dihadapi masyarakat dalam meningkatkan daya saing ekonomi. Selain itu, penilaian terhadap potensi lokal dan sumber daya yang dapat dioptimalkan diperlukan guna memperkuat program pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan.

Berikut adalah tahapan yang perlu dilakukan dalam **Asesmen Program Pemberdayaan Masyarakat**. Tahapan-tahapan ini dirancang untuk memastikan bahwa program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sasaran secara efektif dan berkelanjutan. Proses asesmen dimulai dengan pengumpulan data sekunder untuk memahami kondisi masyarakat miskin dan rentan serta kebutuhan yang ada. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi pemangku kepentingan yang relevan dan potensi kolaborasi yang dapat meningkatkan dampak program. Terakhir, pengumpulan data primer dilakukan dengan pendekatan yang tepat untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dan valid, yang akan memperkuat perencanaan dan implementasi program.

Proses ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi dan kebutuhan masyarakat, serta memastikan program pemberdayaan masyarakat yang dirancang sesuai dengan tujuan yang diinginkan.



01. Pengumpulan dan Analisis Data Sekunder

Pemanfaatan data dari Bappenas, BPS, BKKBN, lembaga kementerian terkait, dan lembaga daerah lainnya sangat penting untuk memetakan tingkat kerentanan dan kebutuhan masyarakat secara umum. Data yang terintegrasi memungkinkan program dirancang lebih spesifik, menghindari tumpang tindih bantuan, serta memastikan alokasi sumber daya yang adil dan tepat sasaran. Selain itu, pendekatan berbasis data ini mendukung perencanaan berbasis bukti, memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan (*stakeholder*), dan memungkinkan evaluasi program yang lebih transparan dan terukur, sehingga menghasilkan dampak yang lebih efektif bagi masyarakat.

Jenis Data yang Diperlukan

Dalam pengumpulan data sekunder, penting untuk memperhatikan kelompok & jenis data yang harus diambil. Berikut adalah jenis data yang dibutuhkan dalam program pemberdayaan masyarakat miskin & rentan, beserta alasan pentingnya data tersebut. Seluruh data ini harus terpilah berdasarkan gender, kelompok disabilitas, dan kelompok inklusi lainnya untuk memastikan program responsif dan inklusif.

Pengeluaran dan UMR

Data pengeluaran dan UMR memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi ekonomi masyarakat dan tantangan yang mereka hadapi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Analisis data ini dapat membantu kita memahami pola konsumsi, kesenjangan pendapatan, dan kerentanan ekonomi masyarakat.

Pekerjaan

Informasi jenis pekerjaan atau tingkat pengangguran penting untuk menentukan potensi keterampilan yang dapat dikembangkan dan kebutuhan pelatihan kewirausahaan atau vokasi. Data ini perlu dipisahkan berdasarkan jenis kelamin untuk melihat perbedaan jenis pekerjaan yang dominan pada perempuan dan laki-laki, serta tingkat pengangguran pada masing-masing kelompok.

Pendidikan

Tingkat pendidikan memberikan gambaran kapasitas dasar masyarakat dalam menerima pelatihan dan mengadopsi teknologi atau pengetahuan baru. Data ini harus dipisahkan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok disabilitas untuk memahami tingkat pendidikan masing-masing kelompok, sehingga program pendidikan dapat disesuaikan.

Kepemilikan Aset

Data ini meliputi kepemilikan lahan, alat produksi, atau modal usaha yang membantu mengidentifikasi kebutuhan tambahan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat. Data terpilah gender penting untuk melihat perbedaan kepemilikan aset antara perempuan dan laki-laki, yang berpengaruh pada akses terhadap modal dan sumber daya ekonomi.

Potensi Lokal

Data mengenai sumber daya alam, budaya, atau keahlian lokal membantu mendesain program yang berbasis pada keunggulan lokal sehingga lebih berkelanjutan.

Akses Layanan Dasar (kesehatan, air, listrik)

Data ini penting untuk memahami kualitas hidup masyarakat dan hambatan struktural yang mungkin menghalangi keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan Basis Data Terintegrasi

Menggunakan basis data sekunder yang terintegrasi dalam penentuan target program pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk memastikan keakuratan dan efisiensi intervensi. Data yang terintegrasi dapat mencakup informasi terperinci mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan potensi masyarakat secara nasional, sehingga mempermudah identifikasi kelompok yang membutuhkan.

Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi)

Regsosek merupakan basis sistem pendataan yang dikelola untuk mengumpulkan informasi terkait kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Data yang dihasilkan dari Regsosek mencakup informasi tentang pengeluaran, pekerjaan, pendidikan, akses layanan dasar, dan lainnya.

02. Identifikasi Pemangku Kepentingan

Melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah, sektor swasta, dan NGO, yang berperan dalam program pemberdayaan masyarakat.

Pentingnya Identifikasi Pemangku Kepentingan

Identifikasi pemangku kepentingan adalah langkah kunci dalam merancang program pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan. Dengan melibatkan pihak-pihak yang relevan dan berpengaruh, program dapat dirancang dengan lebih tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan.

Potensi Kolaborasi

Mencari peluang untuk kolaborasi antara pemangku kepentingan guna memaksimalkan dampak dan efektivitas program.

Mengurangi Konflik

Pemetaan pemangku kepentingan membantu meminimalkan potensi konflik antara pihak-pihak yang terlibat dalam program.

Efisiensi Alokasi Sumber Daya

Memastikan alokasi sumber daya dilakukan secara adil dan efisien untuk keberlanjutan program.

Kontribusi Pemangku Kepentingan

Pemerintah, organisasi nonpemerintah, dan swasta dapat memberikan kontribusi seperti pendanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program.

Kerangka Kerja Pemetaan Pemangku Kepentingan

Pemetaan pemangku kepentingan merupakan langkah awal yang penting dalam merancang dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Dengan mengidentifikasi dan memahami peran serta potensi kolaborasi dari berbagai pihak, program dapat berjalan lebih efektif dan berdampak luas. Berikut kerangka kerja yang dapat digunakan untuk memetakan pemangku kepentingan:

Tipe Organisasi	Nama Organisasi	Peran dan Tanggung Jawab	Potensi Kolaborasi
Petakan tipe organisasi yang kemungkinan bergerak di wilayah program dan/atau menysasar target sasaran yang sama. <ul style="list-style-type: none"> → NGO → Pemerintah → Swasta → LSM → dll 	Rincikan nama organisasi yang terlibat, misalnya Dinas Pertanian Kabupaten Badung.	Rincikan peran dan tanggung jawab dari organisasi yang dipetakan, misalnya: <ul style="list-style-type: none"> → Memberikan pelatihan teknis dan pendampingan kepada masyarakat. → Memfasilitasi akses pendanaan melalui hibah atau pinjaman mikro. → Mendukung dana melalui program CSR dan insentif lain. → Membuka akses pasar untuk produk atau keterampilan lokal. 	Petakan potensi kolaborasi yang bisa terjalin dengan program pemberdayaan masyarakat, misalnya: <ul style="list-style-type: none"> → Kolaborasi dalam akses basis data → Advokasi program kepada masyarakat → Kolaborasi pendanaan → Kolaborasi logistik di area terpencil → Kolaborasi dalam pelatihan → Potensi keberlanjutan dan <i>exit strategy</i>

Dengan memahami berbagai sektor yang dapat berperan program dapat lebih baik merancang kemitraan dan intervensinya.

Penjabaran peran yang jelas akan menghindari tumpang tindih dan memastikan pendekatan yang terkoordinasi.

Memahami potensi kolaborasi ini sangat penting untuk menciptakan model program yang komprehensif dan berkelanjutan.

03. Pengumpulan Data Primer

Data terintegrasi memberikan gambaran komprehensif, tetapi validasi dengan data primer tetap diperlukan untuk memastikan ketepatan dan relevansi. Karena sifatnya agregat, data ini bisa kurang mencerminkan kondisi lokal atau perubahan terkini. Survei, wawancara, atau FGD membantu menggali tantangan spesifik dan kebutuhan masyarakat yang tidak tercakup dalam data terintegrasi.

Data yang Dibutuhkan

Untuk merancang program pemberdayaan masyarakat yang efektif dan tepat sasaran, berikut adalah data yang perlu dikumpulkan melalui pengumpulan data langsung (seperti survei, wawancara, atau FGD) guna memahami kondisi masyarakat sasaran secara lebih mendalam. Penting untuk mengumpulkan data ini secara terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, disabilitas, etnis, dan faktor sosial lainnya yang relevan. Hal ini memastikan bahwa program yang dihasilkan responsif gender dan inklusif.

<p style="text-align: center;">Pekerjaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan utama yang dijalani saat ini. - Status pekerjaan (apakah tetap atau tidak). - Adanya jenjang karier di pekerjaan saat ini. - Tingkat pendidikan akhir. <p><i>Catatan:</i> Data ini perlu dianalisis lebih lanjut untuk melihat perbedaan jenis pekerjaan dan tingkat partisipasi antara kelompok gender dan kelompok inklusi.</p>	<p style="text-align: center;">Potensi Lokal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sumber daya yang dapat dimanfaatkan di lingkungan. - Produk lokal yang sering dihasilkan di daerah. - Keterlibatan individu atau komunitas dalam kegiatan pengembangan potensi lokal. <p><i>Catatan:</i> Perhatikan peran gender dan kelompok inklusi dalam pengelolaan sumber daya alam dan kearifan lokal.</p>
<p style="text-align: center;">Pendapatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rata-rata pendapatan bulanan keluarga. - Rata-rata pengeluaran rumah tangga. - Kecukupan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan. - Pendapatan sesuai UMR atau tidak <p><i>Catatan:</i> Data pendapatan harus dianalisis secara terpisah untuk kelompok gender dan kelompok inklusi untuk melihat perbedaan tingkat pendapatan dan kerentanan ekonomi.</p>	<p style="text-align: center;">Kepemilikan Aset</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepemilikan tanah atau rumah pribadi. - Jenis aset yang dimiliki (misalnya kendaraan, peralatan pertanian, dan lain-lain). - Penggunaan aset untuk mendukung pekerjaan atau penghasilan. <p><i>Catatan:</i> Data ini perlu dianalisis untuk melihat perbedaan kepemilikan aset antara kelompok gender & kelompok inklusi, serta bagaimana hal ini memengaruhi akses terhadap peluang ekonomi.</p>
<p style="text-align: center;">Akses Layanan Dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frekuensi mengakses layanan kesehatan dalam enam bulan terakhir. - Akses terhadap air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. - Akses listrik yang stabil di rumah. <p><i>Catatan:</i> Data ini perlu dianalisis untuk melihat perbedaan akses dan kebutuhan antara kelompok gender dan kelompok inklusi.</p>	<p style="text-align: center;">Tantangan dan Harapan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tantangan utama yang dihadapi masyarakat dalam mencapai kemandirian ekonomi. - Faktor yang dapat mendukung peningkatan kemandirian ekonomi. - Harapan masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat yang relevan. <p><i>Catatan:</i> Data ini perlu dianalisis untuk mengidentifikasi tantangan dan harapan spesifik dari masing-masing kelompok gender dan kelompok inklusi.</p>

Asesmen Peningkatan Keterampilan

- Kebutuhan peningkatan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan atau mengembangkan usaha.
- Jenis keterampilan spesifik yang ingin ditingkatkan.
- Preferensi antara pelatihan keterampilan kerja atau wirausaha.
- Metode pelatihan yang disukai (tatap muka, daring, atau kombinasi).

Asesmen Pendampingan

- Kebutuhan pendampingan untuk mencari pekerjaan atau mengembangkan usaha.
- Jenis pendampingan yang dibutuhkan (teknis, sosial, atau manajerial).
- Karakteristik pendamping yang diharapkan (berpengalaman, suportif, atau lainnya).

Asesmen Peningkatan Akses

Akses Modal

- Kebutuhan modal untuk memulai atau mengembangkan usaha.
- Estimasi jumlah modal yang diperlukan.
- Skema pembiayaan yang diinginkan (kredit mikro, bantuan modal, atau lainnya).

Akses Pasar

- Kendala dalam memasarkan produk atau jasa.
- Dukungan yang diharapkan dari program pemberdayaan masyarakat untuk memasarkan produk atau jasa.

Metode Pengumpulan Data Primer

Data primer efektif untuk memahami kondisi lapangan secara langsung. Ini memberikan informasi spesifik dan terkini, membantu identifikasi kebutuhan, hambatan, serta potensi lokal, sehingga program dapat disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Needs assessment yang efektif membutuhkan data yang representatif dari populasi sasaran. Untuk itu, penting untuk melakukan sampling dengan metode yang tepat. Berikut adalah panduan standardisasi sampling:

Wawancara

Metode ini memungkinkan eksplorasi yang mendalam terhadap kebutuhan, tantangan, dan potensi masyarakat.

Desain Wawancara:

- Disusun dalam bentuk semi-terstruktur untuk memungkinkan fleksibilitas.
- Pertanyaan terkait tantangan ekonomi lokal, seperti akses ke modal atau pelatihan keterampilan.

Pelaksanaan:

- Gunakan rekaman audio atau catatan tertulis untuk memastikan semua informasi terdokumentasi dengan baik.
- Jaga suasana wawancara tetap nyaman agar responden merasa terbuka untuk berbicara.

Metode Sampling: *Purposive Sampling* yaitu pengambilan sampel yang secara sengaja memilih responden atau unit yang dianggap paling relevan untuk tujuan penelitian.

Jumlah Responden:

Dalam penelitian kualitatif, seperti wawancara mendalam, jumlah responden biasanya kecil, tetapi terfokus. Sebagai panduan:

- **10–30 responden:** Cocok untuk studi eksploratif dengan fokus mendalam pada tema tertentu.
- **5–10 orang per kelompok target** (misalnya, petani, perempuan, pemuda): Berguna untuk memahami kebutuhan dari berbagai segmen.
- **Hingga data mencapai saturasi:** Ketika wawancara tambahan tidak lagi menghasilkan informasi baru.
- **Dasar Pemilihan:** Responden dipilih berdasarkan karakteristik relevan, seperti kelompok rentan, lokasi geografis, atau profesi.

Focus Group Discussion

Metode yang digunakan untuk memperoleh pandangan kolektif dari sekelompok orang yang memiliki karakteristik serupa atau menghadapi tantangan yang sama.

Desain Diskusi:

- Kelompok kecil (6-12 orang) dipilih berdasarkan demografi atau tema diskusi, seperti petani kecil, ibu rumah tangga, atau pelaku UMKM.
- Moderator dilengkapi panduan diskusi yang memuat pertanyaan utama, seperti akses terhadap layanan dasar atau tantangan ekonomi.

Fasilitasi:

- Moderator memastikan semua anggota kelompok berpartisipasi aktif tanpa dominasi dari peserta tertentu.
- Catatan dan rekaman diskusi diambil untuk analisis data kualitatif.

Metode Sampling

- 1-2 FGD per wilayah prioritas (pemilihan peserta harus mempertimbangkan representasi geografis dan keberagaman sosial di setiap wilayah).

Partisipan

- Keberagaman peserta: Melibatkan perempuan, pemuda, dan tokoh masyarakat sangat penting dan memastikan setiap kategori pemangku kepentingan memiliki representasi (Sektor Swasta, Masyarakat Sipil, Kelompok Masyarakat)
- 5-10 orang per FGD adalah jumlah ideal untuk memastikan diskusi produktif.

Survei

Metode sistematis untuk mengumpulkan data kuantitatif dengan kuesioner yang disebar kepada target sasaran.

Desain Kuesioner:

- Gunakan pertanyaan tertutup untuk menghasilkan data kuantitatif (misalnya: skala likert, pilihan ganda).
- Tambahkan beberapa pertanyaan terbuka. Contoh: *"Apa tantangan utama yang Anda hadapi dalam memulai usaha?"*

Fasilitasi:

- Survei dapat dilakukan secara tatap muka, daring, melalui telepon, atau diisi langsung oleh responden tergantung pada aksesibilitas responden.

Metode Sampling: Idealnya menggunakan rumus Slovin untuk menentukan jumlah responden. Jika tidak memungkinkan menggunakan rumus Slovin, survei dapat dilakukan kepada sebanyak mungkin responden hingga dirasa keterwakilan data sudah memadai.

Observasi lapangan

Metode pengumpulan data berbasis pengamatan langsung terhadap kondisi masyarakat atau lingkungan mereka.

Desain Observasi:

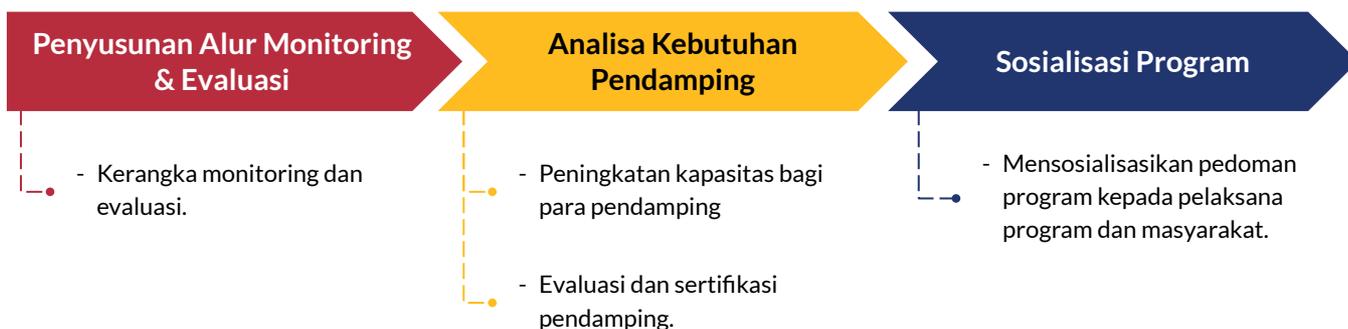
- Tentukan fokus pengamatan: kondisi fisik (rumah, fasilitas umum), perilaku masyarakat, atau aktivitas ekonomi.
- Gunakan lembar observasi terstruktur untuk mencatat temuan, seperti: Kondisi pasar lokal: apakah terorganisir atau informal

Pelaksanaan:

- Pengamat harus terlatih untuk mengidentifikasi data relevan tanpa mengganggu aktivitas normal masyarakat.
- Dokumentasi visual (foto/video) dilakukan jika memungkinkan untuk melengkapi catatan lapangan.

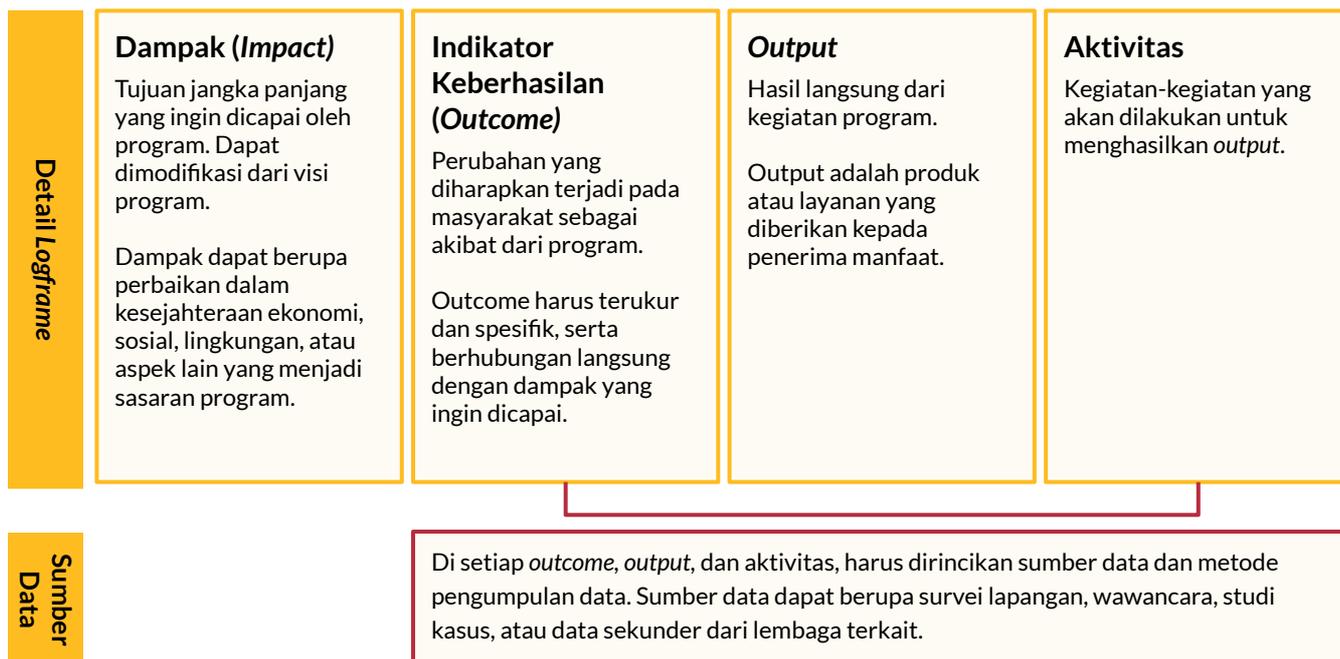
3.3.4 Tahap Persiapan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Rentan untuk Kemandirian Ekonomi

Dalam upaya memberdayakan masyarakat miskin dan rentan menuju kemandirian ekonomi, diperlukan tahapan persiapan yang matang. Tahap ini mencakup perencanaan monitoring dan evaluasi, analisis kebutuhan pendamping, serta sosialisasi program. Monitoring dan evaluasi bertujuan memastikan program memiliki target yang spesifik dan realistis, sementara peningkatan kapasitas pendamping memastikan dukungan yang efektif bagi masyarakat. Selain itu, sosialisasi program berperan penting dalam menyamakan pemahaman antara pelaksana dan pemangku kepentingan agar implementasi berjalan optimal dan berdampak maksimal.



01. Penyusunan Alur Monitoring dan Evaluasi - *Logframe Analysis* atau *Impact Model*

Logframe adalah matriks yang menggambarkan kerangka logika program secara sistematis. *Logframe* membantu menjelaskan tujuan program, merancang kegiatan yang akan dilakukan, dan menetapkan cara mengukur keberhasilan program. Komponen *logframe* biasanya terdiri dari:



Dalam monitoring dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat, pengumpulan data yang sistematis menjadi kunci untuk menilai efektivitas program dan memastikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Berbagai jenis data diperlukan untuk mendukung proses ini, mulai dari data kuantitatif yang mencerminkan angka dan capaian terukur, data kualitatif yang menggambarkan pengalaman dan persepsi peserta, hingga data administratif yang mencatat aspek operasional program.

Pemilihan sumber data yang tepat sangat bergantung pada tujuan evaluasi, apakah untuk mengukur hasil langsung program (output), perubahan yang terjadi pada masyarakat (outcome), atau dampak jangka panjang (impact). Berikut beberapa jenis dan sumber data yang biasa digunakan dalam monitoring dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat:

Jenis Data	Sumber Data
1. Data Kuantitatif	
- Jumlah peserta	- Daftar absensi, formulir pendaftaran
- Pencapaian indikator	- Lembar survei, prauji dan pascauji, data monitoring
- Perubahan ekonomi	- Data pendapatan peserta, laporan usaha
2. Data Kualitatif	
- Testimoni peserta	- Wawancara, <i>Diskusi Kelompok Terpumpun</i> /Focus Group Discussions (FGD)
- Persepsi masyarakat	- Observasi lapangan, notula harian fasilitator
- Pengalaman peserta	- Studi kasus, wawancara mendalam
3. Data Administratif	
- Daftar penerima manfaat	- <i>Database</i> penerima manfaat, laporan kegiatan
- Laporan keuangan	- Catatan transaksi, laporan anggaran
4. Data Program	
- Aktivitas yang dilakukan	- Laporan kegiatan, jadwal program
- Dampak langsung	- Hasil survei dampak, data perubahan masyarakat
5. Data Eksternal	
- Data statistik	- Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), laporan daerah
- Kebijakan lokal	- Dokumen kebijakan daerah, undang-undang
- Kemitraan program	- Dokumen nota kesepahaman, dokumen perjanjian kerja sama
6. Dokumentasi Visual	
- Foto kegiatan	- Dokumentasi lapangan
- Video program	- Dokumentasi aktivitas

Dengan memahami berbagai sumber data ini, program dapat mengidentifikasi indikator keberhasilan secara lebih akurat dan memastikan bahwa intervensi yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi kelompok sasaran.

Contoh penggunaan kerangka kerja *logframe analysis*:

Detail Logframe	<p>Impact</p> <p>Meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan kepala keluarga di Desa X.</p>	<p>Outcome</p> <p>Deskripsi: Perempuan kepala keluarga memiliki usaha yang stabil dan berkelanjutan.</p> <p>Metriks:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 70% peserta masih menjalankan usaha setelah 1 tahun program berakhir. • Meningkatnya pendapatan perempuan kepala keluarga sebesar 30% dalam waktu 2 tahun. 	<p>Output</p> <p>Deskripsi: Meningkatkan kapasitas perempuan dalam kewirausahaan dan manajemen usaha.</p> <p>Metriks:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100 perempuan mengikuti pelatihan. • 80% peserta menyatakan peningkatan pemahaman setelah pelatihan. • 50% peserta memulai usaha dalam 6 bulan setelah pelatihan. 	<p>Aktivitas</p> <p>Deskripsi: Pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha.</p> <p>Metriks:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 sesi pelatihan selama 3 bulan. • 5 sesi mentoring bisnis.
Sumber Data		<ul style="list-style-type: none"> • Data keuangan usaha melalui survei • Wawancara yang dilakukan per kuartal 	<ul style="list-style-type: none"> • Data absensi peserta pelatihan • Umpan balik (feedback) pelatihan. • Studi kasus peserta yang memulai usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jadwal dan laporan kegiatan. • Dokumentasi pelatihan dan mentoring. • Testimoni peserta.

Dengan menggunakan logframe seperti ini, program dapat lebih mudah merancang intervensi yang efektif, menetapkan indikator yang jelas, dan mengukur keberhasilan program secara sistematis.

02. Analisis Kebutuhan Pendamping

Pendamping memiliki peran krusial dalam keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Mereka tidak hanya menjadi penghubung antara program dan peserta, tetapi juga bertanggung jawab untuk memberikan pendampingan teknis, fasilitasi, serta memastikan implementasi program berjalan efektif. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis kebutuhan pendamping guna memastikan mereka memiliki kapasitas yang sesuai dengan tuntutan program.

Aspek-aspek Kebutuhan Pendamping

Analisis kebutuhan pendamping harus mencakup berbagai aspek yang relevan dengan tujuan dan karakteristik program pemberdayaan. Beberapa aspek penting yang perlu dianalisis antara lain:

Kompetensi Teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan dan keterampilan khusus sesuai bidang program, misalnya: <ul style="list-style-type: none"> - Program WASH (Water, Sanitation, and Hygiene): Pengetahuan tentang teknologi air bersih dan sanitasi, higiene perilaku, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan WASH. - Pertanian Berkelanjutan: Pengetahuan tentang teknik budidaya organik, pengelolaan lahan dan air yang berkelanjutan, dan pemasaran produk pertanian. - Kewirausahaan Perempuan: Pengetahuan tentang pengembangan usaha mikro, manajemen keuangan, pemasaran, dan akses permodalan. 2. Kemampuan dalam mengidentifikasi potensi dan permasalahan masyarakat, serta merumuskan solusi yang tepat.
Keterampilan Fasilitasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan dalam menyampaikan materi pelatihan secara efektif dan mudah dipahami. 2. Kemampuan dalam membangun interaksi dan kepercayaan dengan masyarakat. 3. Kemampuan dalam memfasilitasi diskusi, musyawarah, dan pengambilan keputusan bersama. 4. Pemahaman tentang dinamika sosial, budaya, dan gender dalam masyarakat. <p>Keterampilan fasilitasi juga harus mencakup kemampuan untuk memfasilitasi diskusi yang sensitif gender, memastikan partisipasi aktif dari semua kelompok (termasuk perempuan dan kelompok marginal), serta mampu mengidentifikasi dan mengatasi potensi konflik atau dinamika gender yang mungkin timbul dalam masyarakat.</p>
Pemahaman Kontekstual	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawasan yang mendalam tentang kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik masyarakat sasaran. 2. Kepekaan terhadap nilai-nilai, norma, dan kearifan lokal. 3. Kemampuan dalam menyesuaikan program dengan konteks dan kebutuhan masyarakat setempat. <p>Pemahaman kontekstual yang kuat juga mencakup pemahaman tentang bagaimana relasi gender dan norma sosial mempengaruhi kehidupan masyarakat. Pendamping harus mampu mengidentifikasi potensi dampak program terhadap kesetaraan gender dan memastikan bahwa program tidak melanggar ketidaksetaraan yang ada.</p>
Kemampuan Monitoring & Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi program. 2. Kemampuan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data. 3. Kemampuan dalam menyusun laporan dan rekomendasi untuk perbaikan program.
Sikap dan Nilai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki komitmen dan dedikasi yang tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat. 2. Memiliki empati, kesabaran, dan kemampuan mendengarkan yang baik. 3. Menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

Melalui analisis kebutuhan yang komprehensif, program pemberdayaan dapat memastikan bahwa pendamping yang terlibat memiliki kualitas yang sesuai untuk menjalankan tugasnya secara optimal. Hal ini tidak hanya berdampak pada keberhasilan implementasi program, tetapi juga pada keberlanjutan dampak positif di komunitas target sasaran.

Peningkatan Kapasitas bagi Para Pendamping

Untuk memastikan pendamping memiliki kompetensi yang memadai dalam mendampingi masyarakat, diperlukan serangkaian aktivitas peningkatan kapasitas yang dirancang secara sistematis dan berkelanjutan. Aktivitas ini mencakup berbagai aspek penting, diantaranya:

Pelatihan Dasar & Lanjutan

- **Aspek Teknis Program:** Pemahaman mendalam tentang bidang program yang dijalankan, seperti WASH, pertanian berkelanjutan, kesehatan masyarakat, atau pemberdayaan ekonomi perempuan.
- **Keterampilan Fasilitasi:** Teknik dalam mengelola sesi diskusi kelompok, membangun partisipasi aktif masyarakat, dan menyampaikan materi secara efektif.
- **Pemahaman Kontekstual:** Analisis sosial, budaya, dan ekonomi komunitas sasaran agar pendamping dapat bekerja dengan pendekatan yang relevan.
- **Kemampuan Monitoring dan Evaluasi:** Cara mengumpulkan data, menyusun laporan, dan mengevaluasi dampak program.

Pelatihan ini diberikan secara bertahap, mulai dari sesi dasar bagi pendamping baru hingga pelatihan lanjutan bagi mereka yang telah memiliki pengalaman.

Penguatan Keterampilan Fasilitasi

Keterampilan fasilitasi dan komunikasi menjadi kunci bagi pendamping dalam membangun kepercayaan serta menciptakan interaksi yang konstruktif dengan komunitas. Aktivitas yang dilakukan meliputi:

- **Teknik Komunikasi Efektif:** Membangun dialog yang terbuka, mendengarkan aktif, serta menyampaikan pesan dengan jelas dan persuasif.
- **Fasilitasi Kelompok:** Cara mengelola diskusi kelompok, mengatasi dinamika sosial, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat.
- **Resolusi Konflik:** Teknik dalam menyelesaikan perbedaan pendapat & membangun konsensus
- **Pendekatan Partisipatif:** Metode untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program agar mereka merasa memiliki dan berperan aktif dalam perubahan sosial.
- **Pelatihan Kesetaraan dan Inklusi:** Bagaimana memastikan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya terlibat dalam program.

Pendampingan oleh Pendamping Senior

Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kapasitas pendamping adalah dengan memberikan mereka pengalaman langsung di lapangan melalui:

- **Magang di Wilayah Sasaran:** Pendamping baru diberikan kesempatan untuk mengamati dan berlatih langsung di komunitas dampingan sebelum mereka bertanggung jawab penuh terhadap suatu program.
- **Mentorship oleh Pendamping Senior:** Pendamping yang lebih berpengalaman memberikan bimbingan, berbagi pengalaman lapangan, serta memberikan umpan balik konstruktif bagi pendamping baru.
- **Evaluasi dan Refleksi Berkala:** Sesi refleksi bersama setelah masa magang untuk membahas tantangan yang dihadapi dan pembelajaran yang diperoleh.

Uji Kompetensi Berkala

- **Uji kompetensi:** Melakukan asesmen untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap pendamping setelah mengikuti pelatihan.
- **Mekanisme sertifikasi:** Memberikan sertifikat kompetensi bagi pendamping yang memenuhi standar yang ditetapkan. Sertifikasi ini merupakan bukti pengakuan atas kualitas & kelayakan pendamping.
- **Evaluasi kinerja secara berkala:** Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pendamping secara berkesinambungan untuk memastikan efektivitas pendampingan dan mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas lebih lanjut.

03. Sosialisasi Program Pemberdayaan Masyarakat

Sosialisasi program pemberdayaan masyarakat merupakan tahapan krusial untuk memastikan kesamaan pemahaman dan dukungan dari semua pihak terkait. Sosialisasi yang efektif akan meningkatkan partisipasi, kepemilikan, dan keberlanjutan program.

Target Sosialisasi

Sosialisasi program harus menjangkau seluruh stakeholders yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kelompok sasaran utama meliputi:

Pelaksana Program	
Target	Tujuan
Tim pengelola program	Memiliki pemahaman mendalam tentang pedoman agar dapat mengelola dan melaksanakan program secara efektif
Lembaga mitra pelaksana	Menyelaraskan kegiatan mereka dengan pedoman program.
Fasilitator dan pendamping lapangan	Menerapkan pedoman dalam kegiatan pendampingan dan interaksi dengan masyarakat.
Relawan	Memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam mendukung program.

Penerima Manfaat	
Target	Tujuan
Target sasaran (masyarakat miskin dan rentan)	Memahami tujuan, manfaat, dan mekanisme program agar dapat berpartisipasi aktif.
Kelompok masyarakat lain	Memahami peran mereka dalam mendukung implementasi program.

Pemangku Kepentingan	
Target	Tujuan
Pemerintah daerah atau desa	Memberikan dukungan kebijakan dan fasilitasi.
Tokoh masyarakat & agama	Memahami peran mereka dalam mendukung implementasi program.
Lembaga swadaya masyarakat	Bersinergi dengan program dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
Sektor swasta	Berkontribusi melalui program CSR atau kemitraan lainnya.

Metode Sosialisasi

Agar sosialisasi efektif dan menjangkau seluruh audiens, perlu menerapkan strategi komunikasi yang komprehensif dengan memanfaatkan berbagai metode:

Pertemuan Tatap Muka

- **Lokakarya dan diskusi interaktif:** Memfasilitasi dialog dan pemahaman yang mendalam tentang pedoman program.
- **Presentasi dengan alat bantu visual:** Menyampaikan informasi secara terstruktur dan menarik.

Media Digital

- **Website dan media sosial:** Memudahkan akses informasi bagi publik yang lebih luas.
- **WhatsApp, Telegram, dll.:** Memanfaatkan platform komunikasi populer untuk menjangkau masyarakat secara luas.
- **Video pendek/animasi:** Menyampaikan informasi secara ringkas, menarik, dan mudah dipahami.

Media Cetak

- **Buku saku/leaflet:** Ringkasan informasi penting yang mudah dipahami dan dibawa.
- **Poster dan infografis:** Penyajian visual yang menarik dan mudah dicerna.
- **Panduan tertulis:** Penjelasan lengkap tentang pedoman program dengan bahasa yang mudah dipahami.

Advokasi dan Komunikasi Langsung

- **Melibatkan tokoh masyarakat dan pemimpin komunitas:** Memanfaatkan kepercayaan dan pengaruh mereka dalam menyampaikan informasi.
- **Forum desa/musyawarah masyarakat:** Mengintegrasikan sosialisasi dengan mekanisme pengambilan keputusan di tingkat komunitas.
- **Sesi konsultasi langsung:** Memberikan ruang bagi masyarakat untuk bertanya dan mendapatkan penjelasan secara personal.

Dalam melaksanakan sosialisasi program, perlu untuk mengacu pada metode sosialisasi yang berperspektif GEDSI (*Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*) untuk memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

- **Waktu, Jarak, dan Lokasi:** Pertimbangkan waktu pelaksanaan yang sesuai dengan mayoritas sasaran, hindari bentrok dengan jam kerja atau kegiatan rutin lainnya. Pilih lokasi yang mudah dijangkau dan aksesibel bagi semua kelompok, termasuk penyandang disabilitas.
- **Akomodasi yang Wajar:** Sediakan akomodasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, seperti Juru Bahasa Isyarat (JBI) bagi tuli, tenaga pendamping bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan, area bermain anak, atau ruangan laktasi.
- **Biaya Transport dan Akomodasi:** Jika lokasi sosialisasi jauh dan membutuhkan biaya, sediakan transportasi dan akomodasi yang terjangkau.
- **Media Komunikasi yang Inklusif:** Gunakan media cetak/elektronik yang responsif gender dan inklusif. Pastikan bahasa dan istilah/terminologi yang digunakan inklusif dan tidak bias gender. Libatkan penyandang disabilitas dalam pembuatan materi sosialisasi untuk memastikan aksesibilitasnya.

- **Partisipasi Aktif:** Dorong partisipasi aktif dari semua kelompok sasaran, termasuk kelompok marginal. Sediakan ruang diskusi yang aman dan inklusif.
- **Evaluasi:** Lakukan evaluasi terhadap efektivitas metode sosialisasi yang digunakan, dan umpan balik dari peserta untuk perbaikan di masa mendatang.

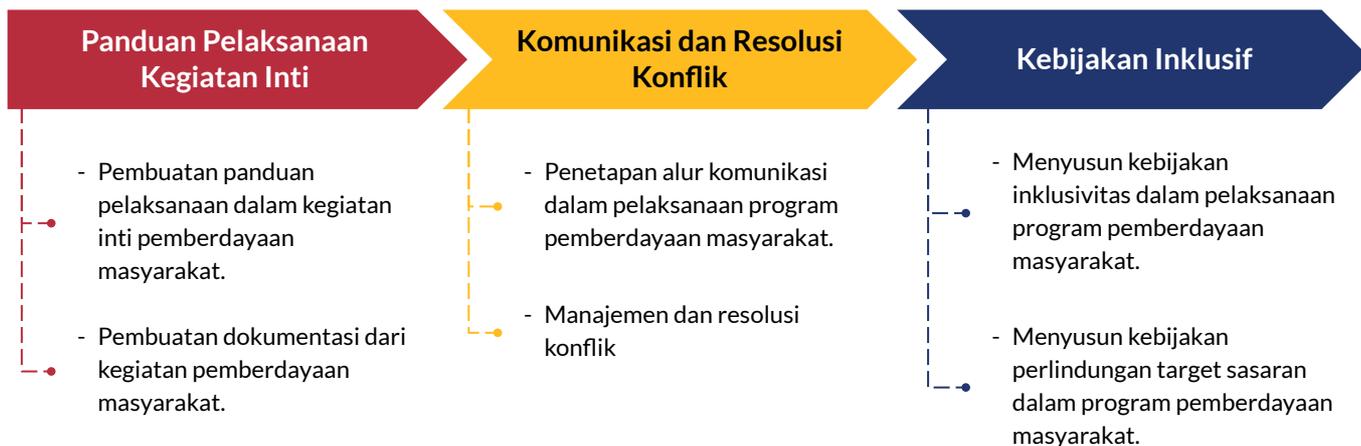
Dengan memperhatikan prinsip-prinsip GEDSI dalam sosialisasi program, diharapkan semua pihak terkait dapat memahami, mendukung, dan berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan masyarakat, sehingga tujuan program dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

Untuk memastikan sosialisasi program berjalan efektif dan menjangkau seluruh audiens yang ditargetkan, diperlukan alur pelaksanaan yang sistematis dengan metode komunikasi yang beragam. Berikut ini adalah rekomendasi tahapan dan linimasa yang dirancang untuk memastikan informasi dapat tersampaikan secara luas, dipahami dengan baik oleh masyarakat, serta memberikan ruang bagi dialog dan konsultasi:

Tahap	Kegiatan	Metode Sosialisasi	Waktu Pelaksanaan
Tahap 1: Persiapan	Penyusunan materi sosialisasi (buku saku, infografis, panduan)	Media Cetak, Media Digital	Minggu 1
Tahap 2: Sosialisasi Awal	Koordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemimpin komunitas	Advokasi dan Komunikasi Langsung	Minggu 1-2
	Lokakarya dan diskusi interaktif dengan pemangku kepentingan	Pertemuan Tatap Muka	Minggu 3
	Distribusi materi cetak ke komunitas	Media Cetak	Minggu 3-4
	Publikasi informasi di website dan media sosial	Media Digital	Minggu 3-4
Tahap 3: Penyebaran Informasi Luas	Kampanye WhatsApp, Telegram, & media sosial	Media Digital	Minggu 5-6
	Pemasangan poster dan infografis di lokasi strategis	Media Cetak	Minggu 5-6
Tahap 4: Konsultasi dan Pendalaman	Forum desa/musyawarah masyarakat	Advokasi dan Komunikasi Langsung	Minggu 7
	Sesi konsultasi langsung bagi masyarakat	Advokasi dan Komunikasi Langsung	Minggu 7-8

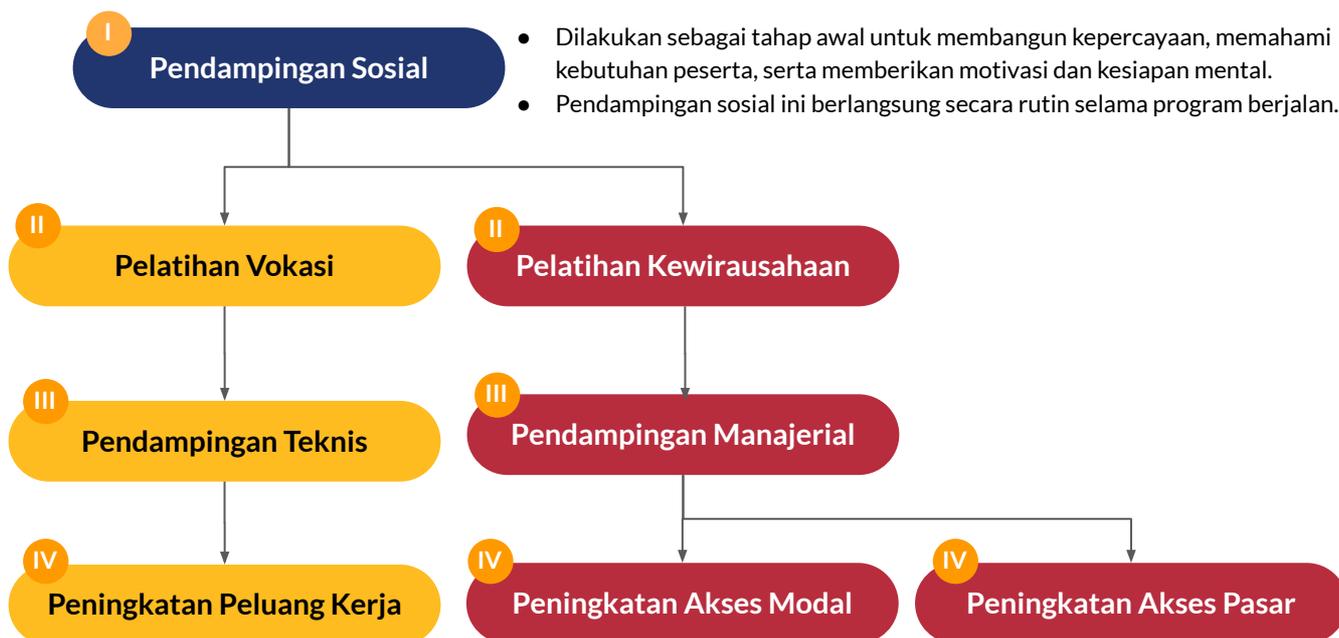
3.3.5 Tahap Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Rentan untuk Kemandirian Ekonomi

Implementasi kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan tahapan **penerjemahan rencana program ke dalam aksi nyata di lapangan**. Pada tahap ini, seluruh rencana yang telah disusun pada tahap perencanaan dijalankan. Proses implementasi harus dilakukan secara **terstruktur, terukur, dan partisipatif**, dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap kegiatan.



01. Panduan Pelaksanaan Kegiatan Inti

Panduan pelaksanaan kegiatan inti ini disusun sebagai acuan untuk memastikan implementasi program pemberdayaan masyarakat berjalan secara efektif, terstruktur, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Panduan ini akan diuraikan sesuai dengan model intervensi:



- Diharapkan dapat diimplementasikan di semua model program pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan
- Alur dan model intervensi pemberdayaan yang berfokus pada peningkatan keterampilan kerja
- Alur dan model intervensi pemberdayaan yang berfokus pada peningkatan keterampilan usaha

Pendampingan Sosial

Tujuan

- Meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri masyarakat.
- Mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi masyarakat.
- Membangun kepercayaan dan kohesi sosial dalam masyarakat.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak dan kewajibannya.
- Memfasilitasi masyarakat dalam mengatasi masalah sosial yang mereka hadapi.

Durasi dan Sesi

- **Durasi Program:** 2-3 bulan
- **Jumlah Sesi:** 8-10 sesi
- **Durasi per Sesi:** 2-3 jam

Dengan durasi tersebut, program dapat mencakup sesi teori, praktik, dan pendampingan langsung. Peserta akan mendapatkan cukup waktu untuk memahami materi dan menerapkannya dalam konteks usaha mereka.

Pelaksanaan

- **Konseling Individu (40%):** Memberikan konseling dan bimbingan kepada individu yang menghadapi masalah pribadi atau sosial.
- **Bimbingan Kelompok (40%):** Memfasilitasi bimbingan kelompok agar masyarakat dapat berbagi pengalaman, mendapatkan dukungan emosional, dan saling belajar.
- **Kunjungan Rumah (*Home Visit*) (20%) :** Melakukan kunjungan rumah untuk memberikan pendampingan dan dukungan langsung kepada masyarakat di lingkungan mereka.

Tugas dan Evaluasi

- Peserta membuat rencana kegiatan kelompok atau individu untuk meningkatkan hubungan sosial dan kerja sama.
- Mengidentifikasi masalah sosial di komunitas mereka dan solusi berbasis kelompok.

Metode Pendampingan Sosial

- Metode pendampingan sosial melibatkan pemberian dukungan emosional dan sosial kepada individu atau kelompok untuk membangun motivasi dan kepercayaan diri. Pendampingan ini dilakukan melalui sesi konseling, bimbingan kelompok, dan kunjungan rumah untuk memberikan dukungan langsung di lingkungan mereka.

Pelatihan Vokasi

Tujuan

- Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat di bidang yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan potensi ekonomi lokal.
- Meningkatkan daya saing masyarakat di pasar kerja.
- Memfasilitasi penciptaan lapangan kerja dan pengembangan usaha mandiri.
- Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Durasi dan Pertemuan

- **Durasi Program:** 1–2 bulan
- **Jumlah Sesi:** 8–10 sesi
- **Durasi per Sesi:** 2–3 jam

Total jam pelatihan berkisar 20–30 jam, disesuaikan dengan kebutuhan dan waktu yang tersedia bagi peserta.

Pelaksanaan

- **Sesi Teori (30%):** Memberikan fondasi pemahaman sebelum praktik, sehingga peserta dapat memahami konsep dengan baik.
- **Sesi Praktik (50%):** Praktik langsung diperlukan untuk meningkatkan kompetensi peserta, yang cenderung lebih efektif dibanding teori semata.
- **Praktik Kerja Lapangan(20%):** Memberikan kesempatan kepada peserta untuk menerapkan keterampilan yang dipelajari di dunia kerja yang sesungguhnya.

Tugas dan Evaluasi

- Tugas individu untuk mempraktikkan keterampilan tertentu di rumah.
- Evaluasi melalui uji kompetensi sederhana atau presentasi hasil kerja.

Metode Pengajaran

- Kombinasi metode ruang kelas , diskusi kelompok, praktik langsung, dan studi kasus.
- Fasilitator berasal dari tenaga ahli atau praktisi terkait.

Pendampingan Teknis

Tujuan

- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis masyarakat di bidang yang relevan dengan program pemberdayaan masyarakat.
- Memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
- Membantu masyarakat dalam memecahkan masalah teknis yang dihadapi dalam kegiatan ekonomi produktif.

Durasi dan Sesi

- **Total Durasi:** 1-2 bulan
- **Jumlah Sesi:** 6-8 sesi
- **Durasi per Sesi:** 3-4 jam

Total jam pelatihan berkisar 18-32 jam, disesuaikan dengan kebutuhan dan waktu yang tersedia bagi peserta.

Pelaksanaan

- **Sesi Demonstrasi (30%):** Memberikan panduan praktis tentang cara melakukan sesuatu dengan menunjukkan langkah-langkahnya secara langsung. Kunjungan lapangan dilakukan untuk mengamati langsung lokasi usaha atau kegiatan masyarakat, sekaligus memberikan bimbingan dan masukan yang relevan.
- **Sesi Praktik (50%):** Melibatkan simulasi pembuatan rencana usaha dan perhitungan kebutuhan produksi. Pelatihan langsung dilakukan untuk mengajarkan penggunaan alat atau teknologi yang diperkenalkan.
- **Diskusi (20%):** Mengevaluasi hasil praktik peserta untuk mengidentifikasi tantangan dan area yang perlu diperbaiki. Pendampingan individu atau kelompok diberikan untuk memastikan pemahaman teknis yang optimal.

Tugas dan Evaluasi

- Peserta membuat rencana usaha lengkap yang mencakup kebutuhan produksi, peralatan, dan estimasi biaya.
- Menyusun laporan implementasi teknologi dalam usaha mereka.

Metode Pengajaran

- Pendampingan teknis budi daya tanaman organik.
- Pendampingan teknis pengolahan hasil perikanan.
- Pendampingan teknis pemanfaatan teknologi informasi untuk pemasaran produk.
- Pendampingan teknis perbaikan dan perawatan mesin produksi.

Pelatihan Kewirausahaan

Tujuan

- Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang konsep dan prinsip-prinsip kewirausahaan.
- Mengembangkan keterampilan masyarakat dalam mengidentifikasi peluang usaha, menyusun rencana usaha, mengelola keuangan, dan memasarkan produk.
- Membentuk sikap dan mental wirausaha yang tangguh, kreatif, dan inovatif.
- Memotivasi masyarakat untuk memulai dan mengembangkan usaha mandiri.

Durasi dan Sesi

- **Durasi Program:** 1–2 bulan
- **Jumlah Sesi:** 8–10 sesi
- **Durasi per Sesi:** 2–3 jam

Total jam pelatihan berkisar 20–30 jam, disesuaikan dengan kebutuhan dan waktu yang tersedia bagi peserta.

Pelaksanaan

- **Sesi Teori (40%):** Memberikan pemahaman tentang aspek-aspek penting kewirausahaan, seperti perencanaan, pemasaran, dan pengelolaan keuangan. Studi kasus membantu peserta memahami penerapan teori dalam situasi nyata.
- **Sesi Praktik (40%):** Simulasi dan latihan *pitching* memberikan pengalaman langsung kepada peserta, melatih kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan tantangan nyata.
- **Pendampingan dan Diskusi (20%):** Diskusi dengan mentor memberikan wawasan tambahan yang tidak tersedia di buku atau modul pelatihan.

Tugas dan Evaluasi

- Membuat rencana bisnis individu atau kelompok.
- Evaluasi melalui presentasi rencana bisnis kepada panel mentor atau pelatih.

Metode Pengajaran

- Kombinasi metode ruang kelas, diskusi kelompok, praktik langsung, dan studi kasus.
- Fasilitator berasal dari tenaga ahli atau praktisi terkait.

Pendampingan Manajerial

Tujuan

- Meningkatkan keterampilan manajemen dan administrasi masyarakat.
- Membantu masyarakat dalam menyusun perencanaan usaha atau kegiatan ekonomi yang matang.
- Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan dan administrasi usaha.
- Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam mengorganisasi dan memimpin kelompok usaha.
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan ekonomi masyarakat.

Durasi dan Sesi

- **Total Durasi:** 1-2 bulan
- **Jumlah Sesi:** 6-8 sesi
- **Durasi per Sesi:** 3-4 jam

Total jam pelatihan berkisar 18-32 jam, disesuaikan dengan kebutuhan dan waktu yang tersedia bagi peserta.

Pelaksanaan

- **Pelatihan (30%):** Memberikan pelatihan manajemen usaha, keuangan, dan administrasi kepada masyarakat untuk membangun dasar kemampuan mereka.
- **Studi Kasus dan Simulasi (25%):** Menggunakan studi kasus dan simulasi usaha untuk meningkatkan keterampilan analisis dan pengambilan keputusan.
- **Konsultasi Manajemen (20%):** Menyediakan sesi konsultasi individual atau kelompok untuk memberikan saran spesifik terkait tantangan manajerial yang dihadapi.
- **Pendampingan di Tempat Usaha (25%):** Memberikan bimbingan langsung di lokasi usaha masyarakat untuk memastikan penerapan praktik yang telah diajarkan.

Tugas dan Evaluasi

- Peserta membuat laporan keuangan bulanan dengan menggunakan templat yang diberikan.
- Menyusun rencana pengelolaan tim atau usaha mereka, termasuk pembagian tugas dan target usaha.

Metode Pengajaran

- Program ini memerlukan kombinasi antara **metode ruang kelas (*classroom learning*)** untuk teori dan prinsip dasar serta **pendampingan praktis** yang dilakukan di tempat usaha untuk mendalami pengelolaan bisnis.

Peningkatan Akses Modal

Tujuan

- Memudahkan masyarakat miskin dan rentan dalam mendapatkan modal usaha.
- Meningkatkan jumlah dan keberagaman sumber permodalan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola keuangan dan memanfaatkan modal secara efektif.

Durasi dan Sesi

- **Durasi Program:** 2 bulan
- **Jumlah Sesi:** 4–6 sesi
- **Durasi per Sesi:** 3–4 jam

Total jam pelatihan sekitar 15–20 jam, dengan jadwal yang fleksibel selama 2 bulan untuk memastikan pendampingan berjalan optimal.

Pelaksanaan

- **Sesi Teori (20%):** Sesi ini memberikan pengetahuan dasar tentang jenis-jenis sumber modal, persyaratan administrasi, dan langkah-langkah teknis pengajuan modal. Peserta juga mendapatkan wawasan tentang strategi manajemen keuangan untuk meningkatkan aksesibilitas modal.
- **Sesi Fasilitasi (50%):** Peserta mengikuti berbagai kegiatan seperti *pitching* bisnis, *business matching*, dan *networking* dengan calon mitra atau investor. Sesi ini dirancang untuk memperkuat kemampuan komunikasi dan membangun koneksi strategis dengan pihak-pihak terkait.
- **Sesi Bimbingan (30%):** Sesi ini berfokus pada penyusunan dokumen formal seperti MoU dan proposal pembiayaan. Peserta juga mendapatkan panduan teknis dalam mempersiapkan strategi finansial yang solid untuk mendukung keberlanjutan usaha.

Tugas dan Evaluasi

- Tugas berupa penyusunan proposal usaha lengkap dan rencana penggunaan modal. Evaluasi melalui penilaian proposal dan simulasi *pitching* di hadapan mentor.
- Di akhir sesi program, peserta diharuskan mengirimkan proposal ke sumber modal tertentu.

Metode Pengajaran

- Peserta diminta melakukan *scouting* untuk mengidentifikasi calon pemberi modal yang potensial, seperti donatur, investor, atau penyedia pinjaman.
- Hasil *scouting* ini harus dilaporkan dalam bentuk daftar kandidat lengkap dengan informasi kontak dan potensi kontribusi mereka.

Peningkatan Akses Pasar

Tujuan

- Memperluas jangkauan pasar produk atau jasa masyarakat.
- Meningkatkan volume penjualan dan pendapatan masyarakat.
- Meningkatkan daya saing produk atau jasa masyarakat.
- Membangun kemitraan dan jaringan pemasaran yang berkelanjutan.

Durasi dan Sesi

- **Durasi Program:** 2–3 bulan
- **Jumlah Sesi:** 8–10 sesi
- **Durasi per Sesi:** 2–3 jam

Total jam pelatihan berkisar 20–30 jam, disesuaikan dengan kebutuhan dan waktu yang tersedia bagi peserta.

Pelaksanaan

- **Sesi Teori (10%):** Peserta diberikan pemahaman dasar tentang kewirausahaan, strategi bisnis, dan pengelolaan usaha secara efektif.
- **Bazar dan Pameran (30%):** Peserta mempraktikkan pemasaran produk secara langsung melalui partisipasi dalam bazar atau kegiatan pameran untuk memperluas jaringan pasar.
- **Kemitraan dengan *Offtaker* atau Calon Mitra (30%):** Peserta difasilitasi untuk menjalin hubungan dengan *offtaker* atau calon mitra potensial guna mendukung keberlanjutan usaha.
- **Bimbingan Penyusunan MoU dan Akses Digital (30%):** Peserta dibimbing dalam menyusun kesepakatan kerja sama formal, seperti MoU, sekaligus diajarkan cara memanfaatkan *platform* digital, seperti *e-commerce* dan media sosial untuk memasarkan produk.

Tugas dan Evaluasi

- Peserta diminta untuk menyusun strategi pemasaran produk dan mempresentasikan ide tersebut kepada fasilitator serta anggota kelompok untuk mendapatkan masukan.
- Peserta juga membuat draft MoU sebagai langkah awal menjalin kerja sama dengan calon mitra.

Metode Pengajaran

- Kombinasi metode ruang kelas, diskusi kelompok, praktik langsung, dan studi kasus.
- Pelatihan praktis yang melibatkan peserta dalam mempersiapkan dan menjalankan bazar, termasuk pengaturan *booth*, presentasi produk, dan pengelolaan transaksi.

Panduan Pembuatan Dokumentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Dokumentasi kegiatan pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk mencatat proses, hasil, dan dampak dari program yang dilaksanakan. Dokumentasi yang baik tidak hanya berfungsi sebagai laporan, tetapi juga sebagai alat pembelajaran dan referensi untuk pengembangan program selanjutnya. Berikut adalah langkah-langkah dalam pembuatan dokumentasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Absensi kegiatan

Dokumentasi absensi penting untuk mencatat partisipasi setiap individu dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Data yang dibutuhkan untuk dokumentasi absensi adalah:

- **Nama Peserta:** Nama lengkap setiap peserta yang hadir.
- **Identitas Peserta:** Informasi terkait kelompok sasaran, misalnya anggota kelompok perempuan tani, pelajar, penyandang disabilitas, dan lain-lain.
- **Tanggal Kehadiran:** Tanggal dan waktu kegiatan berlangsung.
- **Tanda Tangan Peserta:** Tanda tangan peserta sebagai bukti kehadiran.
- **Nomor Kontak Peserta:** Nomor telepon atau alamat surel untuk keperluan tindak lanjut (*follow-up*) atau komunikasi lebih lanjut.
- **Status Kehadiran:** Catatan apakah peserta hadir penuh atau hanya sebagian waktu, misalnya hadir setengah hari atau terlambat.

Dokumentasi Dampak

Dokumentasi ini digunakan untuk laporan akhir kepada pihak terkait dan sebagai bahan monitoring untuk mengevaluasi dampak kegiatan. Data yang diperlukan adalah:

- **Umpan Balik (*Feedback*) dari Peserta:** Evaluasi dan umpan balik dari peserta kegiatan mengenai materi, fasilitator, dan relevansi program terhadap kebutuhan mereka.
- **Tantangan yang Dihadapi:** Identifikasi masalah yang muncul selama pelaksanaan kegiatan dan solusi yang diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut.
- **Rekomendasi untuk Kegiatan Selanjutnya:** Saran-saran berdasarkan pengalaman yang didapatkan, baik dari sisi pelaksanaan maupun hasil yang dicapai.
- **Laporan Anggaran dan Pembiayaan:** Menyusun rincian anggaran dan penggunaan dana dalam kegiatan, termasuk pendanaan dari donor atau sponsor.
- **Survei atau Kuesioner Evaluasi:** Data yang diambil melalui survei atau kuesioner dari peserta mengenai efektivitas kegiatan dan saran perbaikan untuk program mendatang.

Dokumentasi Pelaksanaan

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan berfungsi untuk merekam proses dan dinamika yang terjadi selama kegiatan berlangsung. Data yang diperlukan dalam dokumentasi pelaksanaan kegiatan adalah:

- **Nama Kegiatan:** Nama kegiatan atau program yang dilaksanakan
- **Tanggal dan Waktu:** Tanggal dan waktu kegiatan.
- **Lokasi Kegiatan:** Tempat kegiatan berlangsung, misalnya Desa A, Kecamatan B, Kabupaten C.
- **Deskripsi Kegiatan:** Rincian tujuan dan kegiatan yang dilakukan selama acara.
- **Daftar Peserta:** Jumlah dan jenis peserta yang hadir, termasuk gender, usia, dan latar belakang.
- **Materi atau Topik Kegiatan:** Isi atau pokok bahasan yang disampaikan dalam kegiatan, misalnya pelatihan pertanian berkelanjutan, teknik daur ulang sampah.
- **Penyaji atau Fasilitator:** Nama dan identitas pemateri atau fasilitator yang menyampaikan materi.
- **Proses Kegiatan:** Langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan selama kegiatan berlangsung, termasuk sesi tanya jawab, diskusi kelompok, atau latihan praktis.
- **Foto dan Video:** Dokumentasi visual berupa foto dan video yang menunjukkan suasana, aktivitas, dan interaksi dalam kegiatan.
- **Catatan Khusus:** Hal-hal penting yang terjadi selama kegiatan yang memerlukan perhatian khusus, misalnya masalah teknis, perubahan jadwal, atau isu yang muncul.

Catatan penting: Dokumentasi-dokumentasi di atas perlu diintegrasikan dengan dokumen kerangka kerja *monev logframe analysis* untuk mempermudah proses analisis data di kemudian hari.

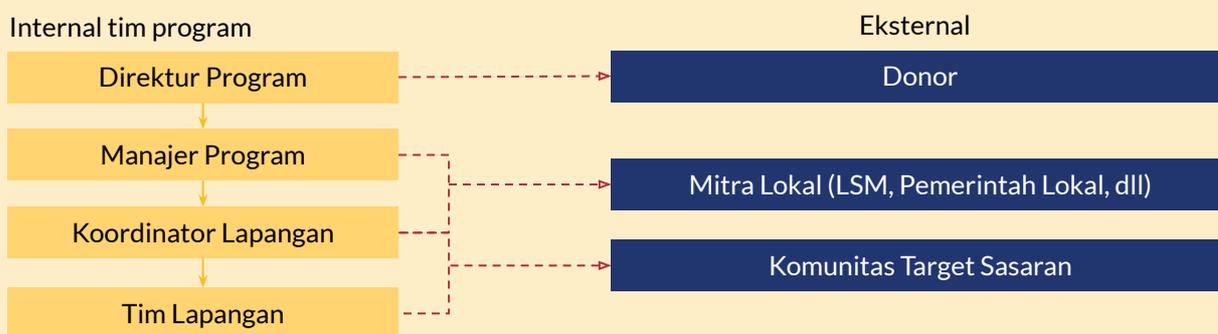
02. Komunikasi dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan

Penetapan Alur Komunikasi dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

Alur komunikasi yang jelas sangat penting untuk memastikan semua pihak yang terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat dapat bekerja secara efektif, memahami tugas masing-masing, dan bersama-sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut contohnya:



Contoh Tingkatan dan Alur Komunikasi



Contoh tabel untuk merinci jalur komunikasi:

Pihak yang Terlibat	Media yang Digunakan	Frekuensi Komunikasi	Jenis Informasi	Penanggung Jawab
Tim Lapangan → Koordinator	WhatsApp/ Telegram	Harian	Pembaruan kegiatan harian, kendala	Koordinator Lapangan
Koordinator → Manajer	Rapat Mingguan (Zoom)	Mingguan	Laporan mingguan, perkembangan program	Manajer Program
Program → Komunitas Sasaran	Pertemuan Tatap Muka	Bulanan	Sosialisasi program, evaluasi	Fasilitator Komunitas
Program → Donor	Surel/Presentasi	Bulanan	Laporan resmi, dokumentasi kegiatan	Manajer Program

Format ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik program dan memungkinkan fleksibilitas dalam pelaksanaannya.

Manajemen dan Resolusi Konflik

Manajemen konflik dalam program pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan konflik agar tidak menghambat pencapaian tujuan program. Berikut langkah-langkah dan contohnya:

Langkah	Detail
Identifikasi Konflik	<ul style="list-style-type: none"> - Lakukan pemantauan secara rutin untuk mendeteksi tanda-tanda konflik, seperti ketidaksepahaman atau keluhan. - Kumpulkan informasi dari semua pihak yang terlibat untuk memahami akar masalah. - Gunakan pendekatan yang netral dan tidak memihak.
Analisis Konflik	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi penyebab utama konflik, seperti miskomunikasi, perbedaan kepentingan, atau kurangnya transparansi. - Tentukan pihak-pihak yang terlibat dan dampak konflik terhadap program. - Kategorikan konflik menjadi konflik kecil, sedang, atau besar untuk menentukan prioritas penyelesaian.
Penyelesaian Konflik	<ul style="list-style-type: none"> - Pilih metode penyelesaian, seperti mediasi, negosiasi, atau fasilitasi. - Libatkan pihak netral untuk memediasi konflik, jika diperlukan. - Pastikan semua pihak merasa didengar dan solusi yang diambil bersifat saling menguntungkan (<i>win-win</i>).
Dokumentasi dan Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> - Catat semua proses dan hasil penyelesaian konflik untuk dijadikan pelajaran di masa depan. - Tinjau ulang kebijakan atau prosedur yang memicu konflik dan lakukan revisi jika diperlukan.

Kerangka Kerja Manajemen dan Resolusi Konflik

Tipe Konflik	Kategori	Pihak Terlibat	Opsi Penyelesaian
Konflik Komunikasi <i>Contoh: Peserta salah memahami waktu pelaksanaan kegiatan karena informasi yang tidak konsisten.</i>	Kecil	- Peserta kegiatan dan fasilitator.	<ul style="list-style-type: none"> - Mengadakan pertemuan klarifikasi untuk menyelesaikan kesalahpahaman. - Memastikan semua pihak mendapat informasi yang sama dan jelas melalui forum tanya jawab.
Konflik Kepentingan <i>Contoh: Alokasi dana program dianggap tidak merata oleh satu kelompok masyarakat.</i>	Sedang	- Kelompok masyarakat dengan organisasi mitra pelaksana program.	<ul style="list-style-type: none"> - Diskusi bersama untuk mencapai kesepakatan bersama. - Melibatkan mediator independen untuk memfasilitasi komunikasi.
Konflik Teknis atau Operasional <i>Contoh: Keterlambatan distribusi alat pendukung karena masalah logistik yang tidak terkoordinasi.</i>	Sedang	- Pelaksana program dan peserta kegiatan.	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan evaluasi teknis untuk memahami penyebab konflik. - Menyusun ulang rencana pelaksanaan program dengan masukan dari semua pihak.
Konflik Sosial-Budaya <i>Contoh: Penolakan oleh komunitas tertentu karena kegiatan dianggap tidak sesuai dengan nilai adat mereka.</i>	Besar	- Kelompok masyarakat dengan latar budaya berbeda.	<ul style="list-style-type: none"> - Mengadakan dialog budaya untuk saling memahami perbedaan. - Melibatkan tokoh masyarakat atau pemimpin adat untuk melakukan mediasi. - Membuat pedoman inklusivitas yang menghormati budaya lokal.

Kecil: Hanya melibatkan individu atau kelompok kecil, tidak berdampak signifikan pada pelaksanaan program secara keseluruhan.

Sedang: Berpotensi memengaruhi keberlangsungan sebagian kegiatan, tetapi tidak menyebabkan penghentian program secara keseluruhan.

Besar: Melibatkan banyak pihak atau isu sensitif yang berpotensi menghentikan program secara keseluruhan jika tidak segera diselesaikan.

03. Kebijakan Inklusif dan Perlindungan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat

Kebijakan Inklusif

Kebijakan inklusivitas biasanya mencakup beberapa aspek yang memastikan semua individu, terutama kelompok rentan, memiliki akses yang setara dan adil dalam program pemberdayaan masyarakat. Berikut adalah aspek-aspek utama kebijakan inklusivitas:

Aksesibilitas

- **Fisik:** Memastikan tempat kegiatan dapat diakses oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas, misalnya akses kursi roda dan ruang bebas hambatan.
- **Digital:** Jika kegiatan dilakukan secara daring, menyediakan *platform* yang ramah pengguna dan akses internet bagi mereka yang tidak memilikinya.
- **Informasi:** Penyediaan materi dalam berbagai format (audio, visual, braille) untuk memenuhi kebutuhan peserta yang berbeda.

Kesetaraan Partisipasi

- Memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta untuk terlibat aktif, terlepas dari gender, usia, status ekonomi, atau disabilitas.
- Menghindari diskriminasi, stereotipe, atau bias dalam pelibatan peserta.

Representasi

- Melibatkan perwakilan dari kelompok rentan atau tersisih dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.
- Memastikan tim pelaksana mencerminkan keragaman komunitas yang dilayani.

Tanpa Diskriminasi

- Menyusun aturan yang melarang diskriminasi berdasarkan gender, agama, etnis, kemampuan fisik, atau status sosial.
- Memberikan sanksi yang jelas terhadap tindakan diskriminatif.

Keseimbangan Gender

- Memastikan keterlibatan perempuan, laki-laki, dan gender lainnya dalam setiap tahapan program.
- Mengidentifikasi hambatan khusus yang dialami oleh perempuan atau kelompok marginal lainnya, seperti beban kerja domestik.

Penyesuaian Konteks Lokal

- Memastikan program sesuai dengan nilai-nilai lokal sambil tetap mendorong perubahan yang positif.
- Melibatkan pemimpin komunitas untuk mendukung penerimaan program.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini, kebijakan inklusivitas dapat memastikan semua peserta merasa dihargai, diberdayakan, dan terlibat dalam program secara adil.

Kebijakan Perlindungan

Kebijakan Perlindungan (*Safeguarding Policy*) dalam program bertujuan untuk melindungi semua pihak, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas, dari risiko eksploitasi, kekerasan, pelecehan, atau diskriminasi selama pelaksanaan program. Berikut adalah aspek-aspek penting dan contohnya:

Aspek	Detail	Contoh
Identifikasi Risiko	<ul style="list-style-type: none"> - Memetakan potensi risiko yang dapat terjadi selama pelaksanaan program. - Menyusun langkah mitigasi untuk mengurangi atau menghilangkan risiko. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengantisipasi kemungkinan eksploitasi pekerja anak dalam kegiatan komunitas. - Menyusun protokol keamanan untuk kegiatan yang melibatkan perjalanan ke daerah rawan konflik.
Prosedur Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan mekanisme pelaporan bagi peserta atau staf yang mengalami atau menyaksikan pelanggaran. - Melindungi identitas pelapor untuk menghindari dampak negatif. 	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk tim khusus untuk menangani laporan pelanggaran. - Menyediakan <i>hotline</i> atau kotak saran anonim untuk menerima laporan insiden.
Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pelatihan kepada staf dan mitra tentang kebijakan perlindungan. - Meningkatkan kesadaran peserta tentang hak-hak mereka dan tindakan yang dapat mereka ambil jika terjadi pelanggaran. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengadakan lokakarya (<i>workshop</i>) untuk tim pelaksana tentang tanda-tanda kekerasan atau eksploitasi. - Memberikan panduan tertulis kepada peserta mengenai mekanisme perlindungan yang tersedia.
Zero Tolerance terhadap Pelecehan dan Kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> - Menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan, pelecehan, atau diskriminasi tidak akan ditoleransi dalam program. - Menetapkan sanksi tegas bagi pelaku pelanggaran. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengeluarkan peserta atau staf yang terbukti melakukan pelecehan selama kegiatan. - Memutus kerja sama dengan mitra yang tidak mematuhi kebijakan perlindungan. - Memberikan pendampingan hukum kepada korban jika diperlukan.
Pelibatan Komunitas	<ul style="list-style-type: none"> - Melibatkan komunitas lokal dalam menyusun kebijakan perlindungan untuk memastikan relevansi dan penerimaan. - Memastikan keterlibatan tokoh masyarakat sebagai pendukung kebijakan perlindungan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengadakan diskusi kelompok dengan komunitas untuk membahas kebutuhan perlindungan khusus. - Melibatkan pemuka agama dalam menyosialisasikan nilai-nilai perlindungan.
Dukungan untuk Korban	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan bantuan psikologis, medis, atau hukum kepada korban kekerasan atau pelecehan. - Memastikan korban tidak mengalami dampak negatif lanjutan (stigma atau pembalasan). 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan layanan konseling bagi korban pelecehan dalam kegiatan. - Mendampingi korban dalam melaporkan insiden ke pihak berwenang.

3.3.6 Tahap Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin & Rentan untuk Kemandirian Ekonomi

Tahapan ini bertujuan untuk menilai efektivitas program, mengukur dampak, dan mengidentifikasi area perbaikan. Evaluasi dan monitoring yang sistematis dan berkelanjutan akan membantu memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.



Dalam program pemberdayaan masyarakat, monitoring dan evaluasi yang efektif sangat penting untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Salah satu komponen kunci dalam monitoring dan evaluasi adalah sistem informasi manajemen (MIS). MIS yang komprehensif memungkinkan pengelolaan data program secara sistematis, analisis data yang mendalam, dan pelaporan yang informatif. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang komponen-komponen MIS dalam program pemberdayaan masyarakat:

Manajemen Data	Analisis Data	Pelaporan
<ul style="list-style-type: none"> • Proses manajemen data program pemberdayaan masyarakat. • Seluruh siklus pengelolaan data, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, hingga penyajian informasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Proses analisis dari hasil dokumentasi kegiatan program pemberdayaan masyarakat. • Analisis data kuantitatif dan kualitatif untuk mengevaluasi efektivitas program, mengukur dampak, dan mengidentifikasi area perbaikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan laporan program pemberdayaan masyarakat. • Penyusunan laporan yang sistematis dan informatif untuk mengkomunikasikan hasil program kepada stakeholders, termasuk pemerintah, donor, dan masyarakat.

01. Pengumpulan Data

Data yang perlu dikumpulkan harus merujuk pada indikator yang ditetapkan pada *logframe* pada tahap persiapan. Beberapa contoh indikator yang dapat digunakan dalam program pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan untuk kemandirian ekonomi antara lain:

<p>Indikator Aktivitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kehadiran peserta dalam kegiatan program. • Tingkat partisipasi peserta dalam kegiatan program. • Kualitas pelaksanaan pelatihan dan pendampingan. • Efektivitas koordinasi antarpihak terkait. 	<p>Indikator Output:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah peserta yang berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. • Jumlah peserta yang berhasil mengakses sumber daya ekonomi (modal, teknologi, pasar). • Jumlah peserta yang berhasil mengembangkan usaha atau mendapatkan pekerjaan. 	<p>Indikator Outcome:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pendapatan peserta program. • Peningkatan kesejahteraan peserta program. • Penurunan tingkat kemiskinan di wilayah sasaran.
---	---	--

Klasifikasi Data untuk Monev Program Pemberdayaan Masyarakat

Dalam upaya melakukan monitoring dan evaluasi yang komprehensif terhadap program pemberdayaan masyarakat, pengumpulan data menjadi aspek yang sangat penting. Data-data yang dikumpulkan akan memberikan gambaran akurat mengenai kemajuan program, efektivitas intervensi, dan dampak yang dihasilkan. Untuk itu, diperlukan pemahaman yang baik mengenai tipe-tipe data yang relevan dan cara pengumpulannya yang tepat. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai tipe-tipe data yang dapat dikumpulkan dalam program pemberdayaan masyarakat, dilengkapi dengan contoh dan penjelasan detail untuk masing-masing tipe data.

Data Kuantitatif

1. Data Survei

Data yang diperoleh melalui kuesioner atau wawancara terstruktur untuk memahami karakteristik peserta serta dampak program secara luas.

- **Demografi peserta:** Usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan.
- **Tingkat pengetahuan dan keterampilan:** Pengukuran sebelum dan sesudah program.
- **Akses terhadap sumber daya ekonomi:** Seperti modal usaha, teknologi, dan pasar.
- **Tingkat partisipasi masyarakat:** Jumlah peserta yang aktif dalam kegiatan pelatihan.
- **Jumlah kegiatan ekonomi yang terbentuk:** Jumlah usaha baru yang diciptakan, jumlah pekerjaan yang didapatkan

2. Data Prauji dan Pascauji

Data yang diperoleh sebelum dan setelah intervensi program untuk mengukur perubahan yang terjadi.

- **Hasil uji pengetahuan dan keterampilan peserta:** Tes sebelum dan sesudah pelatihan.
- **Pengukuran pendapatan peserta:** Pendapatan sebelum dan sesudah program.
- **Tingkat kemiskinan di wilayah sasaran:** Persentase rumah tangga miskin sebelum dan setelah program.
- **Persentase peserta yang meningkatkan pendapatan di atas garis kemiskinan.**
- **Jumlah usaha baru yang diciptakan peserta program.**

3. Survei Kepuasan Masyarakat

Data yang diperoleh melalui survei untuk memahami bagaimana masyarakat menilai manfaat dan efektivitas program.

- **Kepuasan terhadap layanan:** Seberapa puas masyarakat dengan layanan program.
- **Evaluasi kinerja pendamping:** Apakah pendamping program efektif dalam memberikan dukungan.

4. Data Partisipasi Kelompok

Data yang mengukur keterlibatan peserta dalam kelompok usaha atau komunitas yang dibentuk dalam program.

- **Jumlah peserta aktif dalam kelompok usaha.**
- **Frekuensi pertemuan kelompok dan tingkat kehadiran peserta.**
- **Kontribusi anggota kelompok dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan.**

Data Kualitatif

1. Catatan Observasi

Data yang diperoleh dari pengamatan langsung terhadap partisipasi peserta dalam program.

- **Partisipasi dalam kegiatan:** Kehadiran, keterlibatan aktif, dan interaksi peserta.
- **Dinamika kelompok:** Bagaimana peserta bekerja sama dan berinteraksi satu sama lain.
- **Perubahan perilaku dan sikap:** Apakah ada peningkatan dalam kepercayaan diri atau pola pikir peserta.
- **Faktor-faktor yang memengaruhi proses pemberdayaan.**

2. Wawancara Penerima Manfaat

Data yang diperoleh melalui wawancara mendalam untuk menggali pengalaman peserta terkait program.

- **Pengalaman peserta:** Apa yang mereka pelajari dan bagaimana kehidupan mereka berubah setelah program.
- **Kendala atau tantangan yang dihadapi dalam mengadopsi perubahan.**

3. Laporan FGD (Focus Group Discussion) dari Pelaksana

Data yang dikumpulkan dari diskusi kelompok yang dilakukan oleh tim pelaksana program, pendamping, dan fasilitator.

- **Tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasi program.**
- **Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas program.**

4. Laporan Kegiatan Lapangan

Dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh pendamping program atau tim monitoring.

- **Catatan harian pendamping:** Perkembangan peserta, hambatan yang muncul, serta solusi yang diterapkan.
- **Laporan kunjungan lapangan:** Temuan dari evaluasi langsung di lapangan.
- **Dokumentasi foto dan video kegiatan.**

5. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat

Wawancara dengan pemimpin komunitas untuk memahami dampak program dari perspektif masyarakat luas.

- **Kepala desa yang menilai apakah program bermanfaat bagi masyarakatnya.**
- **Tokoh agama yang melihat perubahan sosial di komunitasnya akibat program.**

Evaluasi program pemberdayaan masyarakat yang komprehensif membutuhkan kombinasi data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif, seperti angka dan persentase, memberikan pengukuran objektif tentang capaian program. Sementara itu, data kualitatif, seperti hasil wawancara dan observasi, memberikan wawasan mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Integrasi kedua jenis data ini memungkinkan analisis yang lebih holistik dan nuanced, sehingga memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis bukti untuk meningkatkan efektivitas program.

Penting untuk dicatat bahwa dalam proses pengumpulan data, beberapa data mungkin bersifat repeating atau berulang. Hal ini bukanlah kesalahan, melainkan merupakan strategi yang disengaja dalam triangulasi data. Triangulasi data dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber dan metode pengumpulan data untuk memvalidasi informasi dan meningkatkan keakuratan hasil evaluasi. Dengan demikian, kombinasi data kuantitatif dan kualitatif, beserta dengan penerapan triangulasi data, akan menghasilkan evaluasi program yang lebih objektif, valid, dan reliabel, yang pada akhirnya berkontribusi pada keberhasilan dan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat.

02. Analisis Data

Analisis data dalam program pemberdayaan masyarakat adalah proses **mengolah dan menginterpretasi data** untuk memahami kondisi masyarakat, mengukur dampak program, dan mengidentifikasi area perbaikan. Berikut beberapa metode analisis data yang biasa digunakan dalam monev program pemberdayaan masyarakat:

Analisis Kuantitatif

Menganalisis data numerik untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan antarvariabel.

<p>Analisis Deskriptif Memberikan gambaran umum tentang data, termasuk distribusi frekuensi, ukuran pemusatan (mean, median, modus), dan ukuran penyebaran (standar deviasi, range).</p> <p>Contoh: Menghitung persentase penduduk miskin di suatu desa, menghitung rata-rata pendapatan keluarga.</p>	<p>Analisis Inferensial Menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan data sampel.</p> <p>Contoh: Menguji hipotesis pengaruh program pelatihan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat atau membandingkan tingkat kesehatan masyarakat sebelum dan sesudah program pemberdayaan masyarakat.</p>	<p>Analisis Time Series Menganalisis data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk mengidentifikasi tren dan pola perubahan.</p> <p>Contoh: Menganalisis perubahan tingkat kemiskinan di desa A selama 5 tahun terakhir atau memprediksi jumlah kunjungan turis berdasarkan data kunjungan tahun-tahun sebelumnya.</p>	<p>Analisis Korelasi Menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih.</p> <p>Contoh: Menganalisis hubungan antara tingkat pendidikan dan pendapatan atau memprediksi jumlah produksi pertanian berdasarkan jumlah pupuk yang digunakan.</p>
--	--	--	--

Analisis Kualitatif

Menganalisis data nonnumerik (teks, gambar, audio, video) untuk memahami makna, persepsi, dan pengalaman masyarakat.

<p>Analisis Konten (Content Analysis) Menganalisis isi teks atau dokumen untuk mengidentifikasi tema, pola, dan makna.</p> <p>Contoh: Menganalisis transkrip wawancara dengan masyarakat untuk mengidentifikasi persepsi tentang program atau menganalisis artikel di media massa untuk mengetahui opini publik tentang isu kemiskinan.</p>	<p>Analisis Tematik (Thematic Analysis) Mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data kualitatif.</p> <p>Contoh: Menganalisis hasil FGD dengan masyarakat untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat kemandirian ekonomi.</p>
---	---

Berikut adalah tabel yang dapat digunakan untuk memilih metode analisis berdasarkan tujuan, jenis data, dan metode yang sesuai:

Tujuan	Contoh Data	Metode Analisis
Memahami kondisi masyarakat	- Data survei (kuantitatif) - Catatan observasi (kualitatif)	- Analisis deskriptif (<i>mean, median</i> , distribusi) - Analisis tematik untuk observasi
Mengukur dampak program	- Data prauji dan pascauji (kuantitatif) - Wawancara penerima manfaat (kualitatif)	- Analisis korelasi - Analisis tematik untuk wawancara
Mengevaluasi efektivitas program	- Indikator keberhasilan program (kuantitatif) - Laporan FGD dari pelaksana (kualitatif)	- Analisis <i>time series</i> - Analisis konten dari laporan pelaksana
Mengidentifikasi area perbaikan	- Laporan kegiatan lapangan (kualitatif) - Survei kepuasan masyarakat (kuantitatif)	- Analisis tematik untuk laporan - Statistik deskriptif untuk survei
Meningkatkan partisipasi masyarakat	- Data partisipasi kelompok (kuantitatif) - Wawancara dengan tokoh masyarakat (kualitatif)	- Analisis korelasi untuk hubungan kehadiran dan dampak - Analisis konten untuk wawancara

03. Pelaporan Program

Evaluasi dan pelaporan program pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang terstruktur dan sistematis untuk menilai efektivitas dan dampak program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi program pemberdayaan tidak hanya berfokus pada pencapaian *output* (keluaran) program, tetapi juga memperhatikan proses implementasi dan *outcome* (hasil) jangka panjang yang dihasilkan. Oleh karena itu, evaluasi program pemberdayaan perlu dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat sasaran, pendamping, pengelola program, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam konteks program pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan untuk kemandirian ekonomi, evaluasi program berperan penting dalam menilai efektivitas program dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan mewujudkan keadilan sosial. Evaluasi yang komprehensif dan objektif akan memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi para pengambil keputusan dalam mengembangkan strategi dan kebijakan pemberdayaan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Berikut beberapa evaluasi yang dilakukan selama dan sesudah implementasi program pemberdayaan masyarakat:



Laporan Progres

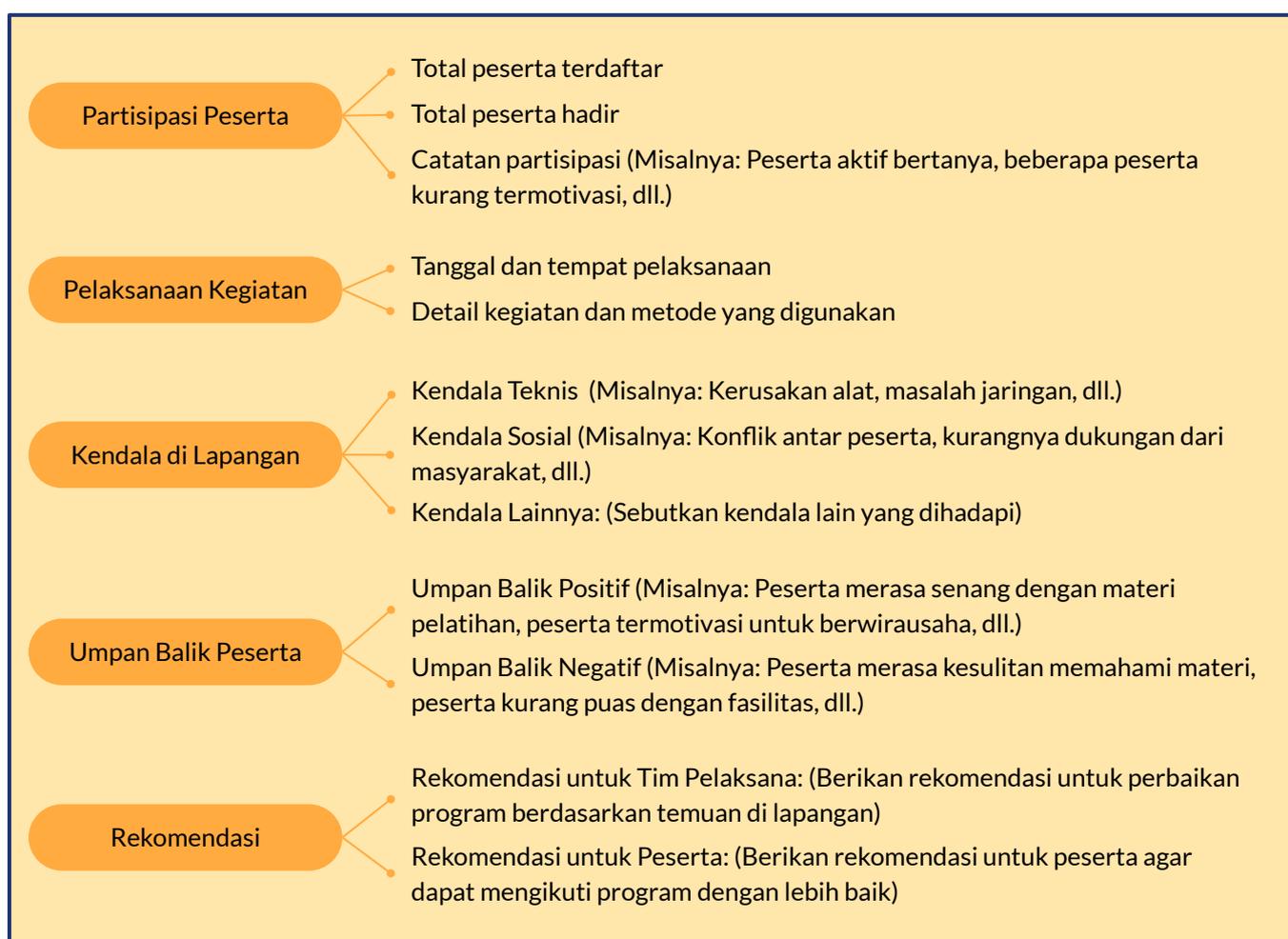
Laporan ini merinci kegiatan yang telah dilaksanakan, capaian yang telah diraih, tantangan yang dihadapi, dan rencana tindak lanjut. Laporan kemajuan merupakan hasil keluaran dari proses evaluasi proses. Tujuan dari laporan ini adalah:

- Memantau jalannya kegiatan sesuai rencana.
- Mengidentifikasi tantangan dan hambatan.
- Memberikan umpan balik untuk perbaikan selama program berlangsung.

Pelaporan kemajuan sendiri dilakukan oleh pendamping/fasilitator, tim pelaksana program, dan terkadang oleh peserta program itu sendiri.

Laporan Mingguan

Dilakukan oleh pendamping dan dapat melibatkan peserta program, formulir laporan mingguan ini berisi catatan partisipasi peserta, kendala di lapangan, dan umpan balik dari peserta. Format laporannya sebagai berikut:



Laporan Bulanan/Triwulan

Dilakukan oleh pelaksana program dan melibatkan pendamping, formulir laporan berisi analisis kemajuan program, tantangan utama, dan rekomendasi untuk perbaikan.

Ringkasan eksekutif

- Ikhtisar singkat pencapaian utama bulan ini
- Sorotan tantangan atau hambatan yang signifikan
- Rencana tindak lanjut utama untuk bulan/triwulan berikutnya

Pelaksanaan Kegiatan

- Kegiatan yang Dilaksanakan: Daftar kegiatan yang telah dilaksanakan selama bulan ini, termasuk tanggal dan lokasi pelaksanaan.
- Kendala dan Tantangan: Identifikasi kendala atau tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya.

Umpan Balik Peserta

- Umpan Balik dari Peserta: Ringkasan umpan balik dari peserta tentang program, termasuk saran atau masukan untuk perbaikan.

Capaian Program

- Target dan Realisasi: Tabel yang membandingkan target bulanan dengan realisasi untuk setiap indikator kunci.
- Analisis Capaian: Penjelasan naratif tentang capaian yang diraih, faktor yang memengaruhi, dan perbandingan dengan bulan sebelumnya.
- Grafik/Diagram: Visualisasi data untuk memperjelas pencapaian program (misalnya, grafik batang untuk perbandingan target dan realisasi).

Rencana Tindak Lanjut

- Kegiatan yang Direncanakan: Daftar kegiatan yang direncanakan untuk bulan berikutnya, termasuk tujuan, target, dan jadwal pelaksanaan.
- Penanggung Jawab: Nama personil yang bertanggung jawab untuk setiap kegiatan.
- Target yang Diharapkan: Target yang ingin dicapai untuk setiap kegiatan.

Lampiran

- Laporan Mingguan Pendamping Lapangan (jika diperlukan)
- Foto-foto kegiatan (jika ada)
- Dokumen pendukung lainnya (jika ada)

Laporan Akhir

Dilakukan pada akhir program untuk menilai pencapaian target program, mengukur perubahan pada peserta (keterampilan, ekonomi, kesejahteraan), dan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah program. Tujuan dari laporan ini adalah:

- Menilai pencapaian target program.
- Mengukur perubahan pada peserta (keterampilan, ekonomi, kesejahteraan).
- Membandingkan kondisi sebelum dan sesudah program.

1. Halaman Judul

- Nama Program, Logo Organisasi, dan/atau Donor.
- Periode Pelaksanaan, Tanggal Laporan.

2. Ringkasan Eksekutif

- Gambaran singkat tentang program, latar belakang, tujuan, dan dampaknya.
- Metodologi evaluasi (desain evaluasi, metode pengumpulan data, teknik analisis data)
- Pencapaian utama, misalnya jumlah penerima manfaat, indikator keberhasilan.
- Khusus untuk Eksternal: Independensi dan objektivitas tim evaluasi eksternal

3. Deskripsi Program

- Tujuan jangka pendek dan panjang.
- Aktivitas utama dalam program.
- Lokasi pelaksanaan program dan deskripsi penerima manfaat, misalnya petani, perempuan, atau siswa.
- **Struktur organisasi** dan manajemen program.

4. Pelaksanaan Program

- **Rincian aktivitas:** Aktivitas yang telah dilaksanakan, termasuk tanggal dan lokasi.
- **Partisipasi masyarakat:** Jumlah dan jenis penerima manfaat yang terlibat.
- **Sumber daya yang digunakan:** Pendanaan, tenaga kerja, dan logistik.
- **Dokumentasi:** Foto kegiatan, laporan absensi, atau testimoni penerima manfaat.

5. Monitoring dan Evaluasi

- **Pencapaian Target:** Analisis pencapaian target program berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. (Sajikan data dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram)
- **Efektivitas Program:** Analisis efektivitas program dalam mencapai tujuan yang diinginkan. (Gunakan data kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung temuan)
- **Efisiensi Program:** Analisis efisiensi program dalam penggunaan sumber daya (anggaran, waktu, tenaga kerja). (Hitung rasio efisiensi atau indikator kinerja lainnya)
- **Relevansi Program:** Analisis relevansi program dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat atau target sasaran.
- **Dampak Program:** Analisis dampak program terhadap perubahan yang diharapkan (sosial, ekonomi, lingkungan, dll.). (Jika memungkinkan, gunakan data sebelum dan sesudah program untuk mengukur dampak)
- **Keberlanjutan Program (Khusus untuk Eksternal):** Analisis keberlanjutan program setelah selesai atau dihentikan. (Identifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberlanjutan)
- **Kendala dan Tantangan:** Hambatan yang ditemukan selama pelaksanaan dan solusinya.

6. Analisis dan Pembelajaran

- **Pembelajaran Utama:** Pelajaran yang dapat digunakan untuk perbaikan program di masa depan.
- **Inovasi:** Hal baru atau strategi yang digunakan selama pelaksanaan.
- **Rekomendasi:** Usulan langkah perbaikan atau pengembangan program dan rekomendasi untuk pengembangan, replikasi, atau kelanjutan program.

Laporan Dampak

Laporan dampak adalah dokumen yang disusun sesuai kebutuhan untuk melaporkan dampak jangka panjang dari intervensi yang dilakukan oleh program pemberdayaan masyarakat. Laporan ini memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat setelah program berakhir, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Tujuan:

- Mengukur dampak jangka panjang program.
- Mengidentifikasi perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
- Menilai replikasi atau keberlanjutan hasil program.

1. Ringkasan Eksekutif

- Ikhtisar singkat tentang program dan tujuan evaluasi dampak
- Ringkasan temuan utama mengenai dampak program, kesimpulan, dan rekomendasi

2. Pendahuluan

- Latar belakang program dan konteksnya
- Tujuan dan ruang lingkup evaluasi dampak
- Metodologi evaluasi dampak (desain evaluasi, metode pengumpulan data, teknik analisis data)
- Keterbatasan evaluasi dampak

3. Profil Program

- Deskripsi rinci tentang program (tujuan, sasaran, kegiatan, target, dll.)
- Teori perubahan atau logika program yang mendasari intervensi
- Kerangka kerja pengukuran dampak

4. Tinjauan Pustaka (Jika Relevan)

- Tinjauan terhadap literatur atau studi terkait yang relevan dengan program atau topik evaluasi dampak
- Kerangka teoritis atau konseptual yang mendasari evaluasi dampak

5. Temuan Evaluasi Dampak

- **Dampak Sosial:**
 - Perubahan yang teramati dalam aspek sosial masyarakat (misalnya, peningkatan partisipasi, perubahan norma sosial, penguatan kapasitas komunitas, dll.)
 - Data kuantitatif dan kualitatif yang mendukung temuan
 - Analisis kontribusi program terhadap perubahan sosial yang teramati
- **Dampak Ekonomi:**
 - Perubahan yang teramati dalam aspek ekonomi masyarakat (misalnya, peningkatan pendapatan, peningkatan akses terhadap pekerjaan, pengembangan usaha, dll.)
 - Data kuantitatif dan kualitatif yang mendukung temuan
 - Analisis kontribusi program terhadap perubahan ekonomi yang teramati
- **Dampak Lingkungan:**
 - Perubahan yang teramati dalam aspek lingkungan (misalnya, perbaikan kualitas lingkungan, konservasi sumber daya alam, peningkatan kesadaran lingkungan, dll.)
 - Data kuantitatif dan kualitatif yang mendukung temuan
 - Analisis kontribusi program terhadap perubahan lingkungan yang teramati
- **Dampak Lainnya (Jika Ada):**
 - Perubahan-perubahan lain yang relevan dan teramati, namun tidak termasuk dalam kategori di atas
 - Data kuantitatif dan kualitatif yang mendukung temuan
 - Analisis kontribusi program terhadap perubahan tersebut

6. Analisis Kontribusi

- Analisis mendalam mengenai bagaimana program berkontribusi terhadap perubahan yang teramati
- Faktor-faktor yang memengaruhi dampak program (baik yang mendukung maupun menghambat)
- Peran aktor-aktor kunci dalam mencapai dampak program

3.3.7 Tahap Graduasi Peserta dan Strategi Keberlanjutan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Rentan

Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat diukur dari kemandirian dan keberlanjutan perubahan positif yang dihasilkan. Tahap graduasi peserta, yaitu proses berakhirnya pendampingan secara bertahap dan terukur, menjadi krusial untuk memastikan peserta mampu mandiri dan terus meningkatkan kesejahteraan mereka. Subbab ini akan membahas tahapan graduasi yang efektif serta strategi keberlanjutan program, sehingga dampak positif yang telah dicapai dapat terus berlanjut dan bahkan direplikasi oleh masyarakat.



01. Indikator Graduasi Penerima Manfaat

Untuk memastikan efektivitas program yang tepat sasaran, penting untuk memiliki indikator keberhasilan dan tahapan kelulusan yang jelas. Hal ini memungkinkan penerima manfaat untuk bertransisi dari kondisi miskin, menjadi rentan, menuju menengah, hingga akhirnya mencapai kondisi yang stabil.



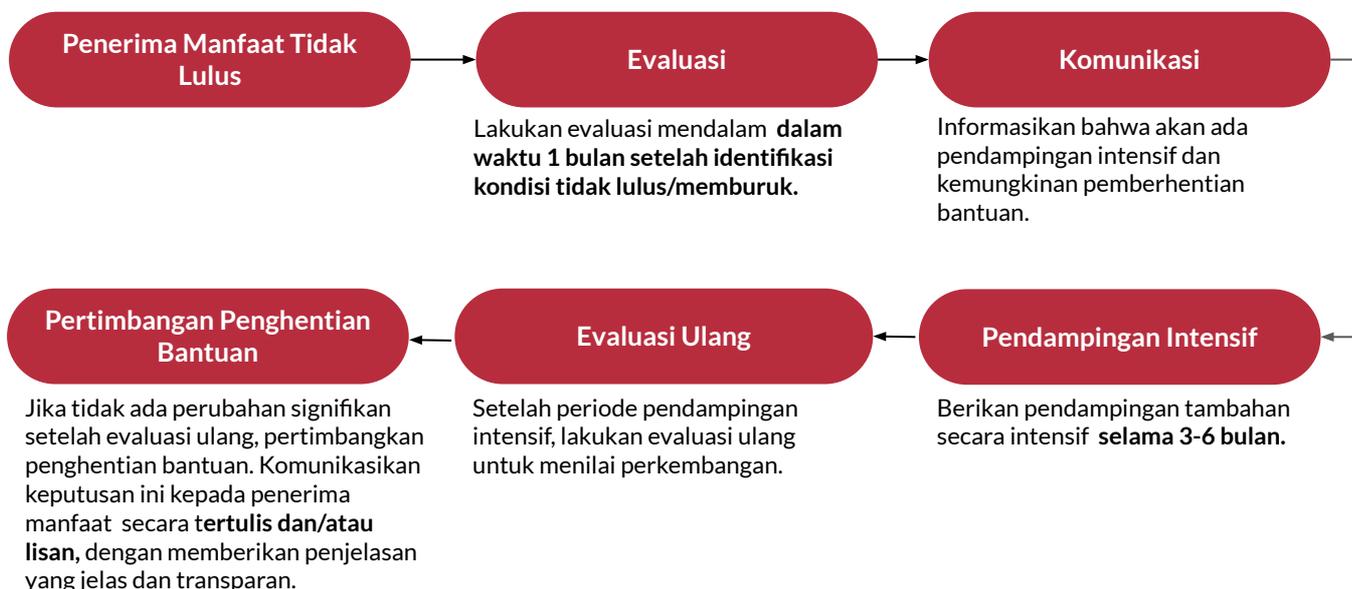
Tindak Lanjut Graduasi Peserta Program Pemberdayaan Masyarakat

Graduasi penerima manfaat menandai keberhasilan program pemberdayaan dalam membimbing individu menuju kemandirian. Berikut alur tindak lanjut pasca-graduasi, yaitu pendampingan lanjutan atau rujukan ke program lain. Sebelum menentukan jalur yang tepat, komunikasi yang baik dengan penerima manfaat menjadi kunci untuk memberikan apresiasi dan menjelaskan langkah selanjutnya.



Tidak semua penerima manfaat program pemberdayaan berhasil mencapai tahap graduasi. Bagi mereka yang belum berhasil, diperlukan **evaluasi mendalam** untuk mengidentifikasi penyebab kegagalan dan merumuskan langkah selanjutnya.

Gambar ini mengilustrasikan alur tindak lanjut bagi penerima manfaat yang **tidak lulus graduasi**. **Evaluasi** dilakukan untuk memahami kondisi dan kendala yang dihadapi. Selanjutnya, diberikan **pendampingan intensif** dengan harapan dapat meningkatkan kapasitas dan kemandirian mereka. **Evaluasi ulang** dilakukan untuk mengukur perkembangan setelah pendampingan intensif. Jika tetap tidak ada perubahan signifikan, maka dilakukan **pertimbangan penghentian bantuan**. **Komunikasi** yang terbuka dan transparan dengan penerima manfaat sangat penting dalam setiap tahapan proses ini.



Peran Pendamping selama proses Graduasi

Penerima Manfaat yang Berhasil

1. Komunikasi/sosialisasi mengenai kelulusan:

- **Menyampaikan kriteria kelulusan secara jelas dan transparan:** Pendamping menjelaskan indikator-indikator yang menunjukkan keberhasilan penerima manfaat dan alasan mengapa mereka dianggap lulus.
- **Memastikan penerima manfaat memahami proses graduasi:** Pendamping menjelaskan tahapan-tahapan dalam proses graduasi, termasuk pendampingan lanjutan dan kemungkinan rujukan ke program lain.
- **Menumbuhkan rasa bangga dan percaya diri:** Pendamping memberikan apresiasi atas pencapaian penerima manfaat dan memotivasi mereka untuk terus mengembangkan diri.

2. Pendampingan Setelah Graduasi:

- **Memantau perkembangan penerima manfaat:** Pendamping secara berkala memantau kondisi penerima manfaat pasca-kelulusan, terutama terkait dengan pendapatan dan keberlanjutan usaha/aktivitas ekonomi mereka.

3. Rujukan ke program lain yang lebih advance

- **Mengidentifikasi potensi dan kebutuhan penerima manfaat:** Pendamping menilai kesiapan dan minat penerima manfaat untuk mengikuti program pemberdayaan yang lebih tinggi.
- **Menyediakan informasi tentang program lanjutan:** Pendamping memberikan informasi lengkap mengenai program-program pemberdayaan lain yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan penerima manfaat.

Penerima Manfaat yang Tidak Lulus

1. Evaluasi

- **Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan:** Pendamping melakukan analisis mendalam untuk mengetahui mengapa penerima manfaat tidak mencapai target yang ditetapkan atau kondisinya memburuk.
- **Melibatkan penerima manfaat dalam evaluasi:** Pendamping mendiskusikan hasil evaluasi dengan penerima manfaat dan mendengarkan masukan mereka.
- **Merumuskan rekomendasi tindak lanjut:** Pendamping menyusun rencana pendampingan intensif yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat.

2. Komunikasi

- **Menyampaikan hasil evaluasi secara empatik dan motivatif:** Pendamping menyampaikan informasi tentang kondisi penerima manfaat dan rencana pendampingan intensif dengan cara yang mudah dipahami dan tidak menyalahkan.
- **Memberikan pemahaman tentang kemungkinan pemberhentian bantuan:** Pendamping menjelaskan bahwa pemberhentian bantuan adalah salah satu kemungkinan jika tidak ada perubahan signifikan setelah pendampingan intensif.

3. Pendampingan Intensif

- **Memberikan pendampingan yang lebih terfokus dan terstruktur:** Pendamping meningkatkan intensitas kunjungan dan pendampingan, serta menyusun rencana aksi yang lebih detail dan terukur.
- **Mendorong penerima manfaat untuk aktif berperan:** Pendamping memotivasi penerima manfaat untuk lebih berinisiatif dan bertanggung jawab dalam mengikuti program pendampingan.

4. Evaluasi Ulang

- **Mengukur perkembangan penerima manfaat secara objektif:** Pendamping menggunakan instrumen dan indikator yang jelas untuk menilai perubahan yang terjadi pada penerima manfaat selama periode pendampingan intensif.
- **Mendokumentasikan proses dan hasil pendampingan:** Pendamping mencatat semua aktivitas dan perkembangan penerima manfaat sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

5. Pertimbangan Pemberhentian Bantuan

- **Melakukan analisis yang komprehensif dan berimbang:** Pendamping mempertimbangkan semua faktor yang relevan sebelum mengambil keputusan untuk menghentikan bantuan, termasuk kondisi sosial ekonomi penerima manfaat, upaya yang telah dilakukan, dan potensi dampak negatif dari pemberhentian bantuan.
- **Menyampaikan keputusan dengan penuh empati dan tanggung jawab:** Pendamping menjelaskan alasan-alasan pemberhentian bantuan secara jelas, terbuka, dan menghormati harkat dan martabat penerima manfaat.
- **Memberikan informasi tentang alternatif bantuan lain:** Jika memungkinkan, pendamping menginformasikan dan membantu penerima manfaat untuk mengakses bantuan atau program lain yang relevan dengan kebutuhan mereka.

02. Dukungan Keberlanjutan dan Exit Strategy

Program pemberdayaan masyarakat yang berhasil tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga menjamin keberlanjutan & kemandirian masyarakat setelah program berakhir. Oleh karena itu, dukungan keberlanjutan dan *exit strategy* yang terencana dengan baik sangatlah penting. Beberapa model keberlanjutan dan *exit strategy* program dapat dipetakan sebagai berikut:

Partisipasi & Kepemilikan Masyarakat

Masyarakat yang menjadi sasaran program memiliki kapasitas untuk melanjutkan inisiatif yang telah dimulai. Pada akhir program, masyarakat sasaran diharapkan mampu mengelola sumber daya, mengambil keputusan, dan mengatasi tantangan tanpa bergantung pada pihak eksternal.

Penguatan Kelembagaan

Memperkuat kelembagaan yang terkait langsung dengan target sasaran, seperti kelompok tani, koperasi, atau lembaga masyarakat lainnya. Institusi lokal yang kuat dapat menjadi pemimpin dalam menjaga agar manfaat program tetap berjalan.

Jaringan dan Kemitraan

Melibatkan kemitraan yang kuat di tingkat lokal, nasional, dan bahkan internasional baik dengan lembaga swadaya lokal, pemerintah daerah, atau sektor swasta yang memungkinkan masyarakat mendapatkan dukungan lebih lanjut jika dibutuhkan.

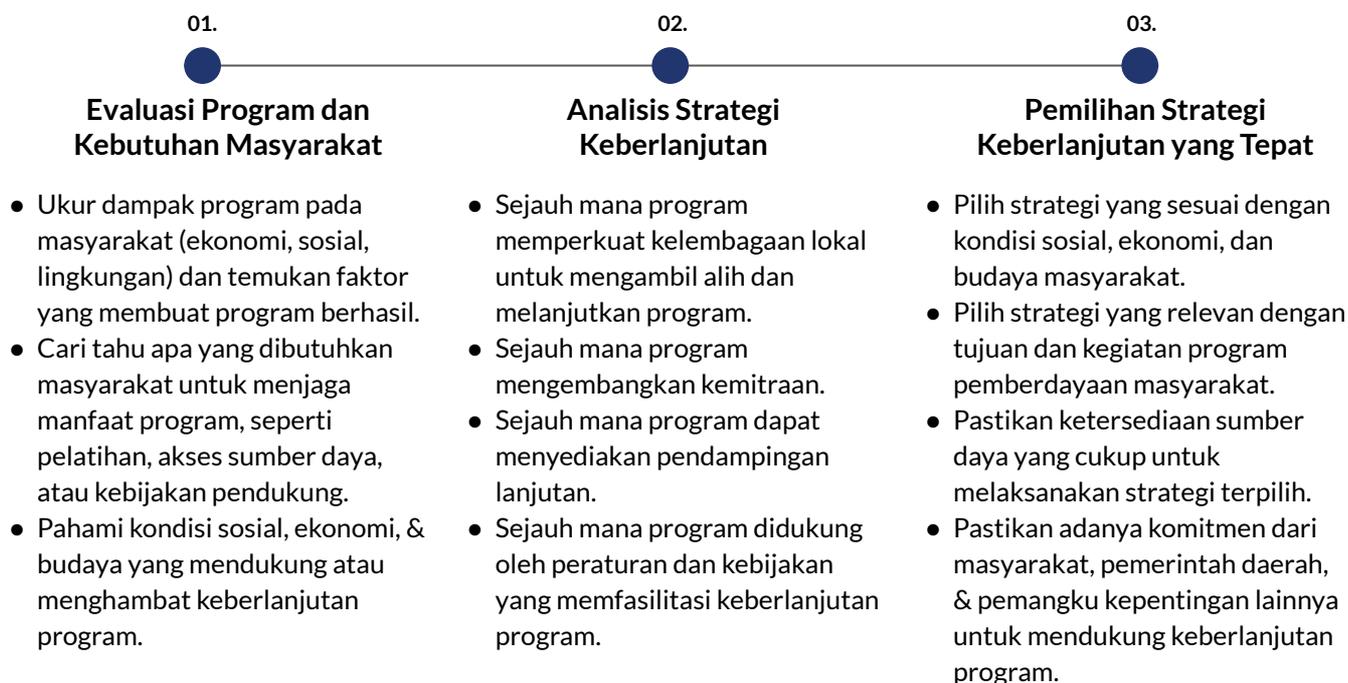
Peraturan dan Kebijakan Pendukung

Kebijakan yang mendukung pengelolaan mandiri, termasuk kemudahan akses pasar atau regulasi yang memfasilitasi program pemberdayaan masyarakat, sangat penting untuk memastikan agar manfaat program tidak hilang begitu saja..

Pendampingan Pascaprogram

Fasilitator atau pendamping bisa tetap memberikan dukungan teknis secara berkala untuk memastikan bahwa masyarakat siap sepenuhnya menjalankan program secara mandiri.

Keputusan yang tepat tidak hanya memastikan manfaat program dapat diteruskan secara mandiri oleh masyarakat, tetapi juga membantu meminimalkan risiko ketergantungan terhadap bantuan eksternal. Berikut adalah langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan, mulai dari analisis kebutuhan hingga evaluasi strategi yang paling relevan dengan konteks program.



Hipotesis Capaian Program	Parameter Penentu	Strategi Keberlanjutan yang Cocok
Tingkatkan partisipasi dan kepemilikan masyarakat terhadap program.	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pemahaman masyarakat tentang program - Kemampuan masyarakat mengelola sumber daya - Kemampuan masyarakat mengambil keputusan - Kemampuan masyarakat mengatasi tantangan 	Serahkan pengelolaan program kepada masyarakat dan lembaga lokal.
Bangun dan perkuat kelembagaan lokal, misalnya koperasi, kelompok usaha bersama.	<ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas lembaga dalam mengelola program - Keterampilan manajemen dan organisasi - Kemampuan memobilisasi sumber daya - Kemampuan melakukan monitoring dan evaluasi 	Fasilitasi transisi kepemimpinan dan pengelolaan program kepada lembaga lokal.
Kembangkan jaringan dan kemitraan dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, LSM, dan sektor swasta.	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dan kualitas jejaring kemitraan - Dukungan dari pemerintah, LSM, dan sektor swasta - Akses terhadap informasi, teknologi, dan pasar 	Pertahankan dan perluas jaringan kemitraan untuk mendukung keberlanjutan program.
Berikan pendampingan pascaprogram secara berkala.	<ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan masyarakat dan lembaga lokal dalam menjalankan program secara mandiri - Ketersediaan pendamping lokal - Efektivitas pendampingan dalam meningkatkan kapasitas 	Kurangi intensitas pendampingan secara bertahap dan alihkan peran pendamping kepada masyarakat atau lembaga lokal.
Dukung program dengan peraturan dan kebijakan yang memfasilitasi kemandirian masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya peraturan dan kebijakan yang mendukung - Kemudahan akses masyarakat terhadap sumber daya dan peluang ekonomi - Dukungan dan insentif dari pemerintah 	Advokasi kebijakan dan regulasi yang mendukung keberlanjutan program dan kemandirian masyarakat.

3.3.8 Konektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat dengan Lima (5) Program Prioritas Pemerintah

Sebagai pengelola program pemberdayaan masyarakat, kita memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Untuk memaksimalkan dampak program, penting bagi kita untuk menyelaraskan program pemberdayaan kita dengan 5 program prioritas pemerintah, yaitu:

- Swasembada Pangan
- Makan Bergizi Gratis
- Hilirisasi Sektor Industri
- Perumahan untuk MBR
- Kartu Kesejahteraan & Kartu Usaha

Lima program prioritas pemerintah (Swasembada Pangan, Makan Bergizi Gratis, Hilirisasi Sektor Industri, Perumahan untuk MBR, dan Kartu Kesejahteraan & Kartu Usaha) memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Dengan menyelaraskan model intervensi program pemberdayaan, kita dapat mengoptimalkan potensi tersebut dan menciptakan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.

Strategi Penyelarasan

Swasembada Pangan

- **Pengembangan Klaster Industri Pangan:** Dorong pembentukan klaster industri pangan di perdesaan dengan melibatkan petani, pengolah, dan pemasar.
- **Peningkatan Nilai Tambah Produk:** Latih petani dalam teknik pengolahan dan pengemasan produk agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi.
- **Peningkatan Akses Pasar:** Meningkatkan akses pasar petani dengan tujuan memotong rantai distribusi bahan makanan agar tidak melalui tengkulak.
- **Penciptaan Lapangan Kerja:** Program ini dapat menyerap tenaga kerja di sektor pertanian, pengolahan pangan, dan pemasaran.

Contoh Model Intervensi:

- Pendampingan petani dalam budidaya organik dan pembuatan pupuk kompos.
- Pelatihan pengolahan hasil pertanian menjadi produk makanan olahan.
- Pengembangan koperasi petani untuk memasarkan produk secara bersama.
- Peningkatan akses pasar bagi petani

Makanan Bergizi Gratis

- **Peningkatan Produksi Pangan Lokal:** Dorong produksi dan konsumsi pangan lokal yang bergizi untuk memenuhi kebutuhan program.
- **Pengembangan UMKM Pangan:** Berikan pelatihan dan dukungan kepada UMKM untuk memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi.
- **Penciptaan Lapangan Kerja:** Program ini dapat menciptakan lapangan kerja di sektor produksi pangan, pengolahan, dan distribusi.

Contoh Model Intervensi:

- Kerjasama dengan kelompok wanita tani untuk menyediakan bahan baku pangan lokal.
- Pelatihan pembuatan kue dan makanan ringan bergizi bagi ibu rumah tangga.
- Penciptaan jaringan distribusi makanan bergizi yang menjangkau masyarakat miskin.

Hilirisasi Sektor Industri

- **Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM):** Fasilitasi pengembangan IKM di berbagai sektor untuk mengolah bahan mentah menjadi produk jadi.
- **Peningkatan Kualitas SDM:** Berikan pelatihan keterampilan dan teknologi kepada tenaga kerja di sektor industri.
- **Penyerapan Tenaga Kerja:** Hilirisasi industri akan menyerap tenaga kerja di berbagai bidang, mulai dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran.

Contoh Model Intervensi:

- Pendampingan teknis bagi IKM dalam meningkatkan kualitas produk.
- Pelatihan desain dan pemasaran produk melalui platform digital.
- Pembentukan inkubator bisnis untuk mendukung startup di bidang industri.

Perumahan untuk MBR

- **Pengembangan Industri Bahan Bangunan:** Dorong pengembangan industri bahan bangunan lokal untuk mendukung program perumahan.
- **Pelatihan Tenaga Konstruksi:** Latih masyarakat dalam keterampilan konstruksi & renovasi rumah.
- **Penyerapan Tenaga Kerja:** Program ini dapat menyerap tenaga kerja di sektor konstruksi, produksi bahan bangunan, dan jasa terkait perumahan.

Contoh Model Intervensi:

- Pelatihan pembuatan bata ringan atau material bangunan lain dari bahan lokal.
- Program magang kerja di proyek pembangunan perumahan untuk MBR.
- Pengembangan UMKM jasa renovasi rumah.

Kartu Kesejahteraan & Kartu Usaha

- Peningkatan Daya Beli: Bantuan sosial melalui Kartu Kesejahteraan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
- Stimulus Usaha Mikro: Kartu Usaha dapat memberikan akses atau fasilitasi modal usaha dan pendampingan bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha mikro.
- Penciptaan Lapangan Kerja: Program ini dapat mendorong penciptaan lapangan kerja melalui pertumbuhan usaha mikro dan peningkatan aktivitas ekonomi.

Contoh Model Intervensi:

- Pendampingan penerima Kartu Usaha dalam menyusun rencana usaha dan mengelola keuangan.
- Pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan pasar kerja bagi penerima Kartu Kesejahteraan.
- Pengembangan platform online untuk memasarkan produk dari usaha mikro penerima Kartu Usaha.

Dengan menyelaraskan model intervensi program pemberdayaan dengan 5 program prioritas pemerintah, kita dapat mengoptimalkan potensi program-program tersebut sebagai penggerak ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

3. 4 Panduan Program Pemberdayaan untuk Masyarakat Miskin & Rentan

	Langkah-Langkah	Praktik Standar	Dokumen Keluaran
Perencanaan	Perencanaan Model Intervensi	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan analisis kebutuhan yang komprehensif & partisipatif. Mengidentifikasi & memprioritaskan kelompok sasaran berdasarkan tingkat kemiskinan & kerentanan, potensi untuk berkembang, dan keterwakilan kelompok rentan. Proses identifikasi sasaran & program berbasis data terpilah yang responsif gender & inklusif. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Analisis Kebutuhan Profil Sasaran Program yang terinci, mencakup informasi demografi, sosial, ekonomi, dan kebutuhan spesifik. Matriks Prioritas Sasaran Laporan Analisis Gender
	Penyusunan visi dan misi	<ul style="list-style-type: none"> Gunakan bahasa yang inspiratif, mudah dipahami, selaras dengan tujuan pembangunan yang lebih luas dan mencerminkan nilai-nilai pemberdayaan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Visi dan Misi Program
	Penentuan indikator keberhasilan	<ul style="list-style-type: none"> Tentukan indikator yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu (SMART). Mencakup dimensi akses, partisipasi, kontrol, manfaat. 	<ul style="list-style-type: none"> Matriks Indikator Keberhasilan Program
	Merencanakan intervensi yang komprehensif	<ul style="list-style-type: none"> Uraikan secara rinci kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dengan jelas dan terukur. Susun timeline yang realistis tapi tetap fleksibel. Melakukan konsultasi dengan <i>stakeholder</i> untuk memvalidasi kerangka kerja program. 	<ul style="list-style-type: none"> Rencana intervensi dengan <i>timeline</i> dan <i>milestone</i> (Gantt Chart untuk visualisasi <i>timeline</i> program).
	Kerangka Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan struktur organisasi yang jelas dan efisien untuk menjalankan program. Memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dalam mengelola program. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen struktur organisasi, tata kelola, dan kelembagaan Dokumen Pendanaan
	Kerangka Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi pendanaan potensial, seperti APBN, APBD, Dana Desa, swasta, filantropi, dan lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Pendanaan
	Penyusunan pedoman program	<ul style="list-style-type: none"> Susun pedoman program secara sistematis. Pastikan pedoman program mencakup semua informasi penting yang dibutuhkan. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen pedoman program.
Asesmen	Pengumpulan data sekunder	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan data yang dibutuhkan sejalan dengan indikator keberhasilan program Memastikan data yang dibutuhkan terpilah berdasarkan gender, kelompok disabilitas, & kelompok inklusi lainnya. Menggunakan basis data terintegrasi, terutama Regsosek (registrasi sosial ekonomi) 	<ul style="list-style-type: none"> Matrik data yang dibutuhkan untuk asesmen
	Identifikasi pemangku kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> Libatkan masyarakat dalam mengidentifikasi dan memetakan pemangku kepentingan. Mengidentifikasi semua pihak yang terkait dengan program, baik secara langsung maupun tidak langsung 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pemetaan pemangku kepentingan (<i>stakeholder mapping</i>).
	Pengumpulan data primer (wawancara, FGD, survei)	<ul style="list-style-type: none"> Pastikan pengumpul data memahami cara menggunakan instrumen dan teknik pengumpulan data yang baik. Memastikan instrumen pengumpulan data responsif gender dan inklusif. 	<ul style="list-style-type: none"> Desain penelitian atau pengumpulan data primer. Instrumen pengumpulan data yang telah dirancang.

Langkah-Langkah	Praktik Standar	Dokumen Keluaran	
Persiapan	<p>Pengembangan kerangka kerja monitoring dan evaluasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun rencana pengumpulan data, termasuk metode, frekuensi, dan sumber data. Memastikan kerangka kerja M&E responsif gender dan inklusif. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen model dampak atau <i>logframe</i> program pemberdayaan Matriks indikator, data yang dibutuhkan dan sumber data
	<p>Asesmen kompetensi pendamping</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sesuaikan materi pelatihan dengan kebutuhan program dan kompetensi yang dibutuhkan. Gunakan metode pelatihan yang partisipatif dan interaktif. Mengevaluasi efektivitas pelatihan dan pengembangan kapasitas. 	<ul style="list-style-type: none"> Modul pelatihan pendamping. Materi pelatihan. Daftar hadir peserta pelatihan. Laporan kegiatan pelatihan.
	<p>Sosialisasi program</p>	<ul style="list-style-type: none"> Gunakan metode sosialisasi yang tepat dan menjangkau semua pihak terkait. Menyusun materi sosialisasi yang menarik, informatif, dan mudah dipahami. Pastikan semua pihak memahami isi alur program. Dokumentasikan proses sosialisasi. Memastikan sosialisasi responsif gender dan inklusif. 	<ul style="list-style-type: none"> Materi sosialisasi (presentasi, selebaran/<i>leaflet</i>, video). Daftar hadir peserta sosialisasi. Laporan kegiatan sosialisasi.
Pelaksanaan	<p>Penetapan kegiatan intervensi program</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pertimbangkan demografi target sasaran dalam menentukan durasi dan metode pembelajaran Menentukan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan inti. Melakukan uji coba dan revisi terhadap panduan pelaksanaan berdasarkan umpan balik dari pengguna. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen desain model intervensi Dokumen Panduan Pelaksanaan Kegiatan Inti yang komprehensif dan mudah digunakan. Formulir atau template yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan inti.
	<p>Pembuatan dokumentasi dari kegiatan pemberdayaan masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> Membuat sistem dokumentasi yang jelas dan terstruktur untuk mencatat seluruh kegiatan. Memastikan dokumentasi dilakukan secara berkala. Melindungi privasi dan keamanan data serta informasi yang didokumentasikan. 	<ul style="list-style-type: none"> Basis data atau sistem penyimpanan data kegiatan yang mudah diakses dan dikelola. Absensi peserta. Dokumentasi pelaksanaan.
	<p>Penetapan alur komunikasi dalam pelaksanaan program</p>	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan alur komunikasi responsif terhadap kebutuhan informasi yang beragam dari berbagai kelompok sasaran. 	<ul style="list-style-type: none"> Manual yang menjelaskan prosedur dan kanal komunikasi baik untuk internal tim program maupun eksternal.
	<p>Penetapan manajemen dan resolusi konflik</p>	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah yang aman dan terpercaya. Melatih staf program dalam keterampilan resolusi konflik yang konstruktif. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas mekanisme resolusi konflik. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen prosedur penanganan dan resolusi konflik.
	<p>Penyusunan kebijakan inklusif dan kebijakan perlindungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan kebijakan inklusif sejalan dengan prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, dan aksesibilitas. Memastikan kebijakan perlindungan sensitif gender dan memenuhi kebutuhan kelompok rentan, seperti anak-anak, perempuan, dan penyandang disabilitas. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen prosedur penanganan dan resolusi konflik. Dokumen Kebijakan Perlindungan yang komprehensif.

	Langkah-Langkah	Praktik Standar	Dokumen Keluaran
Evaluasi dan Monitoring	Manajemen data	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengumpulan data secara rutin sesuai dengan rencana. Memastikan kualitas data yang terkumpul (valid, reliabel, lengkap, akurat, tepat waktu). 	<ul style="list-style-type: none"> Data M&E yang terkumpul dan tersimpan dalam basis data.
	Analisis data	<ul style="list-style-type: none"> Merencanakan penggunaan data terpilah dalam analisis untuk mengidentifikasi perbedaan dampak pada kelompok yang berbeda. 	<ul style="list-style-type: none"> Hasil Analisis Data dalam bentuk tabel, grafik, bagan, atau narasi.
	Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan laporan responsif gender dan inklusif, menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan <i>визуально</i> menarik. 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan progres Laporan akhir Laporan dampak
Graduasi & keberlanjutan	Penetapan indikator graduasi	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan indikator graduasi selaras dengan tujuan program dan kebutuhan peserta. Menggunakan data terpilah berdasarkan gender dan kelompok inklusi lainnya untuk menetapkan indikator yang responsif dan adil. 	<ul style="list-style-type: none"> Matriks Indikator Graduasi yang jelas dan terukur.
	Tindak lanjut graduasi	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun strategi transisi yang terencana bagi peserta yang telah lulus program (misalnya, akses ke modal usaha, jejaring pemasaran, pengembangan usaha, dll.) Memfasilitasi pembentukan alumni program sebagai wadah pembelajaran dan dukungan berkelanjutan. 	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Tindak Lanjut Individual untuk setiap peserta.
	Dukungan keberlanjutan dan <i>exit strategy</i>	<ul style="list-style-type: none"> Merancang strategi keberlanjutan yang spesifik dan terukur, dengan mempertimbangkan konteks dan kebutuhan lokal. Melakukan advokasi kepada pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung keberlanjutan program. Merencanakan proses pengakhiran program secara bertahap dan terukur. 	<ul style="list-style-type: none"> Strategi keberlanjutan program yang rinci dan terukur. Rencana <i>Exit Strategy</i> yang detail.

Daftar Pustaka

- Adger, W. N. (2000). Social and Ecological Resilience: Are They Related? *Progress in Human Geography*, 24(3), 347-364.
- Ariyaratne, A. T. (1994). Sarvodaya Shramadana movement: A Sri Lankan experience. In *People's participation in development: Approaches and cases* (pp. 157-174). Palgrave Macmillan, London.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2007). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Berita Resmi Statistik: Penduduk Miskin September 2024 Sebesar 8,57 Persen. Jakarta: BPS.
- Bappenas. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Cornwall, A., & Nyamu-Musembi, C. (2004). Putting the 'rights-based approach' to development into perspective. *Development in Practice*, 14(3), 357-371.
- Department for International Development (DFID). (1999). Sustainable livelihoods guidance sheets.
- Department of Social Welfare and Development (DSWD), Republic of the Philippines. "Pantawid Familyang Pilipino Program (4Ps)." Diakses pada 13 September 2025, <https://car.dswd.gov.ph/programs-services/core-programs/pantawid-familyang-pilipino-program-4ps/>
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Herder and Herder.
- Ishikawa, M. "One Village One Product Movement for Regional Revitalization in Japan." *International Journal of Rural Management* 4, no. 1-2 (2008): 1-16.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2014). Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). (2022). Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM.
- Kementerian Kesehatan. (2021). Laporan Program Stunting.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2019). Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2017). Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
- Kementerian PPN/Bappenas. (2019). Visi Indonesia 2045. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementerian PUPR. (2021). Laporan Perumahan Layak Huni.

- Kementerian Sosial. (2023). Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). [Diakses pada 13 Februari 2025].
- Kementerian Sosial. (2023). Data Realisasi PKH dan Bantuan UMKM.
- Kementerian Sosial RI. (2016). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Kementerian Sosial RI. (2023). Program Keluarga Harapan.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). (1999). Hak Asasi Manusia di Indonesia.
- Ministry of Women and Child Development, Government of India. "She Programme." Diakses pada 20 September 2024, <https://ngodata.smeru.or.id/ngodb/474>.
- Ombudsman RI. (2009). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Suharto, E. (2012). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial. Bandung: Refika Aditama.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). Economic Development. Boston: Addison-Wesley.
- United Nations. (2015). Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. New York: United Nations.
- United Nations Development Programme. (2022). Evaluating Inclusive Development Programmes.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2023). Human Development Report 2023: Uncertain Times, Unsettled Lives: Shaping our Future in a Transforming World. New York: UNDP.
- Whitney, D., & Trosten-Bloom, A. (2010). The power of appreciative inquiry: A practical guide to positive change. Berrett-Koehler Publishers.
- World Bank. (2000). Attacking poverty: World Development Report 2000/2001. Oxford University Press.

Model Pemberdayaan Masyarakat
